



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1(satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- b. bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2021.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor Seri), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

The image shows the official circular stamp of the Bupati of Bandung Barat. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI BANDUNG BARAT" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

The image shows the official circular stamp of the Sekretaris Daerah of Kabupaten Bandung Barat. The stamp features the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

H. H. ASER SODIKIN, MUM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR SERI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud Dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografis	II-1
2.1.1.2 Kondisi Demografi.....	II-13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-16
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi	II-16
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-24
2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga.....	II-28
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-28
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib	II-28
2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan	II-45
2.1.3.2. Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan.....	II-48
2.1.4 Aspek Daya saing.....	II-53
2.1.4.1 Iklim Investasi	II-53
2.1.4.2 Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-53
2.1.4.3 Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....	II-54
2.1.4.4 Sumber Daya Manusia	II-55
2.1.4.5 Potensi Seni Budaya	II-56
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD.....	II-57
2.3 Permasalahan Pembangunan.....	II-122



BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH..... III-1

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat ... III-2
 - 3.1.2 Kontribusi Sektor -Sektor..... III-6
- 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian III-11
- 3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-21
 - 3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-21
 - 3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-23
 - 3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-25

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2021 IV-1

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan IV-2
 - 4.1.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional..... IV-2
 - 4.1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat IV-5
 - 4.1.3 Strategi pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat IV-10
 - 4.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah..... IV-16
 - 4.1.5 Prioritas Pembangunan Nasional 2021 IV-18
 - 4.1.6 Prioritas Pembangunan Jawa Barat IV-25
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2019 IV-26

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

TAHUN 2019..... V-1

- 5.1 Pagu Indikatif V-1
 - 5.1.1 Belanja Tidak Langsung V-3
 - 5.1.2 Belanja Langsung V-3
- 5.2 Program, Kegiatan Sub Kegiatan PD Tahun 2021 V-9

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... V-1

- 6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama VI-2
- 6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci VI-3

BAB VII PENUTUP VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa	II – 2
Tabel 2.2.	Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian	II – 4
Tabel 2.3.	Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat	II – 5
Tabel 2.4	Jenis Geologi Kabupaten Bandung Barat	II – 6
Tabel 2.5.	Sebaran Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat	II – 7
Tabel 2.6.	Sebaran Lahan Kritits di SetiAP Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bandung Barat	II– 10
Tabel 2.7.	Guna Lahan Kabupaten andung Barat Tahun 2007	II – 12
Tabel 2.8.	PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2017 -2019	II – 17
Tabel 2.9.	PDRB Atas Harga Konstans menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2017 -2019	II–18
Tabel 2.10	Inflasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 – 2019	II–21
Tabel 2.10	Indeks Gini Kabupaten Bandung Barat	II–22
Tabel 2.11.	IPM Kabupaten Bandung Barat dan komponennya Tahun 2017 – 2019	II–24
Tabel 2.12.	Angka Partisipasi Kasar dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat	II–25
Tabel 2.14.	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019	II – 27
Tabel 2.15.	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015-2019.....	II – 27
Tabel 2.16.	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019	II –29
Tabel 2.17.	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Jenjang Sekolah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2014-2018.....	II – 30
Tabel 2.18.	Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Bandung Barat tahun 2014-2018	II – 30
Tabel 2.19	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019.....	II - 31
Tabel 2.20	Capaian indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2018.....	II - 33
Tabel 2.21	Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 -2019	II –34
Tabel 2. 22	Capaian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupatenn Bandung Barat tahun 2015 – 2019.....	II –34
Tabel 2. 23	Pengelolaan Arsip Secara Baku di di Kabupatenn Bandung Barat tahun 2015 –	



	2018.....	II-37
Tabel 2.24	Garis Kemiskinan di Kabupatenn Bandung Barat tahun 2015 – 2019	II-38
Tabel 2.25	Ketersediaan Pangan di Kabupatenn Bandung Barat tahun 2015 – 2019	II-40
Tabel 2.26	Dokumen statistik di Kabupatenn Bandung Barat tahun 2015 – 2019	II-41
Tabel 2.27	Kondisi jaringan jalan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015- 2019	II-41
Tabel 2.28	Rasio Rumah layak huni di Kabupatenn Bandung Barat tahun 2014 – 2018	II-43
Tabel 2.29	Presentase Penanganan Sampah di Kabupatenn Bandung Barat tahun 2015 – 2019	II-44
Tabel 2.30	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 – 2019	II-44
Tabel 2.30	Produktivitas padi per hektar di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 – 2019	II-45
Tabel 2.31	Kontribusi ektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat	II - 46
Tabel 2.32	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2019	II - 47
Tabel 2.33	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017- 2019.....	II – 54
Tabel 2.34	Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019.....	II - 55
Tabel 2.35	Rasio ketergantungan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014- 2018	II- 56
Tabel 2.36	Rekapitulasi Potensi Seni dan Budaya di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015- 2019.....	II - 57
Tabel 3.37	Evaluasi Pelaksanaan Program da Kegiatan RKPD, Capaian visi dan Misi RPJMD.....	II-58
Tabel 3.1	PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 – 2019	III – 20
Tabel 3.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 – 2019 (Milyar Rupiah).....	III-4
Tabel 3.3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2019 (Persen).....	III-6
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 – 2019.....	III-9
Tabel 3.5	Laju Inflasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017- 2019.....	III-10
Tabel 3.6	Outlook Perekonomian Global.....	III-11



Tabel 3.7	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019-2023	III-17
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021.....	III-22
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2021.....	III-24
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018- 2021.....	III-26
Tabel 4.1	Keterkaitan Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023.....	IV - 8
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bandung Barat	IV - 10
Tabel 4.3	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV - 17
Tabel 4.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Poin I	IV - 26
Tabel 4.5	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Poin II	IV - 28
Tabel 4.6	Penjelasan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV - 29
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Makro Kabupaten Bandung Barat	VI - 2
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bandung Barat	VI -2
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat	VI -3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019	I – 4
Gambar 1.2.	Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019	I – 5
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.....	II – 3
Gambar 2.2.	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa di Kabupaten Bandung Barat	II – 9
Gambar 2.3	Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah	II-10
Gambar 2.4	Peta Guna Lahan Eksisting Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007	II-13
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat	II-14
Gambar 2.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat	II-15
Gambar 2.7	Piramida Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat	II-16
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 – 2017	II-20
Gambar 2.10	IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 – 2018	II-23
Gambar 2.11	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019	II-26
Gambar 2.11	SIPD Kabupaten Bandung Barat	II-49
Gambar 2.12	SIPKD Kabupaten Bandung Barat	II-51
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019* (Persen)	III-8
Gambar 3.2	Outlook Perekonomian Global	III-11
Gambar 3.2	Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia	III-13
Gambar 4.1	Tema Pembangunan RKP Tahun 2021	IV-5





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan tahunan tersebut di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan dalam lingkup waktu dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD Tahun 2021 juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2021. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja PD, berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 disusun melalui tahap penyesuaian dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2019-2024, dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, baik yang bersifat *Common Goals* Provinsi Jawa Barat maupun kebijakan tematik kewilayahan, serta Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prakiraan maju, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan dan isu-isu strategis. Capaian RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai Visi Misi Bupati sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun 2019. Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 ini memperhatikan dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 bahwa dalam hal RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019. Sehingga ada konsistensi antara kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan kebutuhan riil masyarakat di seluruh Kabupaten Bandung Barat.

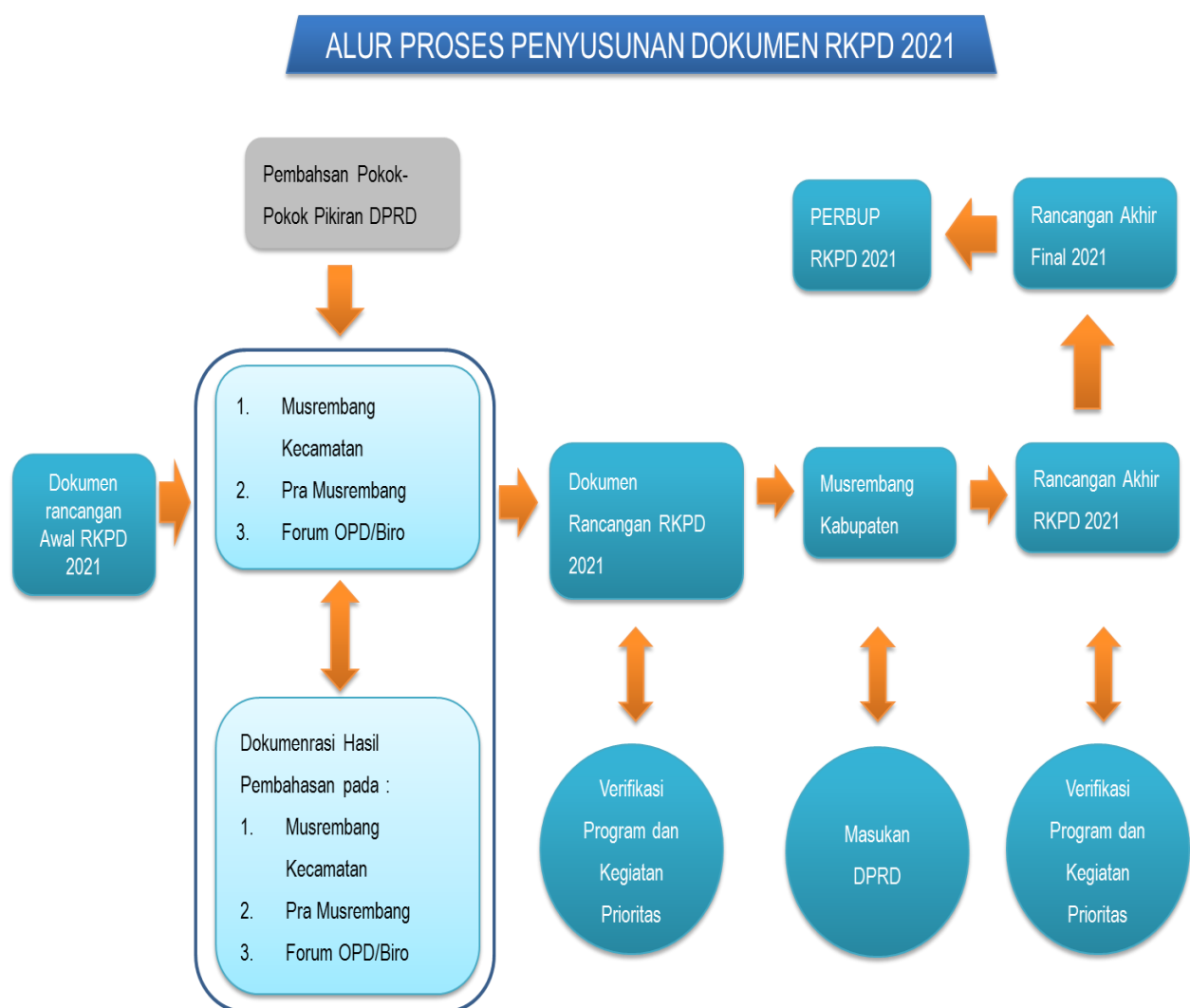
Dalam Proses Penyusunan Rancangan RKPD digunakan pendekatan sebagai berikut:

-
1. **Pendekatan atas-bawah** (*top down*) yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP),,
 2. **Pendekatan bawah-atas** (*bottom up*), pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan, Pra Musrenbang kabupaten, dan Musrenbang Kabupaten.
 3. **Pendekatan politik**, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
 4. **Pendekatan teknokratik**, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
 5. **Pendekatan partisipatif**, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, menggunakan pendekatan:

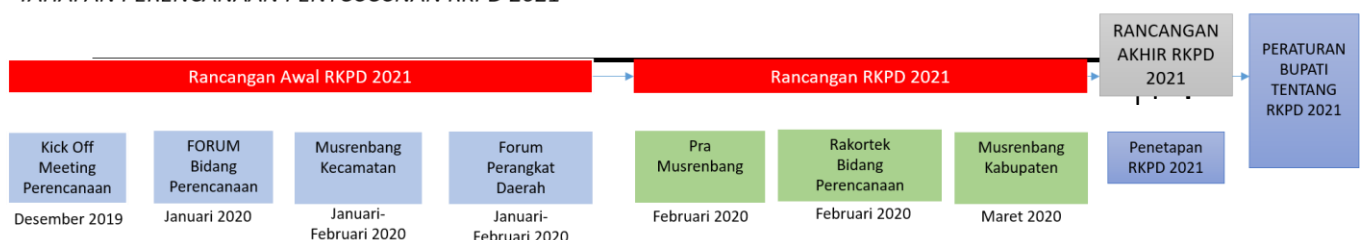
1. Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
 2. Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
 3. Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
-

Dengan pendekatan perencanaan tersebut ditunjang dengan penerapan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui tahapan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

TAHAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN RKPD 2021



Gambar 1.2
Alur Proses Detail Penyusunan Dokumen RKPD
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



-
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
-



-
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
-



-
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2009);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2009)
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
- 37
-

-
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 3 Seri E)
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sejatinya RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 merupakan penjabaran tahunan RPJMD yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025.

Mengingat penyusunan RKPD 2021 ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024

RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 disusun untuk mensinergikan perencanaan pembangunan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sinergitas yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan daerah dan pusat, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah dan

nasional. Konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan potensi-potensi unggulan dari masing-masing kecamatan. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang terdapat diberbagai wilayah. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dokumen penganggaran (KUA, PPAS, dan RAPBD 2021), sehingga dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian berbagai Program yang ada dalam RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007-2025 dalam upaya mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui musrenbang;
3. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) Tahun 2021 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
4. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan penjelasan ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJPD, serta keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menguraikan dasar hukum yang berskala nasional maupun lokal yang digunakan dalam penyusunan RKPD. Dasar hukum berskala lokal/daerah yang diterbitkan berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain yang relevan, seperti RKPD provinsi yang berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJPD provinsi serta RTRW provinsi, demikian pula dengan RKP yang berpedoman pada RPJMN dan

RPJPN. Di bagian ini juga dimuat gambar yang menjelaskan kerangka penyusunan RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Sistematika

Menggambarkan urutan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab beserta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan RKPD tahun sebelumnya,

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.

2.2 Evaluasi RKPD dan RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2021.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Menjelaskan prioritas dan program pembangunan daerah, hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah, serta rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.



BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

BAB VI . KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

Merupakan kaidah pelaksanaan yang memuat arahan dan penegasan Kepala Daerah dalam penerapan RKPD serta arahan untuk tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Kondisi Geografis.

Posisi geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 3,73' - 07° 1,031' Lintang Selatan dan 107° 1,10' - 107° 4,40' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar 1.305,77 km² atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Secara Administratif Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan, 165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang; Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- c. Selatan : Berbatasan Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

Adapun luas wilayah administrasi per kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.1** sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1	Lembang	96,07	16
2	Parongpong	45,12	7
3	Cisarua	55,14	8
4	Cikalongwetan	112,95	13
5	Cipeundeuy	101,11	12
6	Ngamprah	36,01	11
7	Cipatat	125,66	12
8	Padalarang	51,40	10
9	Batujajar	31,87	7
10	Cihampelas	46,93	10
11	Cililin	77,78	11
12	Cipongkor	79,99	14
13	Rongga	113,17	8
14	Sindangkerta	120,49	11
15	Gununghalu	160,62	9
16	Saguling	51,46	6
Kabupaten Bandung Barat		1.305,77	165

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Peta wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat tercantum dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Dari tabel diatas masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah dan jumlah desa yang berbeda. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gununghalu yaitu 160,62 Km² dan beberapa kecamatan memiliki wilayah yang luasnya di atas 100 Ha, yaitu Sindangkerta, Cipatat, Cikalong Wetan, Cipendeuy, dan Rongga. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Ha. Sedangkan kecamatan yang jumlah desanya paling sedikit adalah kecamatan Saguling yaitu hanya 6 desa. Wilayah ini awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Batujajar, posisi geografis menyebabkan desa-desa di wilayah Saguling terisolir sehingga pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah kecamatan sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan, perluasan cakupan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a. Topografi

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah kecamatan Gununghalu seluas 13.480 Ha. Sedangkan kemiringan lereng datar yaitu 0-8 % terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0-2500 mdpl. Dengan luasan lahan terbesar pada ketinggian 500-1000 mdpl yaitu 66% dari total luasan wilayahnya. Berdasarkan informasi kemiringan dan ketinggian wilayah terdapat empat jenis morfologi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan.

Tabel 2.2
Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian

No.	Ketinggian	Luas (ha)
1	0-500 m	20.461
2	500-1000 m	68.786
3	1000-1500 m	32.487
4	1500-2000 m	6.732
5	2000-2500 m	20.461

Sumber : Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009-2029

b. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Bandung Barat memiliki curah hujan rata-rata pertahun adalah kurang lebih pada 1500-3500mm/tahun. Ada dua kecamatan yang memiliki curah hujan kurang dari 1500 yaitu Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Sedangkan untuk curah hujan 1500-2000 mm/th adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang Dan Parongpong. Selanjutnya wilayah yang memiliki curah hujan 2000-2500 adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, dan Sindangkerta. Untuk curah hujan 2500-3000 mm/th terdapat pada wilayah Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gunung Halu, Dan Sindangkerta. Terakhir wilayah yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Cikalong Wetan Dan Cipeundeuy. Berikut tabel curah hujan menurut luasan.

Tabel 2.3
Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	CURAH HUJAN	LUASAN (ha)
1	< 1500 mm/th	5,481
2	1500-2000 mm/th	19,489
3	2000-2500 mm/th	39,947
4	2500-3000 mm/th	48,993
5	3000-3500 mm/th	14,857

Sumber: Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009-2029

c. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi, terutama tipe tektonik dan gempa vulkanik. Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah sesar Lembang, sedangkan daerah-daerah yang berpotensi terjadi gempa akibat letusan gunung/vulkanik adalah wilayah di sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan hasil studi Direktorat Geologi Tata Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:

1. **Zona kritis**, merupakan wilayah yang pengambilan air tanahnya dibatasi sampai maksimum 100 m³ per bulan. Air tanah di wilayah ini hanya diperuntukkan untuk memenuhi keperluan air minum dan rumah tangga. Penyebaran zona kritis pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar berada di Kecamatan Batujajar.
2. **Zona rawan**, untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³/bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan: Batujajar. Daerah resapan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan: Lembang dan Cisarua.
3. **Daerah aman pengambilan air tanah** pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m³/hari dengan jumlah sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan: Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah dan Parongpong.

4. **Daerah resapan**, tidak dikembangkan bagi pengambilan air tanah kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan: Lembang dan Cisarua.
5. **Zona bukan cekungan air tanah**, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan: Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.

Tabel 2.4
Jenis Geologi Kabupaten Bandung Barat

NO.	JENIS GEOLOGI	LUASAN (HA)
1	<i>Littoral</i>	4.550
2	<i>Littoral Reef</i>	866
3	<i>Neritic</i>	13.060
4	<i>Plutonism Sub-Volcanic</i>	4.215
5	<i>Terrestrial Alluvium</i>	560
6	<i>Terrestrial Fluvial</i>	39.373
7	<i>Terrestrial Lacustrine</i>	7
8	<i>Transition</i>	414
9	<i>Volcanism Subaerial</i>	59.984
10	<i>Unknown</i>	4956

Sumber: Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009-2029

d. Hidrologi dan Hidrogeologi

1. Air Permukaan

Kabupaten Bandung Barat memiliki ± 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar. Sumber mata air yang terdapat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat umumnya dijumpai di sekitar kaki, lereng dan bagian atas perbukitan yang tersusun oleh batuan vulkanik dan mempunyai penyebaran tidak merata. Daerah-daerah mata air yang cukup banyak dijumpai di sekitar perbukitan utara, timur dan selatan. Di bagian barat (kecuali barat laut), pemunculan mata air dapat disebut sebagai daerah yang sangat jarang dijumpai.

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 2 Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy. Situ-situ ini dimanfaatkan sebagai lokasi tujuan wisata. Waduk/danau buatan yang terdapat di daerah kajian yaitu Waduk Saguling dan Cirata yang merupakan sumber tenaga listrik (PLTA). Kondisi situ dan waduk masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

- Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m³. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitasnya sebesar 3,7 m³ dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 km³.
- Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m³.
- Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m³, dengan ketinggian mukaair + 220 m/dpl.

Potensi Mata air di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 223 lokasi, yang tersebar di 12 Kecamatan di Bandung Barat dengan debit air sebesar 2-500 liter/detik untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel

Tabel 2.5
Sebaran Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
1.	Lembang	119	1 - 40
2.	Parongpong	26	1,5 - 100
3.	Cisarua	62	1- 60
4.	Ngamprah	46	1 - 130
5.	Cikalongwetan	73	1 - 50
6.	Padalarang	13	1 - 15
7.	Cipatat	28	1,5 -11
8.	Cililin	39	1 - 13
9.	Batujajar	29	0,5 - 3
10.	Gununghalu	15	1 - 75
11.	Sindangkerta	32	1 - 8

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
12.	Cipongkor	24	0,8 - 12
13.	Cipendeuy	44	1 -10
14.	Rongga	116	0,5 - 50
15.	Cihampelas	50	2 - 13

Sumber : Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009 - 2029

2. Air Tanah

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat daerah resapan air tanah yang merupakan resapan utama atau primer meliputi bagian lereng bervegetasi lebat pada ketinggian tertentu sampai puncak gunung yang terutama dibentuk oleh batuan gunung api muda. Selain itu, zona resapan utama meliputi pula bagian daerah pegunungan dan perbukitan berupa punggung yang bertindak sebagai tinggian pemisahan air utama bagi sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan.

Berdasarkan hasil penelitian hidrogeologi untuk menentukan batas horizontal cekungan air tanah yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan yang kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2003, cekungan air tanah di Jawa Barat terdapat 27 buah, dengan 2 cekungan air tanah diantaranya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.

3. Potensi Rawan Bencana Alam

Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, angin kencang, dan letusan gunung berapi. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung barat didominasi oleh kejadian gempa bumi dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana longsor secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu. Kawasan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua. Beberapa jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

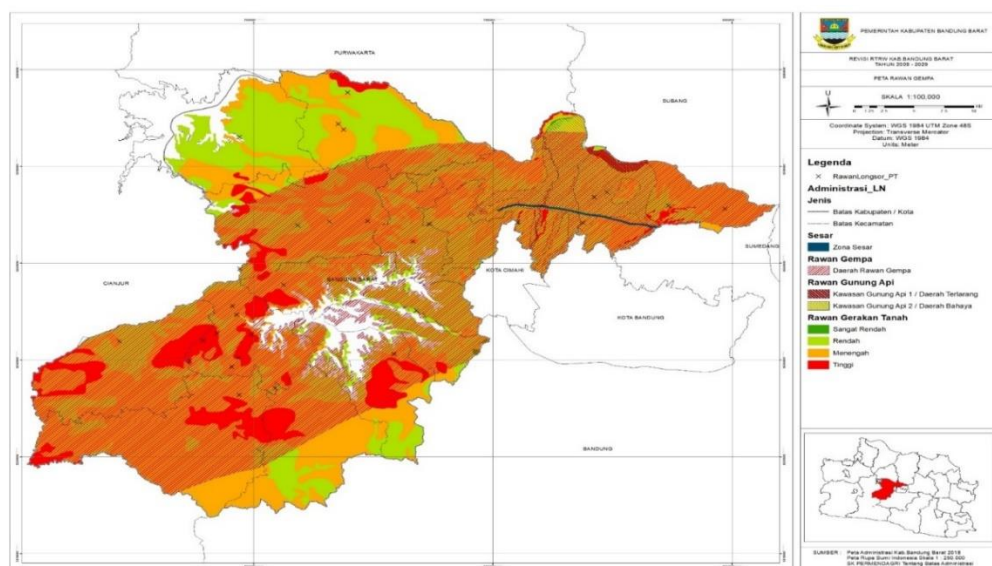
a. Banjir

Wilayah Kabupaten Bandung Barat, kejadian banjir umumnya hanya berupa genangan terutama karena buruknya saluran drainase. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase disini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah.

b. Gempa Bumi dan Aliran Lahar

Potensi gempa vulkanik di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah di daerah yang berdekatan dengan gunung berapi, seperti Gunung Tangkuban Perahu meliputi Kecamatan Lembang, Cisarua, Parongpong. Daerah tersebut selain rawan bencana gempa vulkanik juga rawan aliran lahar.

Beberapa kawasan, terutama di utara Kabupaten Bandung Barat yang tergolong daerah beresiko aliran lahar. Beberapa kecamatan memiliki kawasan beresiko aliran lahar ini antara lain Kecamatan Lembang (4.340 ha) dan Cisarua (1.580 ha). Peta kawasan rawan bencana gempa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

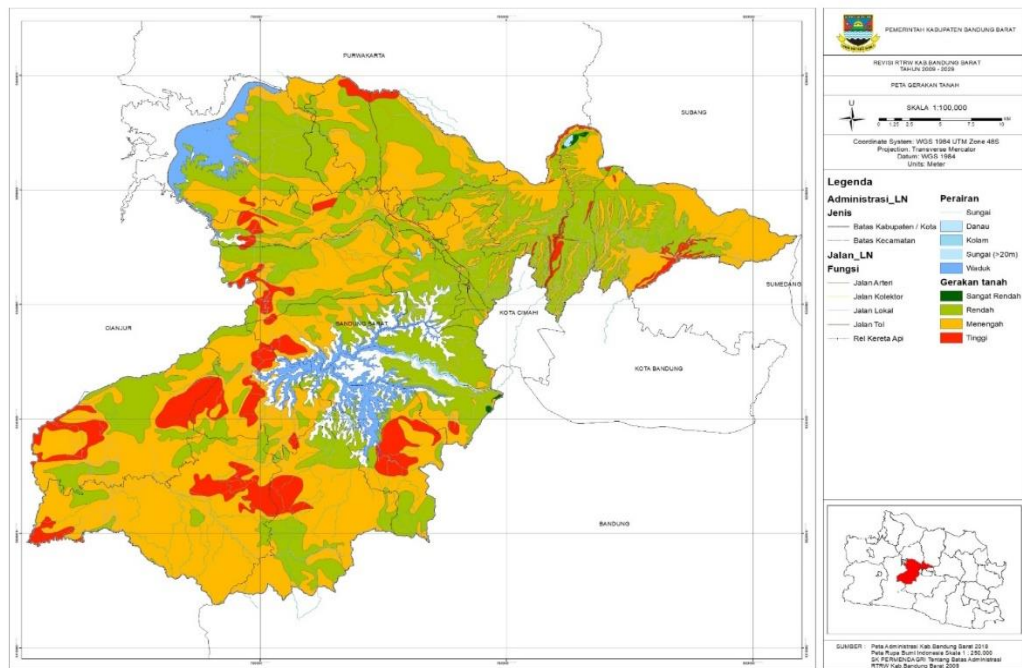


Sumber : Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009 – 2029

Gambar 2.2
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa di Kabupaten Bandung Barat

c. Tanah Longsor dan Gerakan Tanah

Kecamatan yang merupakan kawasan rawan longsor dan gerakan tanah meliputi: Cikalongwetan, Lembang, Gununghalu, Cipatat, Sindangkerta, Batujajar, Cisarua, dan Cililin.



Sumber : Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009 - 2029

Gambar 2.3
Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah

d. Sebaran Lahan Kritis

Selain tanah longsor, juga sering terjadi tanah amblas, retak-retak dan patahan. Selain jenis rawan bencana yang dijelaskan diatas, di Kabupaten Bandung Barat juga terdapat Permasalahan lahan kritis dan terlantar. Adapun sebaran lahan kritis di setiap Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6

Sebaran Lahan Kritis di Setiap Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Desa
1.	Lembang	Sukajaya, Lembang, Cibogo, Jayagiri, Mekarwangi, Gudangkahuripan, Cikahuripan, Wangunsari, Pagerwangi, Langensari, Cikole, Wangunharja dan Suntenjaya.
2.	Parongpong	Cigugur Girang, Cihanjuang Rahayu, Cihanjuang, Karyawangi dan Sariwangi.
3.	Cisarua	Pasirlangu, Cipada, Tugumukti, Pasirhalang, Pada Asih, Sadangmekar, Jambudipa dan Kertawangi.
4.	Ngamprah	Cilame, Bojongkoneng, Pakuhaji, Cimanggu dan Mekarsari.
5.	Padalarang	Campakamekar, Jayamekar, Padalarang, Tagogapu dan Ciburuy.
6.	Cikalongwetan	Wangunjaya, Tenjolaut, Cisomangbarat, Ciptagumati, Kanangasari, Rende, Cikalong, Mandalamukti, Puteran, Mandalasari, Cipada, Mekarjaya dan Ganjarsari.
7.	Cipeundeuy	Sirnajaya, Nanggaleng dan Margaluyu.
8.	Cipatat	Cipatat, Ciptaharja, Kertamukti, Sarimukti, Cirawamekar, Sumurbandung, Gunungmasigit dan Citatah.
9.	Batujajar	Batujajara Timur, Batujajar Barat, Cangkorah, Selacau, Galanggang, Pangauban, dan Giriasih
10.	Cihampelas	Tanjungwangi, Situwangi dan Singajaya.
11.	Cililin	Kidangpananjung, Karanganyar, Karyamukti dan Nanggerang.
12.	Sindangkerta	Buninagara, Weninggalih, Rancasenggang, Wangunsari, Pasirpogor dan Puncaksari
13.	Cipongkor	Mekarsari, Cijambu, Sirnagalih, Baranangsiang, Sarinagen, Cintaasih, Cibenda, Citalem, Cijenuk, Karangsari dan Neglasari.
14.	Gununghalu	Sirnajaya, Bunijaya, Gununghalu, Sindangjaya, Cilangari, Celak, Wargasaluyu, Tamanjaya dan Sukasari.
15.	Rongga	Cinengah, Cibedug, Cicadas, Bojongsalam, Sukaesmi, Bojong, Cibitung dan Sukamanah.
16.	Saguling	Cikande, Jati, Girimukti, Bojonghaleuang, Cipangeran dan Saguling

Sumber : Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009 – 2029

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jika dilihat dari fungsi guna lahan, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh fungsi budidaya pertanian sebesar 78.446 Ha atau hampir 60 % dari luasan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Disusul oleh luasan fungsi budidaya non-pertanian sebesar 19,73%

dair luas wilayah. Kabupaten Bandung Barat memiliki luasan fungsi kawasan lindung yang relatif kecil, hanya 15% dari total wilayah yaitu 19.171 Ha. Berikut penjabaran luasan guna lahan Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.7
Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007

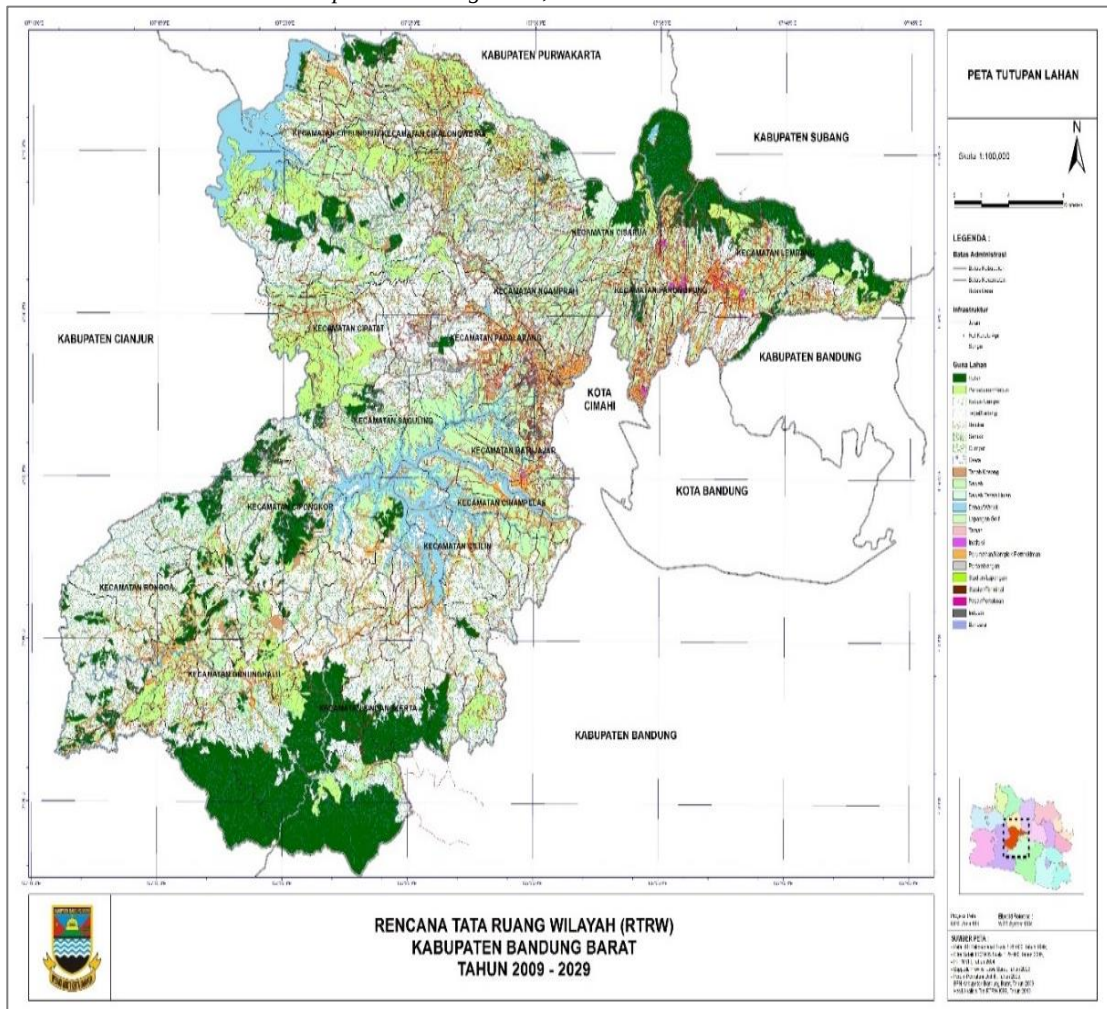
No.	Jenis Guna Lahan	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung		
	Kawasan Lindung	19,171.04	14,65%
	Total	19,171.04	14,65%
2	Kawasan Budidaya		
2A	Budidaya Pertanian		
	Kebun Campur	8,758.76	6,70%
	Perkebunan	9,562.95	7,31%
	Sawah	16,309.44	12,47%
	Sawah Tadah Hujan	19,342.69	14,79%
	Tegal/Ladang	24,472.31	18,71%
	Total Budidaya Pertanian	78,446.15	59,96%
2B	Budidaya Non-Pertanian		
	Industri	2,270.73	1,74%
	Institusi	251.94	0,19%
	Jalan	2,000.00	1,53%
	Jalan Kereta Api	52.76	0,04%
	Pasar / Pertokoan	776.79	0,59%
	Permukiman	20,260.16	15,49%
	Lapangan	50.02	0,04%
	Taman	35.11	0,03%
	Tambang	114.31	0,09%
	Total Budidaya Non Pertanian	25,811.82	19,73%
	Total Budidaya	104,257.97	79,69%
3	Lainnya		
	Tanah Kosong	3,702.29	2,83%

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021*



No.	Jenis Guna Lahan	Luasan (Ha)	Persentase (%)
	Rumput	3,689.94	2,82%
	Total	7,392.23	5,65%
	Total Kabupaten	130,821.24	100.00%

Sumber : Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009 - 2029



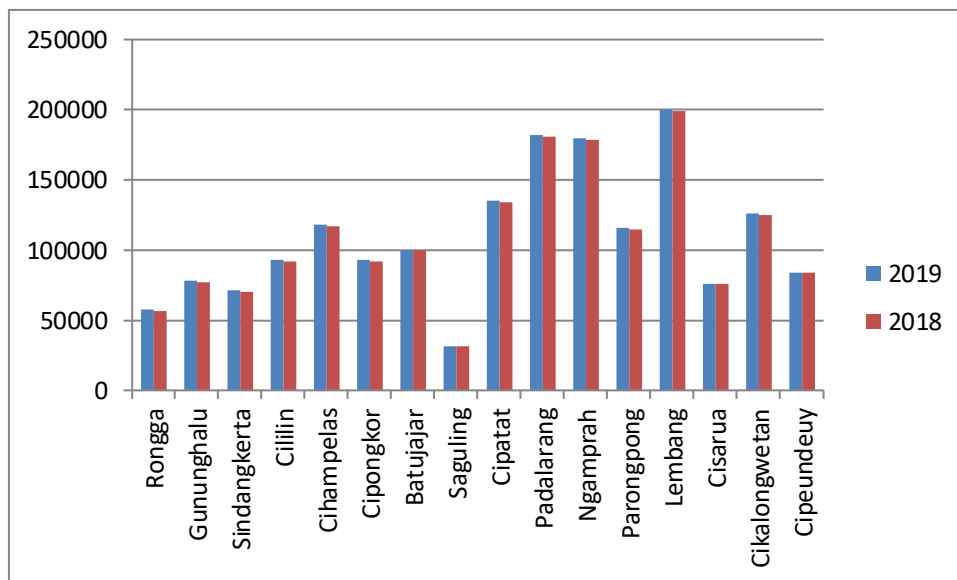
Sumber : Review RTRW Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2009 - 2029

Gambar 2.4
Peta Guna Lahan Eksisting Kabupaten Bandung Barat (Tahun 2007)

2.1.1.2 Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sebanyak 1.739.911 jiwa dengan komposisi (menurut jenis kelamin) relatif

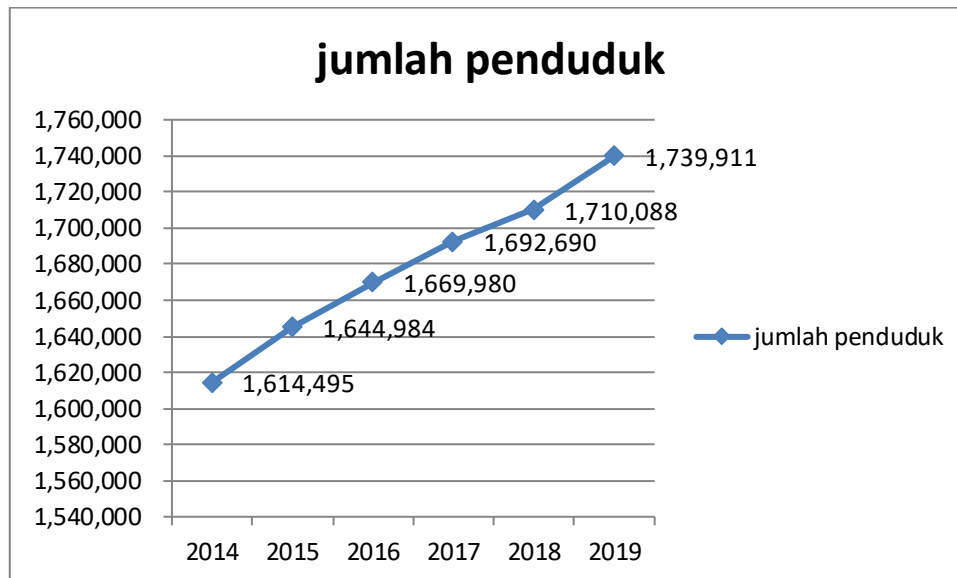
seimbang, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 886.076 jiwa (50,93 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 853.835 jiwa (49,07 persen). Dibandingkan dengan tahun 2018 (1.727.337 Jiwa), jumlah penduduk pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12.574 jiwa atau mengalami laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,73%.



Sumber: Diskominfotik, Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Gambar 2.5
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
berdasarkan jenis kelamin (Tahun 2018-2019)

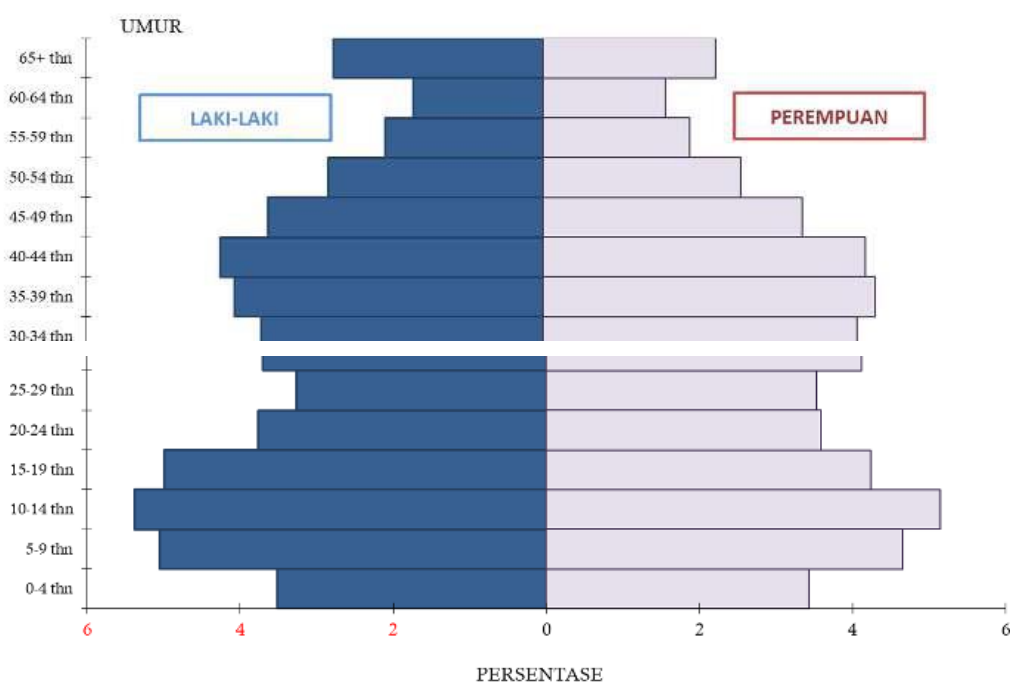
Kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang tidak merata, dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan karena untuk penyusunan program pembangunan perlu memperhatikan penyebaran penduduk agar program dilaksanakan sesuai dengan sasaran. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Berikut jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat pada gambar 2.5:



Sumber: Diskominfo, Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Gambar 2.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat

Presentase Penduduk Kabupaten Bandung Barat pada usia produktif menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk mudatan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosioekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.



Sumber : Diskominfotik, Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Gambar 2.7
Piramida Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat

Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 886.076 jiwa (50,93 persen) dan penduduk perempuan sebesar 853.835 jiwa (49,07 persen) dengan sex ratio sebesar 103,78 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.038 laki-laki.

Dewasa ini, Penduduk Kabupaten Bandung Barat mencerminkan semakin menurunnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian seiring membaiknya layanan kesehatan dan perbaikan kualitas lingkungan. Walaupun demikian, Kabupaten Bandung Barat ini merupakan salah satu tujuan migran dari daerah lain di Jawa Barat bahkan di Indonesia.

2.1.2. Aspek kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi.

a. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Perekonomian Bandung Barat secara agregat tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan).

Selama tahun 2019, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp. 47.180,08milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,7 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 43.807,71 milyar. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, PDRB mengalami peningkatan sebesar 5,05persen, yaitu dari Rp 29.888,89 milyar di tahun 2018 menjadi Rp. 31.398,35milyar pada tahun 2019. Besaran pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2017 – 2019 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.8
PDRB Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2019 (miliar Rp)

Uraian	Tahun	PDRB Adh. Berlaku	PDRB Adh. Konstan
	(1)	(2)	(3)
Bandung Barat	2017	40.204,4	28.330,02
	2018*	43.807,71	29.888,89
	2019**	47.180,08	31.398,35
Provinsi Jawa Barat	2017	1.788.117	1.343.662
	2018	1.962.232	1.419.689
	2019	2.125.158	1.491.706

*)AngkaPerbaikan

**)AngkaSementara

***) Angka SangatSementara

Pembentukan nilai tambah bruto secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Kelompok sektor primer terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Kelompok sektor sekunder terdiri dari sektor industri, sektor listrik/gas/air bersih dan sektor konstruksi. Sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor pengangkutan/telekomunikasi, sektor keuangan/real estate/jasaperusahaan dan jasa jasa.

Pada tahun 2019 kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bandung Barat. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang tercipta dari kelompok sektor ini mencapai Rp.22.875,39 miliar atau meningkat 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh kelompok sektor tersier dan primer yang masing-masing menghasilkan nilai tambah Rp 17.502,28 miliar dan Rp 6.802,42 miliar atau masing-masing mengalami peningkatan 7.66 dan 6.81 persen dibandingkan tahun sebelumnya

Pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha atau sektoral terlihat pada tabel 2.9. Sektor industri yang merupakan *leading* perekonomian di Kabupaten Bandung Barat mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar Rp.18.853,42 miliar rupiah. Keberadaan perusahaan industri besar dan sedang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dimana Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar merupakan wilayah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah sektor industri di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
(Milyar Rupiah) Tahun 2017-2019 Kabupaten Bandung Barat

Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
[1]	[2]	[3]	[4]
<i>Bandung Barat</i>			
1. Pertanian	5,442.76	5,895.31	6,325.51
2. Pertambangan dan Penggalian	459.94	473.24	476.90

3. Industri	15,954.91	17,505.32	18,853.42
4. Listrik, Gas dan Air	333.85	370.84	408.27
5. Bangunan	3,044.75	3,305.39	3,613.70
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	7,600.84	8,228.24	8,841.38
7. Pengangkutan/telekomunikasi	2,874.02	3,072.01	3,290.46
8. Keuangan/Real Estate/Jasa Perusahaan	1,213.26	1,350.03	1,479.92
9. Jasa-jasa	3,280.07	3,607.32	3,890.51
PDRB	40,204.40	43,807.71	47,180.08
<i>Provinsi Jawa Barat</i>			
1. Pertanian	152 939	170 185	186 477
2. Pertambangan dan Penggalan	25 48	26 617	26 451
3. Industri	755 185	827 302	884 121
4. Listrik, Gas dan Air	10 855	10 925	10 967
5. Bangunan	147 555	165 606	181 316
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	269 670	291 738	323 640
7. Pengangkutan/telekomunikasi	100.240	110.912	122.086
8. Keuangan/Real Estate/Jasa Perusahaan	76.119	83.758	90.739
9. Jasa-jasa	152,331	170,080	190,443
PDRB	1 788 117	1 962 232	2 125 158

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat
*)AngkaPerbaikan **) Angka Sementara ***) Angka SangatSementara

Pada posisi kedua, sektor perdagangan/hotel/restoran mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar 8.841,38 miliar rupiah. Keberadaan pusat perbelanjaan dan beberapa supermarket menjadi determinasi kinerja sektor ini. Namun pasar tradisional permanen diharapkan tetap mampu menjadi basis perdagangan tradisional, dengan penataan dan pengelolaan yang rapi. Kontribusi sektor ini walaupun masih di bawah sektor industri, namun terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan kontribusi sektor industri justru mengalami tren penurunan.



Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan salah satu sektor yang sangat potensial dalam mendukung perekonomian Kabupaten Bandung Barat berada pada urutan ketiga dengan pembentukan nilai tambah sebesar 6.325,51 miliar rupiah. Pendukung utama pada sektor ini adalah sub sektor tanaman bahan makanan yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman sayuran dan buah-buahan. Selain itu sub sektor peternakan juga memiliki andil yang cukup signifikan dan mempunyai prospek ekonomi yang cukup tinggi untuk terus dikembangkan. Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundangundangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.



Tabel 2.9.1
PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2019 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
[1]	[2]	[3]	[4]
Bandung Barat			
1. Pertanian	3,592.89	3,688.41	3,790.60
2. Pertambangan dan Penggalian	326.16	334.00	329.67
3. Industri Pengolahan	11,321.76	12,071.60	12,770.36
4. Listrik, Gas dan Air	232.62	241.02	248.63
5. Bangunan	2,056.95	2,187.51	2,349.05
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	5,507.89	5,768.00	6,027.88
7. Pengangkutan/Telekomunikasi	2,140.88	2,274.99	2,405.00
8. Keuangan/Real Estate/Jasa Perusahaan	887.46	960.65	1,028.75
9. Jasa-jasa	2,263.43	2,362.70	2,448.43
PDRB	28,330.02	29,888.89	31,398.35
Provinsi Jawa Barat			
1. Pertanian	99 669	101 777	104 657
2. Pertambangan dan Penggalian	104 657	25 496	24 791
3. Industri Pengolahan	578 703	616 442	641 352
4. Listrik, Gas dan Air	5 438	5 439	5 374
5. Bangunan	111 001	119 305	126 631
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	207 863	216 614	232 8
7. Pengangkutan/Telekomunikasi	153,071	164,283	175,853
8. Keuangan/Real Estate/Jasa Perusahaan	56,074	59,674	62,731
9. Jasa-jasa	104,172	109,524	116,271
PDRB	1 343 662	1 419 689	1 491 706

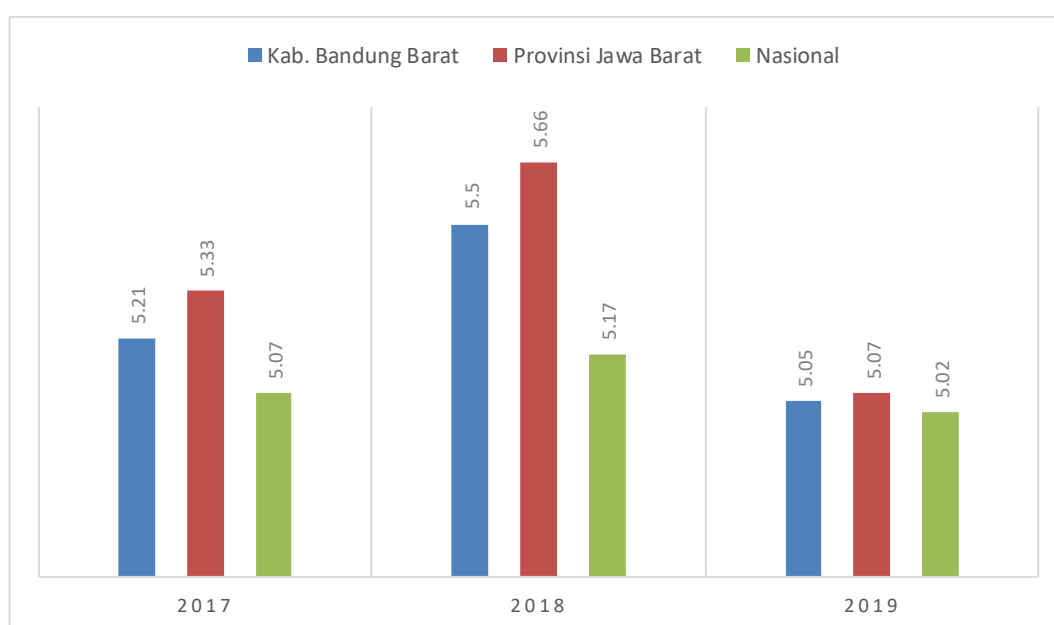
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat,

Badan Pusat Statistik

*)AngkaPerbaikan **)Angka Sementara ***) Angka SangatSementara

Atas dasar harga konstan (2000), sektor industri mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar 12.770,36 milyar rupiah dan sektor PHR sebesar 6.027,88 miliar rupiah. Sedangkan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3.790,60 miliar rupiah.

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2000, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5.05 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2018 mencapai 5,50 persen.



Sumber : Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Badan Pusat Statistik

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2017 – 2019* (persen)

b. Inflasi

Salah satu indikator yang kerap digunakan untuk memantau perkembangan harga-harga yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat secara umum adalah laju inflasi yang juga dapat digunakan untuk menghitung peningkatan kebutuhan hidup dari rumah tangga.

Inflasi adalah Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sedangkan Indeks Harga konsumen (IHK) ialah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga, seperti indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IHPB), dan indeks harga implisit. Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2019 inflasi mencapai 2,52 persen, lebih rendah bila dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3.28 persen.

Tabel 2.10
Inflasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 - 2019

URAIAN	2017	2018*	2019**
[1]	[2]	[3]	[4]
a. PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	40,204,396.94	43,807,707.40	47,180,080.50
b. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (juta Rp)	28,330,024.82	29,888,888.08	31,398,351.99
c. Indeks Harga Implisit	141.91	146.57	150.26
d. Laju Inflasi (persen)	3,15	3.28	2,52

Sumber : Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

d. Indeks Gini

Indeks gini merupakan stu ukuran utnuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Semakin kecil (mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang.

Kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Indeks gini Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 mencapai 0,38 sedikit lebih kecil dibandingkan provinsi Jawa Barat dan nasional. Dari tahun 2016 – 2019 nilai indeks gini Kabupaten Bandung Barat menunjukan nilai yang fluktuatif yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Indeks Gini Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Bandung Barat	0,36	0,40	0,39	0,38
Provinsi Jawa Barat	0,40	0,43	0,40	0,39
Nasional	0,41	0,40	0,39	0,39

Sumber : Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Indeks gini kabupaten Bandung Barattermasuk kedalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 – 0,5 yang menunjukan bahwa masih belum meratanya distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan titik awal dari munculnya masalah perbedaan tingkat kesejahteraan. Untuk menurunkan indeks gini dan kemiskinan terutama di Kabupaten Bandung Barat merupakan masalah multi dimensional, yang artinya tidak ada kebijakan tunggal untuk bisa bisa menurunkan angka statistik tersebut. Karena harus melihat, bukan hanya sosial, ekonomi, bahkan ke depan menyangkut terhadap lingkungan.

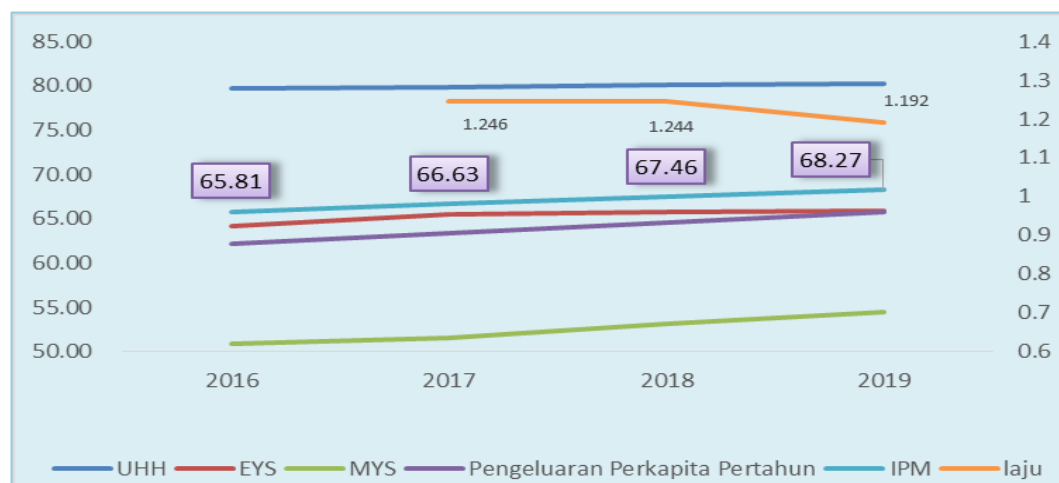
Dengan demikian peran pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam bidang perekonomian perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor – dektor yang di geluti penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang optimal dan sekligus memperbaiki ditribusi pendapatan

penduduk. Seperti pengembangan industri yang berbasis pertanian lokal (agroindustri) yang secara efektif dapat menciptakan nilai tambah dan menstimulus sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus UKM di Kabupaten Bandung Barat.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer pemerintah untuk membantu rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kesulitan untuk mengembangkan model pembangunan yang secara holistic memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Tidak hanya sekedar mempertinggi pendapatan perkapita yang berdampak pada masalah ketimpangan, tetapi juga memperlihatkan kualitas kehidupan manusia.

Secara umum capaian pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hasil penghitungan IPM berdasarkan data hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 menunjukkan bahwa pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 telah mencapai 68,27 yang terbentuk dari indeks kesehatan sebesar 80,22 indeks pendidikan sebesar 66,50 dan indeks daya beli sebesar 65,69. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Bandung Barat berada dalam kategori “menengah”. Disisi lain, peningkatan IPM Kabupaten Bandung Barat mempengaruhi peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2019

Gambar 2.10
IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2019

IPM Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya terdapat peningkatan dan pertumbuhan kualitas hidup masyarakat. Kemudian jika melihat kelompok. Kategori tata atau klasifikasi IPM Kabupaten Bandung Barat masuk kedalam kelompok sedang pada tahun 2016 – 2019.

Tabel 2.11
Capaian IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2019

KOMPONEN	2017	2018	2019
(1)	(4)	(5)	(5)
NILAI			
1. Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,87	72,03	72,14
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,79	11,83	11,97
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,74	7,97	8,14
4. Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah)	8.002,00	8.329,00	8.645,00
IPM	66,63	67,46	68,27

Sumber : Diskominfotik, Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Pencapaian IPM ditinjau dari beberapa indikator yaitu indeks pendidikan yang terdiri dari rata – rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS). Angka rata – rata lama sekolah dari tahun 2016 – 2019 mengalami kenaikan. Tahun 2018 angka rata – rata lama sekolah mencapai 11,82. Hal ini

berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2018 di Kabupaten Bandung Barat memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,82 tahun atau setara dengan Diploma I.

Angka harapan sekolah Kabupaten Bandung Barat rata-rata mencapai angka 8 yang mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2019 angka harapan sekolah Kabupaten Bandung Barat mencapai 11,97. Demikian pula dengan nilai indeks daya beli Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 dengan pengeluaran perkapita sebesar 8.645.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan sosial

Indikator kesejahteraan masyarakat pada bidang sosial diindikasikan dengan pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Murni, Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2019.

1. Pendidikan

Memiliki peran penting dalam proses pembangunan dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat harus disejajarkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pendidikan menjadi pioner utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia.

Tingkat pendidikan penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung Barat hanya relatif lebih unggul dibandingkan dengan penduduk perempuan pada jenjang pendidikan SLTA ke atas. Sedangkan pada jenjang pendidikan SLTP ke bawah, penduduk perempuan ternyata relatif lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki. Dengan adanya peningkatan pendidikan penduduk, berarti meningkatnya kualitas SDM sehingga berkontribusi pula pada kenaikan IPM Kabupaten Bandung Barat.

Pada Tahun 2019, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 55,48 persen; tamat SMP sebesar 23,16 persen; tamat SMU/SMK sebesar 17,81 persen; dan sebanyak 3,68 persen yang tamat pendidikan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi).

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk sedang mengenyam pendidikan yang sedang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK SD untuk laki-laki di Kabupaten Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih mudamapun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk di bangku SD.

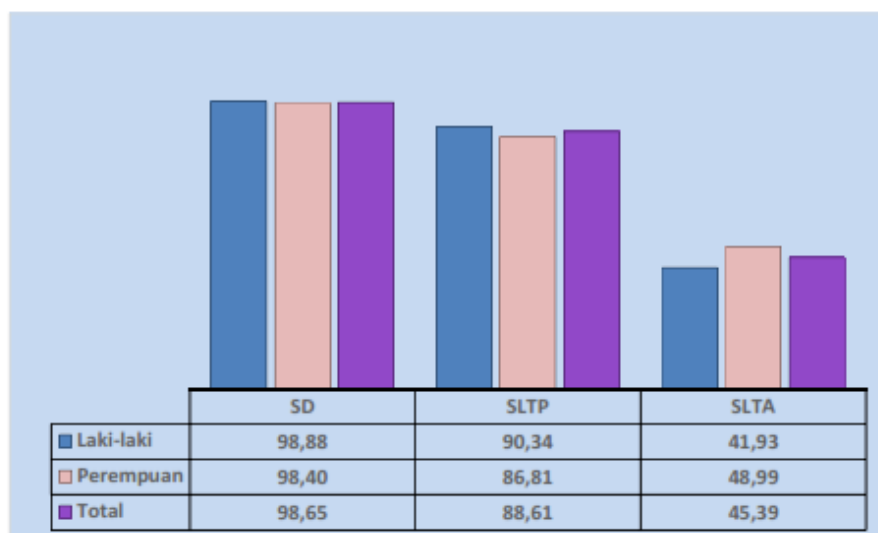
Tabel 2.12
Angka Partisipasi Kasar dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No	Jenjang Pendidikan	Penduduk 10 Tahun keatas		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + perempuan
1.	SD	103,04	99,07	101,03
2.	SLTP Sederajat	94,89	98,09	96,39
3.	SMU Sederajat	50,57	58,19	54,07

Sumber : Bps Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018

Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 sebesar 98,65 persen, artinya 98,65 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan adanya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk perempuan.



Sumber : Diskominfo, Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Gambar 2.11
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

APM SD dan SMP penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD dan SMP penduduk perempuan. APM perempuan lebih tinggi daripada APM laki-laki, terutama pada jenjang pendidikan SLTA ke atas, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada jenjang pendidikan ini terdapat perbedaan pandangan antara orang tua di daerah perdesaan dan di perkotaan. Penduduk perdesaan masih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki daripada anak perempuannya. Kebanyakan mereka masih menganut paham laki-laki harus diutamakan dalam segala hal, karena laki-laki nantinya akan menjadi seorang pemimpin, (dalam lingkup paling kecil yaitu keluarga).

2. Kesehatan

Indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan kesehatan, diantaranya adalah usia harapan hidup (AHH) dan angka kematian bayi (AKB).

Angka Harapan Hidup (AHH), merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pencapaian angka harapan

hidup menurut kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel 2.14
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2016 - 2019

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,82	71,87	72,03	72,14

Sumber : Diskominfo, Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Angka Kematian Bayi

AKB Kabupaten Bandung Barat Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup)

Selama lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan yang sangat lambat, bergerak dari sebanyak 40,35 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 39,89 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019.

Tabel 2.15
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2015 - 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Angka Kematian Bayi (AKB)	40,35	40,32	40,18	40,09	39,89

Sumber : Diskominfo, Data Makro Sosial, Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

3. Fokus Ketenagakerjaan

Daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka berdampak positif yaitu dapat menghasilkan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan. Namun di sisi lain dengan pertambahan penduduk yang pesat menimbulkan dampak negatif jika tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan

pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja sehingga dapat memicu peningkatan pengangguran.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 766.961 sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 468.183 yang meliputi pekerjaan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Hal ini dapat dilihat pula dari komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sektor lainnya.

2.1.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pengembangan seni budaya di Kabupaten Bandung Barat diselenggarakan secara terintegrasi dengan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Bandung Barat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka melayani masyarakat umum. Pelayanan tersebut terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Aspek pelayanan umum urusan wajib diantaranya terbagi dalam urusan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah

Menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2015- 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.16
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2015-2019

NO	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	98,70	98,89	98,93	98,96	98,99
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS)	90,70	91,27	91,01	91,37	91,48
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	53,05	54,50	57,56	59,01	59,13

Sumber : Diskominfotik, Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Angka Partisipasi Sekolah penduduk Kabupaten Bandung Barat, dimana pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang besar antara angka partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini menunjukkan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, menunjukkan semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Sebaliknya semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Jenjang sekolah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2014-2018

ASPEK PELAYANAN UMUM	
Fokus Layanan Urusan Wajib	
1	Pendidikan

1.1. 2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	2014	2015	2016	2017	2018
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	1 : 232	1:238.2 0	1 : 235,79	1 : 212,81	1 : 236,30
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/MTs	1 : 375	1:367.7 4	1 : 358,12	1 : 339,57	1 : 345
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/ SMK/MA	1 : 462	1:470.0 4	1 : 457,01	N/A	N/A

Sumber :Dinas Pednidikan Kabupaten Bandung Barat,2018

Rasio Guru Terhadap Murid

Indikator lain yang juga relevan menggambarkan kondisi pelayanan bidang pendidikan adalah rasio guru dan murid. Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah pada berbagai jenjang di Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 21-24 murid/guru. Rasio paling baik ada pada tingkatan SD dengan 21 murid/guru. Secara keseluruhan, hanya beberapa kecamatan di tingkat SD yang mempunyai rasio murid/guru yang baik (<20). Mayoritas kecamatan pada berbagai tingkatan memiliki rasio murid/guru >20.

Tabel 2.17
Rasio Guru terhadap Murid di Kupaten Bandung Barat
Tahun 2014 - 2018

ASPEK PELAYANAN UMUM						
Fokus Layanan Urusan Wajib						
1	Pendidikan					
1.1. 3	Rasio guru/murid	2014	2015	2016	2017	2018
	Rasio guru/murid SD/MI	1 : 40.07	1:31.71	1 : 21,67	1 : 19,84	1 : 21,48
	Rasio guru/murid SMP/MTs	1 : 41.54	1:34.87	1 : 19,59	1 : 18,29	1 : 19,64
1.1. 4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata					
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	1 : 1.37	1:1.57	1 : 2.00	1 : 1,79	1 : 1,30
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs	1 : 1.94	1:2.06	1 : 1.63	1 : 1,88	1 : 1,42
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA	1 : 2,63	1:2.73	1 : 1.23	N/A	N/A

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat 2018 - 2023

Angka Putus Sekolah

Sekolah di suatu jenjang pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka putus sekolah di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 - 2019

ASPEK PELAYANAN UMUM						
Fokus Layanan Urusan Wajib						
1	Pendidikan					
1.5	Angka Putus Sekolah:	2015	2016	2017	2018	2019
1.5.1	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.02	0.01	0,06	0.04	0.09
1.5.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0.03	0.06	0,08	0.31	0.09
1.5.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ MA (%)	0.27	0.07	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, 2019

b. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketersediaan sarana kesehatan di setiap desa seperti adanya Puskesmas, Posyandu dan Bidan yang dapat membantu akses pelayanan masyarakat dengan jarak tempuh yang relatif lebih dekat.

Berdasarkan data dinas kesehatan pada tahun 2018 tercatat bahwa jumlah fasilitas kesehatan menurut jeninya sebagai berikut: rumah sakit sebanyak 7 unit, puskesmas sebanyak 45 unit, rumah bersalin sebanyak 77, klinik sebanyak 76 unit, apotek sebanyak 98 unit, praktek bidan sebanyak 394 serta posyandu sebanyak 2190 unit.

Kondisi ini tentu cukup mengembirakan dimana masyarakat bisa menjangkau pelayanan fasilitas kesehatan dengan mudah dan cepat begitu pula dengan balita mendapatkan pelayanan pantauan kesehatan khususnya peningkatan berat badan secara teratur setiap bulan. Diharapkan apabila terjadi pertumbuhan balita yang kurang baik akan segera terdeteksi, karena dengan penimbangan rutin disertai pemberian makanan tambahan untuk balita di posyandu maka akan terdeteksi bila seorang balita tidak mengalami penambahan berat badan setiap

bulannya. Sehingga angka gizi buruk yang mungkin dialami oleh balita khususnya di wilayah pedesaan akan dapat ditekan serendah mungkin, yang pada muaranya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau semua sasaran. Rasio posyandu per satuan balita tahun 2018 sebesar 0,6.

Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan penduduk

Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar sudah tentu harus terpenuhi standar inputnya, standar proses diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutu mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan tingkat pertama, penyelenggaraannya perlu penataan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sampai tahun 2018 jumlah puskesmas di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 45 unit dengan jumlah penduduk 1.727.337 jiwa. Maka rasio puskesmas per satuan penduduk sebesar 0.556.

Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Dalam rangka upaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan data tahun 2018 jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 7 unit. Rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 0,004. Capaian indikator pelayanan kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.19
Capaian indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat
tahun 2014 – 2018

ASPEK PELAYANAN UMUM					
Fokus Layanan Urusan Wajib					
2	Kesehatan				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio posyandu per satuan balita	16.30	80.00	82.17	64.18	0.6
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.096	0.03	0.004	1.65	0.556
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0036	0.00	0.006	0.5	0.004
Rasio dokter per satuan penduduk	0.162	0.25	0.388	0.66	0.333
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.454	0.33	0.493	0.69	1.8
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	94.98	79.38	83.2	95.86	90.00
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	82.34	87.15	80.14	93.25	94.52
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100.00	100	100	93.9
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100.00	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	48	48.40	45.5	96.56	103
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	76.80	94	11.99	100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) dari yg sakit	1.75	14.63	0.08	1.57	12.14
Cakupan kunjungan bayi (%)	92.90	95.32	93	103.00	93.59
Cakupan puskesmas (%)	200	200.00	206.25	109.36	45
Cakupan puskesmas pembantu (%)	38.79	38.79	38.79	33.27	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018

Presentase Balita Gizi Buruk.

Presentase balita gizi buruk tahun 2016 relatif kecil yaitu 0,017 % lebih kecil dari tahun 2015 sebesar 0,020 %. Hal ini menunjukkan bahwa Presentase balita gizi buruk di Kabupaten Bandung Barat relative sedikit yang artinya deteksi gizi balita di Kabupaten Barat masih belum berjalan dengan baik.

Tabel 2.20
Presentase balita gizi buruk
di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase balita gizi buruk	0,020	0,017	0,019	0.01	

Sumber :RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 - 2023

c. Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera.

Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan urusan yang berkaitan dengan kemajuan dan kemapanan suatu daerah. Dengan adanya keluarga berencana diharapkan dapat mengatur angka kelahiran dan jumlah anak dalam satu keluarga selain itu juga diharapkan setiap keluarga memiliki gambaran masa depan dengan baik secara finansial maupun mental sehingga tercipta keluarga sejahtera. Capaian urusan Keluarga berencana dapat dilihat dari rata- rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2018 mencapai 2,34 % rasio akseptor mencapai 3,65%,cakupan peserta KB aktif 73 dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 mencapai 9,05 %.

Tabel 2.21
Capaian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 – 2019

ASPEK PELAYANAN UMUM						
Fokus Layanan Urusan Wajib						
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2015	2016	2017	2018	2019
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.53	2.36	2.3	2.34	2.39
12.2	Rasio akseptor KB	2.99	3.51	4.15	3.65	
12.3	Cakupan peserta KB aktif	74.93	77.85	76.57	73	
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (%)	33.62	39.1	6.17	9.05	8.82

Sumber :DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2023

d. Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upayamencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender danperan perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hakanak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi.

Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran danposisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalampelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencanadengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik sosial, profesi maupun kemasyarakatan serta keagamaan, diantaranya : gabungan organisasi wanita, organisasi wanita persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat organisasi wanita di bidang kemasyarakatan antaralain Tim Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi wanita profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri.

e. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada penyiapan mereka untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda pada tahun 2019 diarahkan dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pelajar dan pemuda. Upaya ini dilakukan melalui strategi peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan. Dalam upaya untuk meningkatkan

kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan maka terdapat banyak organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Capaian indikator jumlah organisasi kepemudaan tahun 2018 sebanyak 85 organisasi pemuda yang aktif di masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Untuk pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan pada tahun 2018, diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan kuantitas atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan event olahraga bagi masyarakat secara masal, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Dalam upaya untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam bidang olahraga maka dilakukan fasilitasi kegiatan olahraga, adanya organisasi olahraga, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan olahraga dan sarana olahraga. Pada tahun 2019 jumlah organisasi olahraga 178 dari target 178 , jumlah kegiatan olahraga 60 dari target 60 dan sarana olahraga unit dari target 301.

f. Perpustakaan.

Capaian urusan perpustakaan digambarkan melalui berbagai hal seperti jumlah perpustakaan, pengadaan buku- buku perpustakaan, gedung perpustakaan sekolah, dan cakupan pengunjung perpustakaan. Di Kabupaten Bandung Barat jumlah perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 1 buah, dan setiap sekolah memiliki perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar. Selain itu capaian pengunjung perpustakaan pertahun sebanyak 7.152 orang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2.258 orang. Yang artinya partisipasi masyarakat terhadap membaca buku tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan akses jalan yang jauh di perlukan jumlah gedung perpustakaan di setiap kecamatan. Sehingga capaian partisipasi untuk membaca semakin meningkat. dan koleksi buku sebanyak 23 buah.

g. Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk public.

Kearsipan adalah sesuatu proses penagturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan secara sistematis bahan-bahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali di perlukan. Capaian pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.22
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2015- 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Pengelolaan arsip secara baku (%)	56	65	93,02	100

Sumber : Bappeditbangda Kabupaten Bandung Barat, 2018

h. Sosial dan Keagamaan

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Capaian urusan sosial dapat dilihat dari sarana sosial seperti panti asuhan 42 buah, panti jompo 9 buah dan panti sosial penyandang cacat 3 buah, PMKS yang

tertangani sebanyak 55,809 serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 125,803. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap kesejahteraan sosial cukup meningkat dari tahun sebelumnya.

Selain itu terdapat Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat terus ditingkat sebanding dengan semakin tingginya standar pengeluaran penduduk. Namun demikian dengan garis kemiskinan yang semakin tinggi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat semakin rendah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23
Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 – 2019

<i>Tahun</i>	<i>Garis Kemiskinan (Rupiah)</i>	<i>Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)</i>	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>
2015	275.327	205.690	12,67%
2016	294.823	192.480	11,71%
2017	309.304	190.890	11,49%
2018	-	-	10.06%
2019	341.307	159,03	9.38%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Keagamaan

Karakteristik masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang religius menjadikankualitas kehidupan beragama di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan, antara lain ditandai dengan semakin bertambahnyapenyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sarana pendidikankeagamaan, meningkatnya peringatan hari-hari besar keagamaan dansenantiasa terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, internumat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembiayaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk meningkatkan pengembangan kehidupan beragama, maka pembangunan kedepan perlu didukung dengan kebijakan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama dalam bermasyarakat.

i. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Penciptaan kondisi yang kondusif dan bantuan pengembangan usaha kecil menengah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat. Upaya tersebut mendorong terjadinya peningkatan capaian indikator bidang koperasi dan UKM yang terdiri dari jumlah unit usaha dan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data yang ada, setiap tahunnya baik jumlah unit usaha maupun unit koperasi selalu mengalami peningkatan dan memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, capaian RPJMD akhir periode tahun 2018-2023 dengan jumlah koperasi sebanyak 657 dengan koperasi yang aktif 517 dengan presentase koperasi yang masih aktif pada tahun 2019 sebanyak 527. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 10,362, jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina sebanyak 11.603.

j. Penanaman Modal.

Kondisi investasi di Kabupaten Bandung Barat cukup membaik. Peningkatan jumlah investasi tersebut memberikan gambaran membaiknya kepercayaan publik dalam menanamkan modal yang dimilikinya. Pada tahun 2019 jumlah investor nasional (PMDN) sebanyak 63, Investor nasional (PMA) 115, sehingga nilai investasi bersekala nasional (OMDN/ PMA) sebesar Rp. 21.967.376.934.923. Dan rasio daya serap tenaga kerja (PMA/ PMDN) sebesar 1:4.

Secara umum komponen utama pendukung investasi terdiri dari: Kelembagaan pelayanan penanaman modal (16,9%), Promosi investasi daerah (15,6%), Komitmen Pemerintah Daerah (20%), Infrastruktur (9,8%), Akses lahan

usaha (2,4%), Tenaga kerja (6%), Keamanan usaha (10,7%), Kinerja ekonomi daerah (3,1%), dan Peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah (3,6%). Kinerja investasi di Kabupaten Bandung Barat juga berdasarkan pada kontribusi kerja dari 8 (delapan) komponen tersebut.

k. Ketahanan Pangan.

Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan yang perwujudannya berhubungan dengan sektor pertanian dan perkebunan mempunyai peran strategis penting tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Secara umum, ketercapaian kinerja program pada urusan ketahanan pangan dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah regulasi ketahanan pangan, dan ketersediaan pangan utama. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat 0 dari target 0. Sedangkan ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung Barat

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan pangan utama (ton)	247,707.64	260,887	317,943.02	319,910.41	778.196

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

l. Komunikasi dan Informatika.

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah mulai awal periode sampai dengan akhir dalam status “Ada”, dan jumlah pelaksanaan pameran expo tahun 2014 dan tahun 2015 sebanyak 4 kali, meningkat di dan tahun 2016 menjadi 10 kali dan 123 kali.

m. Statistik

Capaian pelaksanaan pada urusan statistik dapat dilihat pada indikator tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada tersusunnya data/informasi dan statistik daerah berupa data Dalam Angka, IPM, PDRB dan Profil Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019.

Tabel 2.25
Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015- 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Buku Kabupaten Dalam Angka	1	1	1	1	1
Buku PDRB Kabupaten	1	1	1	1	1
Buku IPM	1	1	1	1	1
Buku Suseda	1	1	1	1	1
Buku Basis Data Pembangunan	1	1	1	1	1

Sumber : Bappeditbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

n. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan umum terus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu pertumbuhan ekonomi wilayah mapuan kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan perkembangan kondisi jalan yang baik. Infrastruktur yang baik menjadi modal utama masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Peningkatan pelayanan jalan terus dilakukan. Secara akumulatif kondisi jalan terbagi menjadi kondisi rusak, kondisi sedang dan kondisi baik. Berikut gambaran proporsi kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 2015- 2019.

Tabel 2.26
Kondisi Jalan Bandung Barat Tahun 2015- 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
kondisi baik (km)	276,32	259,897	308,05	343,87	342,61
kondisi sedang (km)	76,55	50,162	21,18	45,50	37,76
kondisi rusak ringan (km)	73,25	52,170	65,27	54,80	86,44
kondisi rusak berat (km)	127,53	104,866	123,57	81,00	58,75

Sumber : Bappeditbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

Jaringan Irigasi

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, jumlah jaringan irigasi di daerah irigasi dengan jumlah irigasi tahun 2019 sebanyak 6.477 (ha).

Presentase Rumah Tangga pengguna Air Minum Bersih dan Air minum yang layak.

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotarumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah.

Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 telah mencapai lebih dari 89 persen. Proporsi pemakaian air minum menurut sumbernya dalam penggunaan air bersih di Kabupaten Bandung Barat, bahwa penggunaan sumber air minum dari sumur terlindung masih mendominasi, diikuti oleh air ledeng/air kemasan, namun yang harus menjadi perhatian adalah masihtingginya penggunaan air tidak bersih.

o. Perumahan

Kualitas lingkungan perumahan akan menjadi perhatian utamadalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Capaian rumah tangga yang baik meliputi rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi, rumah layah huni.

Cakupan Rumah tangga yang pengguna air bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sebesar 308.783, sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebsar 10.518. Sedangkan data rumah yang bersanitasi pada tahun 2019 sebesar 78.33%.

Selain daripada itu, salah satu indikator kualitas hidup masyarakat dalam bidang perumahan yaitu rasio rumah layak huni. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. berikut gambaran rasio rumah layak huni di Kabupaten Bandung Barat tahun 2014- 2018.

Tabel 2.27
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2014- 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Rumah Layak Huni	39,30	40,84	42,74	43,44	25,386

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2018

p. Penataan Ruang

Proporsi capaian urusan penataan ruang terdiri dari capaian rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah HPL/ HGB terealisasi 16 % dan rasio bangunan IMB per satuan Bangunan terealisasi 46. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya instrument peraturan yang operasional, pemahaman masyarakat tentang tata ruang masih rendah, dan SDM aparatur belum mencukup.

q. Lingkungan Hidup

Upaya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan data terakhir keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari presentase penanganan sampah. Persampahan menjadi permasalahan utama di kota- kota di Indonesia khususnya di Bandung Barat. Salah satu permasalahan yang cukup rumit adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Presentase penanganan sampah ini tentunya berkaitan dengan tersedianya tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk di Kabupaten Bandung Barat sebesar 45,5. Berikut adalah gambaran presentase penanganan sampah di Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 2.28
Presentase Penanganan Sampah di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Presentase Penanganan Sampah	10,50	11	22,43	12	12

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

Selain itu, urusan lingkungan hidup yang menjadi indikator tercapainya keberhasilan bidang ini adalah presentase penduduk berakses air. Salah satu indikator syarat air minum menurut kementerian kesehatan yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Untuk menghitung presentase penduduk berkases air bersih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29
Presentase Penduduk Berakses Air Minum di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Presentase Penduduk Berkases Air Minum	36,5	37	50,53	61,75	62,75

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2017

r. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan disektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari tingkat kepemilikan kartu tanda penduduk (E-KTP), kepemilikan akta kelahiran. Kepemilikan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 995,82 ; tahun 2017 sebesar 1.0001,944 dan tahun 2018 sebesar 1.034,066 serta tahun 2019 sebesar 1.145.925. Sebanding

dengan kepemilikan akta kelahiran di kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan sebesar 111.859 dari tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan semakin tinggi.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik

Proporsi capaian penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik terdiri dari capaian kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP terealisasi 2 dari target 2, kegiatan pembinaan politik 4 (target 4) dan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan 6 kegiatan.

2.1.3.2. Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Penyelenggaraan pembangunan urusan pertaniann diarahkan untuk meningkatkan aktifitas penyediaan komodiatas hasil-hasil pertanian yang berkualitas serta pengembangan usha pertanian dengan pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang pasar yang terbuka serta usaha pengolahan produk pertanian.

Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. produktivitas tanaman padi tahun 2015- 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.30
Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2015- 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Padi sawah (kw/Ha)	66,25	65,55	66,3	64,42	63.08
Padi ladang/ gogo (Kw/Ha)	37,88	38,25	41	38,71	40.25

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

Selain itu, pertanian juga berkontribusi besar terhadap PDRB. Mengingat bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan sentra produksi pertanian, kehutanan

dan perikanan. Maka kontribusi ssektor pertanian/ perkebunan berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi 2,77 %.

b. Kehutanan

Sumber daya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan urusan kehutanan dapat dilihat dari indikator rehabilitasi lahan kritis, dan kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB,. Secara keseluruhan dapat terealisasi sesuai target seperti rehabilitasi hutan dan lahan kritis di luar kawasan pada tahun 2016 mencapai 12,62 % dari target 11,94%. Sektor kehutanan menjadi salah satu sector yang berkontribusi pada nilai PDRB Kabupaten Bandung Barat, seperti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Kontribusi sector Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2014- 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi sector Kehutanan terhadap PDRB	0.08	0.08	0.07	0.07	0,07

Sumber : Bappeditbangda Kabupaten Bandung Barat, 2018

c. Parawisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan

transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan.

Potensi daya tarik wisata maupun budaya yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat menjadi suatu aktivitas bernilai ekonomi tinggi. Kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata utama, yaitu Zona Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ada beberapa obyek wisata yang sudah dikelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya. Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan local maupun mancanegara ke Bandung Barat semakin mengalami peningkatan. Seperti tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32
Jumlah Kunjungan Wisata
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2019

Uraian	2018	2019
Mancanegara	35.948	144.372
Nusantara	6.588.203	6.386.654
Total	6.624.151	6.531.026

Sumber : Bappeditbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat semakin banyak yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya frekuensi promosi yang dilakukan, menjalin kemitraan kerjasama dengan pihak pers untuk kepentingan kepariwisataan, peningkatan kerja sama dengan stakeholder didalam maupaun di luar negerei dan ddukung dnegan berbagai event atau kegiatan . Kunjungan wisatawan ini dapat berkontribusi pada nilai PDRB Kabuapten Bandung Barat pada tahun 2018 yang terdiri dari kontribusi sector pariwisata (hotel) sebesar 0,25 %, kontirbusi pariwisata (restoran) sebesar 5,48 % dan kontribusi sector priwisata (jasa hiburan dan rekreasi) sebesar 0,07 %,

d. Perdagangan

Keberhasilan urusan perdagangan dapat dilihat dari capaian kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 22,97 %, menjadi 23,93 %. Ekspor Bersih perdagangan sebesar 501. 368. 401, 00 dan cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal sebanyak 1000.

e. Perindustrian

Peningkatan nilai tambah perindustrian semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari capaian kontribusi sektor industri mampu membentuk nilai tambah bruto pada tahun 2019 sebesar 12.770,36 milyar rupiah. Sektor industri di Kabupaten Bandung Barat masih mendominasi dengan andil sebesar 39,96 persen dibandingkan dengan sektor lainnya terhadap PDRB. Secara keseluruhan urusan perindustrian terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan.

2.1.3.2. Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Perencanaan

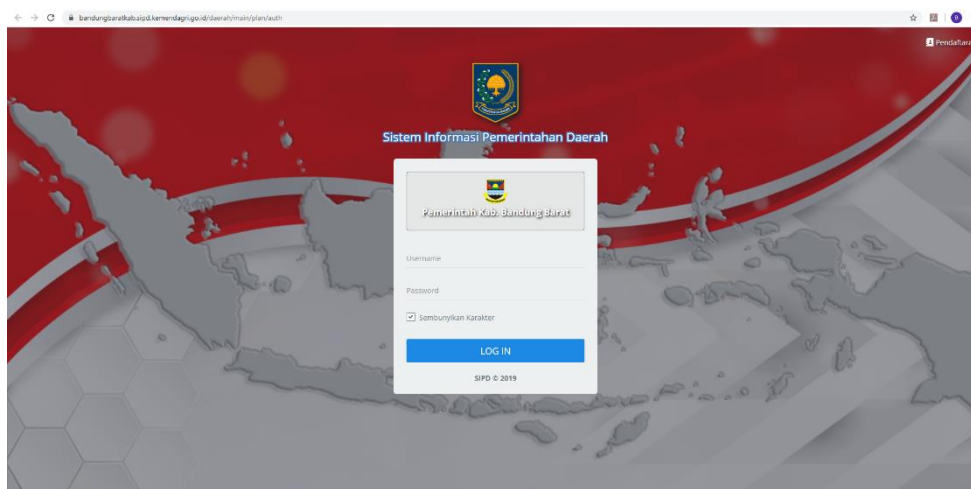
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengimplementasikan SIPD ini digunakan untuk penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan

kinerja dan keuangan dalam *single codebase*. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan yaitu pemetaan (mapping) pada level urusan, bidang urusan, PD hingga program, kegiatan dan sub kegiatan setiap PD karena terdapat perubahan mendasar dalam penggunaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah.

SIPD ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

SIPD merupakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam satu periode kurun waktu 5 tahun RPJMD.



Gambar 2.11
SIPD Kabupaten Bandung Barat

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat telah tersedia atau telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2007 – 2025.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kabupaten Bandung Barat telah tersedia dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan penjabaran dari agenda – agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye dalam Rencana Pemabangunan Jangka Menengah.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019.

Keuangan

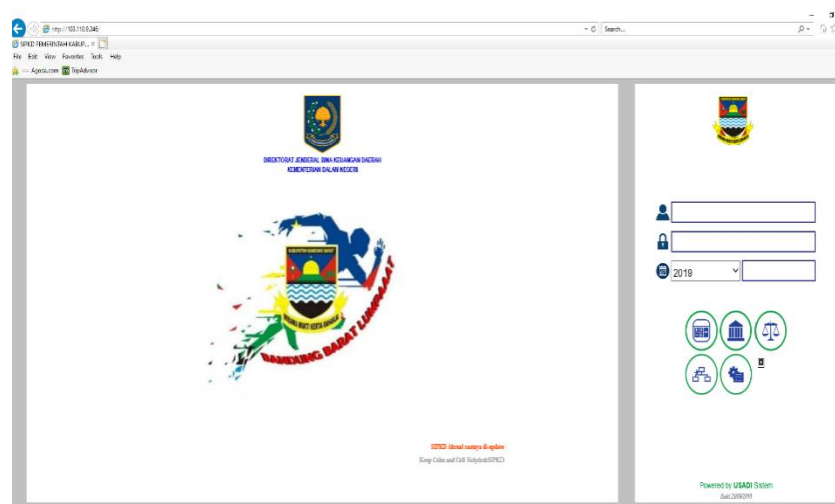
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan pertauran daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan

PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan Peraturan bupati mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kedalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS.

Setelah ditetapkan dalam KUA dan PPAS, perangkat daerah akan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang akan di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 2.12
SIPKD Kabupaten Bandung Barat
Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1116/AA.05/2018 Tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 adalah 66,00 atau kategori B (Baik). Capaian tersebut merupakan prestasi Kabupaten Bandung Barat terbaik yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB sejauh ini. Namun demikian hal tersebut memang belum sesuai dengan target yang diharapkan yaitu kategori BB atau disekitar minimal nilai 70,01.

b. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai gambaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat sendiri untuk LPPD dalam perjalanannya mengalami proses yang terus menerus membaik, hal ini terlihat dari hasil evaluasi nilai LPPD yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat yang terus menerus meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bandung Barat memperoleh kategori Sangat Tinggi dan sudah mencapai target. Apabila dibandingkan LPPD tahun 2018, Kabupaten Bandung

Barat dapat mempertahankan kategori Sangat Tinggi namun bila dilihat dari skor, terjadi peningkatan dari skor 3,2204 di tahun 2018 menjadi skor 3,2965 di tahun 2019 dan mendapatkan peringkat 22 tingkat Provinsi Jawa Barat.

2.1.4. Aspek Daya Saing.

2.1.4. 1. Iklim investasi

Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan atau tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas suatu daerah yang berimbas pada Iklim investasi.

Berdasarkan data terakhir dapat dilihat bahwa angka kriminalitas pada tahun 2018 menurun dari tahun 2017 yaitu sebesar 25 menjadi 0 di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Bandung Barat dapat menurun dengan cepat.

2.1.4. 2. Kemampuan Ekonomi Daerah.

Dalam struktur perekonomian yang mempunyai kontribusi terbesar Kabupaten Bandung Barat pada pembangunan Kabupaten Bandung Barat adalah sektor primer, sekunder dan tersier (BPS 2019). Selain itu kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita,

pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat diketahui dalam PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta). Berdasarkan data beberapa tahun rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta) Kabupaten Bandung Barat setiap tahunnya semakin meningkat, seperti dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.33
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta) Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2019

Uraian	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26 310 323	28 655 217.70	31 000 866.20

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2020

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga diluar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Berikut adalah gambaran pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Bandung Barat. Nilai pengeluaran konsumsi non pangan perkapita sebesar 356. 971.

2.1.4. 3. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sarana Infrastruktur berperan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya infrastruktur jalan dan jembatan merupakan prasarana angkutan yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antar kota dengan desa.

Panjang Jalan

Panjang jalan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Panjang di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.34
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (KM)
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Uraian	2019
Panjang Jalan Kabupaten Bandung Barat	724.305 KM

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2020

2.1.4. 4. Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian pembangunan nasional dan daerah. Maka dari itu pembangunan SDM diarahkan agar benar benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, trampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indikator kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk .

Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya yang harus di tanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk yang berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk usia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi setelah melewati masa pensiun. Penduduk dengan usia 15-64 tahun, adalah usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Rasio ketergantungan ini dapat digunakan sebagai indikator yang kasar dapat menunjukan keadaan ekonomi satu negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi presentase rasio ketergantungan maka menunjukan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran rasio ketergantungan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.35
Rasio ketergantungan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014- 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Ketergantungan (%)	48%	48%	54,14(%)	62,01%	38,36

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2018

Potensi Seni Budaya.

Seni budaya daerah adalah investasi masa depan bagi seluruh hajat hidup kemaslahatan umat manusia. Seni dan Budaya mempunyai peranan penting dalam

pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat dikenal sebagai salah satu kabupaten yang kaya akan seni dan budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga dan melestarikan seni dan budaya maka dilakukan pendataan sebagai potensi seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.36
Rekapitulasi Potensi Seni dan Budaya
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Uraian	2019
Jumlah Lingkung Seni	188
Jumlah Seniman	8381

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2020

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

2.2.1. CAPAIAN VISI DAN MISI RPJMD

Didalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan 6 misi yang merupakan penjabaran dari Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Didalam pelaksanaan Misi tersebut perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian target indikator program yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang selanjutnya dijadikan dasar untuk perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi capaian target RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 3.37
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD, CAPAIAN
VISI DAN MISI RPJMD

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana		
			K		K		K		I (Jan/Mar)		II (Apr/Jun)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	
	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	Terasanany kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana bermain	52	176.390,000	13	0	1.688.866,800	20.000,000											13	1.688.866,800	25		957		
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terasanany kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	10	415.030,000	0	0	69.722,000	43.768,000														69.722,000		17	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenyehnya keterediaan peralatan peraga edukasi	50	396.860,000	0	0	273.393,500	300.000,000						294.988,100					294.988,100			568,381,600		143	
	Pengadaan Mebeluar Sekolah	Peningkatan rasio jumlah siswa dengan kebutuhan meubelair	52	518.770,000	10	0	1.164.402,500	337.526,000						72.838,700					72.838,700		10	1.237.241,200	19	238	
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Terasanany kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah	98	858.550,000	16	0	636.858,500	1.149.427,000													16	636.858,500	16	74	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terealisasiy rehabilitasi sarana prasarana pendukung KBM	25	1.426.557,782	0	0	274.289,000	271.946,000														274.289,000		19	
	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Perluasan akses dalam peningkatan mutu pendidikan PAUD	156	1.348.760,000	0	0	257.750,000	737.000,000		75.000,000				175.000,000					250.000,000			507.750,000		38	
	Pengadaan Perangkat Belajar Kolektif Menyenangkan Berbasis IT Untuk Jenjang PAUD (Bangub)	Terasanany kegiatan Pengadaan Perangkat Belajar Kolektif Menyenangkan Berbasis IT Untuk Jenjang PAUD (Bangub)	13	1.500.000,000	0	0	1.497.606,141															1.497.606,141		100	
	PENGADAAN MEJA, KURSI DAN MEBELUAR UNTUK PAUD/TK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT	Terasanany kegiatan Pengadaan Meja, Kursi Dan Meubelair Untuk PAUD/TK Di Kabupaten Bandung Barat Barat	70	2.500.000,000	66	0	2.413.746,000														66	2.413.746,000	94	97	
	PENGADAAN ALAT PERMAINAN KREATIF DAN IMAGINATIF UNTUK PAUD DI KABUPATEN BANDUNG BARAT (BANGUB)	Terasanany kegiatan Pengadaan Alat Permainan Kreatif Dan Imajinatif Untuk PAUD Di Kabupaten Bandung Barat Barat (Bangub)	141	2.200.000,000	132	0	2.131.163,800														132	2.131.163,800	94	97	
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Berbasis Pendidikan Karakter PAUD (Bangub)	Terasanany kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Berbasis Pendidikan Karakter PAUD (Bangub)	194	2.500.000,000	181	0	2.421.532,000														181	2.421.532,000	93	97	
	PENGADAAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) BACA TULIS QURAN UNTUK PAUD (BANGUB)	Terasanany kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Baca Tulis Qur'an Untuk PAUD (Bangub)	264	2.500.000,000	229	0	2.222.610,000														229	2.222.610,000	87	89	
	Pengadaan Alat Peraga Luar Ruangan (APE) Untuk PAUD (Bangub)	Terasanany kegiatan Pengadaan Alat Peraga Luar Ruangan	143	2.500.000,000	0	0	2.137.495,000															2.137.495,000		85	
	Pengadaan Alat Bermain Dan Belajar Digital Untuk Jenjang PAUD Dan TK (Bangub)	Terasanany kegiatan Pengadaan Alat Bermain Dan Belajar Digital Untuk Jenjang PAUD Dan TK	22	2.500.000,000	0	0	2.493.644,378															2.493.644,378		100	
	Pengadaan Papan Belajar Interaktif Untuk Pendidikan Jenjang PAUD Dan TK (Bangub)	Terasanany kegiatan Pengadaan Papan Belajar Interaktif Untuk Pendidikan Jenjang PAUD Dan TK	9	2.500.000,000	0	0	2.498.650,000															2.498.650,000		100	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)				28		130		DINAS PENDIDIKAN
																	Predikat kinerja				ST		80,84		DINAS PENDIDIKAN
7	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	95	%	249,914,740,000	0	%	196,087,873,953	124,702,399,700	-	538,513,000	1	5,408,942,200	-	0	0	5,947,455,200	202,035,329,153			0				DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM)	94	%																					DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan (AM) dari	93	%																					DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	94	%																					DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM)	97	%																					DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan (AM) dari	81	%																					DINAS PENDIDIKAN
	Penambahan ruang kelas	Tercapainya pembangunan ruang	36		10.255.650,000	0	0	843.384.700	325.000,000	-				0,00								843.384.700		8	
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas	Terasanany kegiatan Pembangunan taman, lapangan	119		10.519.480,000	2	0	1.356.171,000	3.428.668,000	-				183.668,000					183.668,000		2	1.539.839,000	2	19	
	Pembangunan Ruang Unit	Terasanany kegiatan	0		0	0	0	100.000,000		-														100	
	Pembangu sarana air bersih dan sanitary SD	Pembangu sarana air bersih dan sanitary	30		2.178.760,000	0	0	214.988,000	727.487,000	-				61.487.000,00					61.487,000			276.475,000		13	
	Pengadaan mebeluar sekolah	Terasanany kegiatan	57		1.060.850,000	0	0	697.802.800	600.000,000	-				0,00								697.802.800		66	
	Pengadaan perlengkapan	Terpenyehnya perlengkapan	60		3.712.000,000	0	0	100.450,000	175.000,000	-				0,00								100.450,000		3	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD	Terasanany kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang	52		2.534.090,000	0	0	1.688.165,840	2.396.561,000	-	18.561,000			18.561.000,00					37.122,000			1.725.307,840		68	
	Pelatihan Peningkatan	Terasanany kegiatan	0		0	0	0	163.000,000		-															DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan SMP Terbuka	Peningkatan daya tampung	5		105.060,000	0	0	70.101,000		-															DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu	5		12.968.690,000	0	0	112.650,000	1.553.250,000	-	303.000,000			707000000					1.010.000,000			1.122.650,000		9	
	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SLB	Terasanany kegiatan	5		36.001.050,000	0	0	48.399,000	150.000,000	-												48.399,000		0	
	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD	Penyediaan dana pengembangan sekolah	5		2.189.130,000	0	0	536.100,000	907.042,500	-	145.702,000			344507000					490.209,000			1.026.309,000		47	
	Penyediaan sarana dan prasarana	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	0		0	0	0	800.000,000		-				0,00											DINAS PENDIDIKAN
	Penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana	0		0	0	0	59.474,000		-				0,00											DINAS PENDIDIKAN
	Monitoring, evaluasi dan	Terasanany kegiatan Monitoring	5		1.820.820,000	0	0	1.015.745,500	886.656,000	-	13.500,000			150.375.000,00								1.179.620,500		65	
	Pengadaan Tanah SD	Terasanany kegiatan	5		11.671.820,000	0	0	44.457.500		-												44.457.500		0	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	Terasanany kegiatan Penambahan Ruang Kelas	36		8.638.710,000	0	0	788.253,000	1.283.062,000	-				0,00								788.253,000		9	
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terasanany kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan	129		8.638.710,000	0	0	2.770.153,000	2.789.108,000	-				309.108.000,00					309.108,000			3.079.261,000		36	
	Pembangunan Ruang Unit	Terasanany kegiatan	0		0	0	0	100.000,000		-															DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang ibadah	Terasanany kegiatan	0		0	0	0	100.000,000		-															DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Sarana Air	Terasanany kegiatan	0		0	0	0	745.000,000		-				0,00											DINAS PENDIDIKAN
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Terasanany kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5		2.522.420,000	0	0	99.328,000	200.000,000	-				0,00								99.328,000		4	
	Pengadaan Meubelair	Terasanany kegiatan	5		466.890,000	0	0	1.488.793,000	700.000,000	-				0,00								1.488.793,000		319	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	Terasanany kegiatan	0		0	0	0	853.439.300	775.000,000	-				0,00								853.439.300		100	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Pengadaan Perencanaan Sekolah	25		840.380,000	0	0	199.354,000	220.000,000	-				0,00								199.354,000		24	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu	5		14.744.960,000	0	0	90.975,000	70.101,000	-	9.750,000			22.750.000,00					32.500,000			123.475,000		1	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas	5		726.270,000	0	0	265.155,000	350.000,000	-				0,00								265.155,000		37	
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terasanany kegiatan	5		2.303.260,000	0	0	2.287.540,875	1.883.404,000	-				342890000					342.890,000			2.630.430,875		114	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana			
1	4	5	6		7		8		I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III	IV	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100%	16								
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.						
		Pubikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	0	Rp. 0	K	Rp.	0	K	Rp.	216.120.000	K	Rp.	-	K	Rp.	0,00	K	Rp.	-	K	Rp.	0	DINAS PENDIDIKAN			
		Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat	5	2.334.362.000	0	0	0	0	0	254.323.000					-	-	-	-	-	-	-	0	DINAS PENDIDIKAN			
		Pendidikan Kesetaraan	52	1.750.790.000	0	0	0	0	0	1.442.800.000					-	-	-	-	-	-	1.134.800.000	65	DINAS PENDIDIKAN			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					1	23	DINAS PENDIDIKAN			
Predikat kinerja																					SR	SR	DINAS PENDIDIKAN			
9	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang telah tersertifikasi	44.04	%	38.491.070.000	1.648	%	9.412.966.000	1.648	%	16.678.469.500	-	195.950.000		426.388.500	-	0	0		622.338.500		10.035.304.500	0	26	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Guru SD/MI Iyayak	96.20	%			%			%														DINAS PENDIDIKAN		
		Persentase Guru SMP/MTs	83.69	%			%			%														DINAS PENDIDIKAN		
		Ketersediaan dan kompetensi pendidik sesuai ketentuan	91.90	%			%			%														DINAS PENDIDIKAN		
		Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	65.774		1.141.270.000	1.600	0	215.260.000		259.250.000		87.450.000		87.450.000.00						174.900.000	1.600	390.160.000	2	34	DINAS PENDIDIKAN	
		pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	516	11.412.450.000		2	0	1.132.541.000	-	2.055.227.000	-			0.00						-	2	1.132.541.000	0	10	DINAS PENDIDIKAN	
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	28.637	25.937.350.000		0	0	7.837.165.000	-	5.033.000.000	-			0.00						-		7.837.165.000	-	30	DINAS PENDIDIKAN	
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu Di Daerah Terpencil Kabupaten Bandung Barat (Bangub)	38	0		0	0	56.000.000	-	56.000.000	-		56.000.000		56.000.000.00					-	112.000.000		112.000.000	-	100	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Di Daerah pelatihan bagi pendidik untuk				0	0	228.000.000	-	0										-	-	228.000.000	-	100	DINAS PENDIDIKAN	
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan				0	0	2.343.727.000	-	2.227.500.000	-		13.500.000		31.500.000.00					-	45.000.000	-	45.000.000	-	100	DINAS PENDIDIKAN
		Pelaksanaan Sertifikasi				0	0	464.038.500	-		-				160.438.500.00					-	160.438.500	-	160.438.500	-	100	DINAS PENDIDIKAN
		pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar				0	0	897.000.000	-		-		39.000.000		91.000.000.00					-	130.000.000	-	130.000.000	-	100	DINAS PENDIDIKAN
		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan				0	0	3.342.727.000	-		-				0.00					-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	67	DINAS PENDIDIKAN			
Predikat kinerja																					SR	SR	DINAS PENDIDIKAN			
10	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.56	Poin	3.645.640.000	0	Poin	2.164.860.000	6	Poin	1.620.510.000	-	0	0	182.715.000	-	0	0	0	182.715.000	0	2.337.675.000	6	64	DINAS PENDIDIKAN	
		Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas	5		440.950.000	0	0	283.500.000	-	50.000.000	-		0		0		0			-	1	283.500.000	16	64	DINAS PENDIDIKAN	
		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	25	3.204.690.000		0	0	1.871.360.000	-	1.470.510.000	-				182.715.000.00					-	182.715.000	-	2.054.075.000	-	64	DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																					6	64	DINAS PENDIDIKAN			
Predikat kinerja																					SR	SR	DINAS PENDIDIKAN			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM										155.462.546.700																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM																				11	166	DINAS				
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM																				SR	SR	DINAS				
Faktor Pendorong Keberhasilan																										
Faktor Penghambat Keberhasilan																										
Tindak Lanjut yang diperlukan																										
Tindak Lanjut yang diperlukan																										

KESEHATAN			6.608.470	1.013.006.621.130			216.089.763.437			346.150.942.206	6.474.693.798		41.921.869.728	-	0	#####	50.031.450.022	1.491.660	266.121.213.459	22.57	22.82	DINAS				
DINAS KESEHATAN			6.608.470	1.013.006.621.130			216.089.763.437			346.150.942.206	6.474.693.798		41.921.869.728	-	0	#####	50.031.450.022	1.491.660	266.121.213.459	22.57	22.82	DINAS				
1	PROGRAM PELAYANAN	Persentase kebutuhan	100	%	15.596.336.539	100	%	4.068.689.734	100	%	3.514.387.718	14	468.817.232	24	830.789.516	-	0	#	37	1.317.316.748	40	5.323.176.482	43	28	DINAS	
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100		425.082.000	12		39.874.173	12		75.000.000	11	8.584.832	17	12.656.266		28		21.241.098	40	61.115.271	40	14	DINAS		
		Penyediaan jasa pelayanan dan pemeliharaan kantor	100		2.663.183.110	12		3.251.125.000	12		852.245.918.00	18	153.000.000	28	240.000.000		46		393.000.000	58	3.644.125.000	58	137	DINAS		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100		817.429.200	30		38.950.000	132		62.877.000.00	6	3.509.000	5	3.000.000		10		6.509.000	40	45.459.000	40	6	DINAS		
		Penyediaan alat tulis kantor	100		1.067.826.600	56		171.808.000	56		107.965.800.00	1	900.000	10	900.000		2		1.800.000	58	173.608.000	58	16	DINAS		
		Penyediaan barang cetakan dan pencetakan	100		1.772.585.400	20		214.485.750	21		285.329.000.00	1	3.000.000	10	27.593.250		11		30.593.250	31	245.079.000	31	14	DINAS		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100		130.477.500	6		21.750.000	6		22.114.000.00	0	-	-	-		-	6	21.750.000	6		17	DINAS			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100		1.397.352.100	17		33.945.000	19		1.862.000.000.00	15	283.600.000	29	545.600.000		45		829.200.000	62	863.145.000	62	62	DINAS		
		Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung	100		1.024.226.100	3		42.400.000	5		33.006.000.00	18	6.000.000	-	-		18		6.000.000	21	48.400.000	21	5	DINAS		
		Penyediaan makanan dan minuman	100	%	434.456.000	100	%	33.402.400	100	%	85.500.000.00	19	15.903.400	1	1.050.000		20		16.953.400	120	50.355.800	120	12	DINAS		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100		2.630.236.620	20		127.994.411	63		93.350.000.00	13	12.020.000	-	-		13		12.020.000	33	140.014.411	33	5	DINAS		
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	100		884.044.900	40		30.125.000			35.000.000.00	0	-	-	-		-	40	30.125.000	40		3	DINAS			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		46		26	DINAS
																					Predikat kinerja		SR		SR	DINAS
2	PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN Gedung Kantor	Persentase kebutuhan	100	%	5.238.561.486	100	%	269.892.566	100	%	726.868.000	1	6.779.530	11	85.038.000	-	0	0	12	91.817.530		342.620.098	19	5	DINAS	
		Tersedianya perlengkapan 2 dokumen rencana pembangunan	100		0	0	2	200.000.000.00	0		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS	
		Pengadaan Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	100		1.805.800.000	35		115.460.000		306.865.000.00	0	-	17	53.000.000		17		53.000.000	52	168.460.000	52	9	DINAS			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100		369.500.000	1		20.000.000	1		25.000.000.00	0	-	100	25.000.000		100		25.000.000	101	45.000.000	101	12	DINAS		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100		3.063.261.480	21		115.342.568		225.000.000.00	3	6.779.530	3	7.038.000		6		13.817.530	27	129.160.098	27	4	DINAS			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		60		5	DINAS
																					Predikat kinerja		SR		SR	DINAS
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kedisiplinan aparatur sesuai dengan	100		1.765.590.000	100		0	100		99.960.000	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	DINAS			
																					Predikat kinerja		SR		SR	DINAS

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)		Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana						
1	4	5		6		7		8		I (Jan/Mar)	II (Apr/Jun)	III	IV	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100%	16									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	9	Rp.	K	10	Rp.	K	11	Rp.	K	12	Rp.					
	Pelenggaraan Pelayanan	Pelaksanaan kesehatan rujukan di							5.785.167.700,00																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																26	157									
Predikat kinerja																SR	SI									
22	PROGRAM BANTUAN		0		0	434		21.671.921.019	512		24.116.606.000	0		0	246		897.509.000	0		483	897.500.000	483	22.569.421.019	0	DINAS	
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cilin (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		611.039.000	12		654.733.000,00	0		0			0			-	12		611.039.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Chamolias (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		571.761.500	12		673.707.000,00	0		0			0			-	12		571.761.500	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Makasuruta (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		555.455.000	12		613.288.000,00	0		0			25.000.000			-	12		580.455.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patanuman (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		621.230.000	12		634.352.000,00	0		0			38.750.000			-	12		659.980.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sindanokarta (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		587.762.000	12		667.264.000,00	0		0			22.500.000			-	12		610.262.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Oepokara otirang (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		598.918.500	12		679.640.000,00	0		0			37.500.000			-	12		636.418.500	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gumunohatu (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		670.990.000	12		783.170.000,00	0		0			37.500.000			-	12		708.490.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ronoga (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		463.217.700	12		725.307.000,00	0		0			25.000.000			-	12		488.217.700	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cioat (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		530.413.000	12		634.603.000,00	0		0			12.500.000			-	12		542.913.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batamandala (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		346.300.600	12		590.558.000,00	0		0			25.000.000			-	12		371.300.600	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rasmendala (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		574.944.000	12		625.194.000,00	0		0			10.000.000			-	12		584.944.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sumur handu (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		615.747.000	12		669.843.000,00	0		0			50.000.000			-	12		665.747.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pacalaraga (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		600.989.000	12		686.462.000,00	0		0			0			-	12		600.989.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tagog ewi (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		625.801.000	12		653.233.000,00	0		0			15.000.000			-	12		640.801.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jayawakar (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		692.785.000	12		769.525.000,00	0		0			50.000.000			-	12		742.785.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cioendurey (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		611.045.000	12		652.662.000,00	0		0			50.000.000			-	12		661.045.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cirata (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		570.580.000	12		655.159.000,00	0		0			37.500.000			-	12		608.080.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Okotowet (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		535.919.000	12		652.136.000,00	0		0			50.000.000			-	12		585.919.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rendu (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		608.915.000	12		624.028.000,00	0		0			25.000.000			-	12		633.915.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cegura (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		615.464.000	12		664.274.000,00	0		0			37.500.000			-	12		652.964.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pasir jenu (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		481.058.000	12		681.612.000,00	0		0			12.500.000			-	12		493.558.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lembaru (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		628.420.000	12		670.692.000,00	0		0			0			-	12		628.420.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cikole (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		626.903.000	12		675.316.000,00	0		0			25.000.000			-	12		651.903.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Iseniti (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		494.498.000	12		587.383.000,00	0		0			12.500.000			-	12		506.998.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Chodas (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		669.376.000	12		701.702.000,00	0		0			50.000.000			-	12		719.376.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ratu (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		665.175.000	12		672.272.000,00	0		0			50.000.000			-	12		715.175.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sasitua (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		613.607.750	12		659.361.000,00	0		0			37.500.000			-	12		651.107.750	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngamurah (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		363.696.000	12		687.871.000,00	0		0			0			-	12		363.696.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ciyemre (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		568.408.000	12		684.383.000,00	0		0			37.500.000			-	12		605.908.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cinyuh (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		503.615.000	12		647.474.000,00	0		0			50.000.000			-	12		553.615.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ciyem (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		650.282.969	12		674.392.000,00	0		0			12.500.000			-	12		662.782.969	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panonono (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		570.998.000	12		624.707.000,00	0		0			50.000.000			-	12		620.998.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ciyemsa (DAK)	Terselenggaranya kegiatan pendukung penyelenggara upaya kesehatan masyarakat pendurduk	0		0	12		636.750.000	12		98.514.000,00	0		0			0			-	12		636.750.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat Dinas	Pendukung 32 Puskesmas	0		0	12		158.100.000	12		107.405.000,00	0		0			0			-	12		158.100.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat	Operasional dalam rangka	0		0	12		185.000.000	12		151.700.000,00	0		0			0			-	12		185.000.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Uptan Kesehatan	Pendukung Penyelenggaraan	0		0	12		242.990.000	12		372.000.000,00	0		0			11.250.000			-	12		254.240.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Uptan Kesehatan Masyarakat (UKM) P2 (DAK)	Pengabdian & Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	0		0	12		130.572.000	12		313.016.000,00	0		0			0			-	12		130.572.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Uptan Kesehatan Masyarakat (UKM) Kesmas	Pendukung Penyelenggaraan	0		0	12		214.700.000	12		570.400.000,00	0		0			0			-	12		214.700.000	100	100	DINAS KESEHATAN
	Bantuan Operasional Kesehatan Uptan Kesehatan Masyarakat (UKM) Kesmas	Pendukung Penyelenggaraan	0		0	9		292.100.000			93.268.000,00	0		0			0			-	9		292.100.000	100	100	DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksanaan
1	4	5	6		7		8		I (Jan/Mar)		II (Apr/Jun)		III	IV	13	14=7+13	15=14x100%	16					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.	
	Dukungan Manajemen Jampersal (DAK)	Terselenggaranya Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan BOK	0	0	9	654.525.000					0	0	0	0	-	-	9	654.525.000	100	100	DINAS KESEHATAN		
	Bantuan Operasional Kesehatan Stuntan Dinkes Bantuan Operasional	Terselenggaranya Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Bantuan Operasional	0	0	9	711.870.000		750.000.000		0	0	0	0	-	-	-	9	711.870.000	100	100	DINAS KESEHATAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	100	DINAS KESEHATAN				
Predikat kinerja																	54	54	DINAS KESEHATAN				
23	PROGRAM PEMBINAAN		0	0	7	2.528.582.000	62,057	5.351.873.285	0	0	0	1.747.745.496	0	0	19	3.382.691.992	19	5.911.273.992	0	0	DINAS KESEHATAN		
	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu 5 Puskesmas - 7	0	0	7	1.304.522.000		112.799.000.00		-	-	112.799.000.00	-	-	-	-	7	1.417.321.000	100	100	DINAS KESEHATAN		
	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Yago di Dabarkali Oleh	Terbayarnya Jumlah Masyarakat Miskin yang Terlayani oleh asuransi kesehatan 62.050 jiwa	0	0	12	1.224.060.000		-		-	-	-	-	-	-	-	12	2.859.006.496	100	100	DINAS KESEHATAN		
	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Kesehatan Intitik					-	5.239.074.285.00		-	-	-	1.634.946.496.00			-	-	-	1.634.946.496	-	-	DINAS KESEHATAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	67	67	DINAS KESEHATAN				
Predikat kinerja																	5	5	DINAS KESEHATAN				
24	PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	Persentase Penduduk dengan jaminan kesehatan yang	100	%	39.566.845.500	312	40.011.753.719	312	37.490.909.400.00	0	0	156	0	0	0	312	40.011.753.719	0	0	101	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Champless	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	308.080		2.337.903.750	12		3.045.433.876		-	-	-	-	-	-	-	12	3.045.433.876	0	130	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Mukapayang	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	126.750		1.358.652.750	12		1.758.092.203		-	-	-	-	-	-	-	12	1.758.092.203	0	129	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Pataraman	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	162.505		754.162.500	12		1.799.922.300		-	-	-	-	-	-	-	12	1.799.922.300	0	239	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Sindangerta	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	4.775		1.625.510.250	12		1.255.153.593		-	-	-	-	-	-	-	12	1.255.153.593	0	77	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Ciangkang girang	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	98.485		2.259.006.750	12		1.369.062.444		-	-	-	-	-	-	-	12	1.369.062.444	0	61	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Rongga	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	165.970		1.538.491.500	12		2.053.266.202		-	-	-	-	-	-	-	12	2.053.266.202	0	133	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Ciputat	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	125.625		1.191.576.750	12		1.873.674.489		-	-	-	-	-	-	-	12	1.873.674.489	0	157	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Sumur bandung	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	71.140		980.411.250	12		760.632.101		-	-	-	-	-	-	-	12	760.632.101	0	78	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Padalarang	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	182.865		1.704.407.250	12		1.947.422.382		-	-	-	-	-	-	-	12	1.947.422.382	0	114	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Tagog apu	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	73.930		1.945.739.250	12		753.388.052		-	-	-	-	-	-	-	12	753.388.052	0	39	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Jayamekar	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	68.850		965.328.000	12		1.044.412.907		-	-	-	-	-	-	-	12	1.044.412.907	0	108	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Cipeundeuy	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	236.350		2.047.841.250	12		1.954.075.458		-	-	-	-	-	-	-	12	1.954.075.458	0	95	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Cirata	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	315.465		965.328.000	12		823.192.563		-	-	-	-	-	-	-	12	823.192.563	0	85	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Rende	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	99.920		1.176.493.500	12		802.994.053		-	-	-	-	-	-	-	12	802.994.053	0	68	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Cisarua	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	96.500		2.624.485.500	12		1.317.830.542		-	-	-	-	-	-	-	12	1.317.830.542	0	50	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Paair langu	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	70.360		1.655.676.750	12		680.479.517		-	-	-	-	-	-	-	12	680.479.517	0	41	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Lembang	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	142.790		1.598.824.500	12		2.311.804.181		-	-	-	-	-	-	-	12	2.311.804.181	0	145	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Cikole	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	66.600		1.417.825.500	12		858.138.861		-	-	-	-	-	-	-	12	858.138.861	0	61	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Cibodas	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	64.500		1.655.676.750	12		856.646.864		-	-	-	-	-	-	-	12	856.646.864	0	52	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Batujajar	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	261.525		1.459.594.500	12		2.879.648.334		-	-	-	-	-	-	-	12	2.879.648.334	0	197	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Ngamprah	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	159.840		1.806.599.250	12		1.610.295.384		-	-	-	-	-	-	-	12	1.610.295.384	0	89	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Cimareme	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	149.210		1.930.656.000	12		1.951.869.674		-	-	-	-	-	-	-	12	1.951.869.674	0	101	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Cipongkor	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	143.900		1.218.262.500	12		2.495.515.521		-	-	-	-	-	-	-	12	2.495.515.521	0	205	DINAS KESEHATAN		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JKN FKTP Citalam	Tertayannya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik peserta bukan iuran (PBI) maupun	201.235		1.387.659.000	12		2.020.146.580		-	-	-	-	-	-	-	12	2.020.146.580	0	146	DINAS KESEHATAN		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)		Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Kemampuan capaian kinerja unit Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	4	5	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.	I (Jan/Mar)		II (Apr/Jun)		III		IV		K	S	Rp.	K	S	Rp.	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100%	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKN FKTP Parangpong)	Terdapatnya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (UKN) baik peserta bukan jiwa (PB) maupun	65,350		1,402,742,250	12		985,190,609			877,974,900,00	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	12		985,190,609	K		0	70	DINAS KESEHATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKN FKTP Ciaruga)	Terdapatnya masyarakat peserta BPJS program Jaminan Kesehatan Nasional (UKN) baik peserta bukan jiwa (PB) maupun	74,965		558,080,250	12		803,465,029			814,214,200,00	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	12		803,465,029	K		0	144	DINAS KESEHATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Rata-rata capaian kinerja (%)								0		108		DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Predikat kinerja								SR		ST		DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
25	Program Evaluasi Survey Kesehatan	Persentase Fawakem yang	100	%	197,065,000	312		0	312		0	0	0	156	0	0	0	0	312	0	312	0	312	0	0	101	DINAS KESEHATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Rata-rata capaian kinerja (%)								0		101		DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Predikat kinerja								SR		ST		DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM												346.150.942.206		6.474.693.798		41.921.899.726		0		50.931.450.022		266.121.213.459				DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM										1,642		40		DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM										ST		SR		DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Faktor Pendorong Keberhasilan Faktor Penghambat Keberhasilan Tidak Lanjut yang dicebiri Tidak Lanjut yang dicebiri																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PEKERJAAN UMUM DAN DINAS PEKERJAAN UMUM																												1,310		2,539,702,927,414	1,313		194,838,864,139	977		805,807,058,811	66		104,985,842,382	161		29,760,756,782	0	0	0	1,129		157,474,732,932	1,129		326,819,479,666	86		10	DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1. PROGRAM PELAYANAN																												100,00	%	17,819,843,440	100		194,838,864,139	977		805,807,058,811	66		104,985,842,382	161		29,760,756,782	-	0	0	1,129		157,474,732,932	1,129		326,819,479,666	86,17		10,02	DINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Pelayanan jasa surat																												60		2,539,702,927,414	60		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12		230,501,200	12</

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I (Jan/Mar)		II (Apr/Jun)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
1	4	5	15 = 14/5*100%		16		17		18		19		20		21		22		23		24		16						
			Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)								
			Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja								
8	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG dalam	Presentase saluran drainase/gorong-gorong dalam	60	%	107,515,260,119	57	8,150,754,216	20	15,554,512,086	0	8,284,687,547	8	95,000,000	-	0	#	0	78	6,379,687,547	78	16,530,441,783	130	15	DINAS					
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tertaskannya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	193		72,200,488,927	16	3,091,992,216		9,504,694,786		6,957,404,047,000		33,000,000		-			6,990,404,047	16	10,082,396,263	8	14	DINAS						
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase pemukiman yang baik	262		35,314,717,192	62	5,058,762,000		6,049,817,300		1,327,283,500,000		62,000,000		-			1,389,283,500	62	6,448,045,500	24	18	DINAS						
			Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		DINAS						
			Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		DINAS						
9	PROGRAM Pembangunan	Presentase suratpaling/bronjong Tersedianya suratpaling/bronjong	80	%	106,941,931,000	49	7,220,740,169	40	12,886,830,150	0	5,508,951,700	0	48,000,000	-	0	#	0	31	5,556,951,700	31	12,776,791,800	39	12	DINAS					
			305		106,941,931,000	31	7,220,740,169		12,886,830,150		5,508,951,700,000		48,000,000		-			5,556,951,700	31	12,776,791,800	10	12	DINAS						
			Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		DINAS						
			Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		DINAS						
10	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHAR Jembatan yang direhabilitasi	Persentase peningkatan dan pembenahan jalan dan Jembatan yang direhabilitasi	100	%	314,304,076,925	124	19,286,352,655	78.4	26,257,340,950	0	11,109,879,400	0	1,065,000,000	-	0	#	0	95	12,174,879,400	95	31,461,232,055	95	10	DINAS					
	Perencanaan	Tersedianya Dokumen	50	Unk	3,225,746,114	1			523,311,000		3,293,000,000				-			3,293,000,000	1	48,003,000	3	1	DINAS						
	Perencanaan	Tersedianya Dokumen	30						425,636,000		3,078,900,000				-			3,078,900,000					DINAS						
	Rehabilitasi/pemeliharaan	Tertaskannya	807		267,820,539,697	91	18,483,508,655		22,734,159,950		9,267,425,500,000		1,041,000,000,000		-			10,308,425,500	91	28,791,934,155	11	11	DINAS						
	Rehabilitasi/pemeliharaan	Tersedianya Rehabilitasi Jemmelharan jembatan I & 9	150		40,164,285,114	3	758,134,000		2,574,234,000		1,836,082,000,000		24,000,000,000		-			1,860,082,000	3	2,616,216,000	2	7	DINAS						
			Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		DINAS						
			Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		DINAS						
11	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN Inspeksi kondisi jalan	Jumlah Dokumen Kondisi Jalan dan Jembatan	15	Doku men	6,335,429,000	3	619,695,000	2	727,933,000	0	20,272,300	0	24,000,000	-	0	#	0	2	44,272,300	2	563,967,300	13	11	DINAS					
	Inspeksi kondisi jalan	Tertaskannya Inspeksi kondisi	2		2,939,007,500	1			461,266,000		10,707,300,000		12,000,000,000		-			22,707,300	1	307,497,300	50	10	DINAS						
	Inspeksi kondisi jembatan	Temonitoring data kondisi	5		2,398,421,500	1			256,687,000		9,565,000,000		12,000,000,000		-			21,565,000	1	256,470,000	20	11	DINAS						
			Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		DINAS						
			Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		DINAS						
12	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM	Tersedianya Dokumen Informasi data dasar Jalan dan Persentase Tersedianya Dokumen Informasi Data Dasar	1	Doku men	4,662,441,498	1	480,433,100	1	653,304,000	0	19,500,000	0	26,000,000	-	0	#	0	1	45,500,000	1	525,933,100	100	11	DINAS					
	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersedianya Dokumen Informasi data dasar Jalan dan Jembatan (1	5		4,662,441,498	1	480,433,100	1	653,304,000		19,500,000,000		26,000,000,000		-			45,500,000	1	525,933,100	20	11	DINAS						
			Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		DINAS						
			Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		DINAS						
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Presentase Peningkatan sarana dan Prasarana Kebencanaan	90	%	49,950,720,000	4	2,849,972,520	65	6,412,150,000	0	84,366,650	2	120,528,500	-	0	#	0	28	204,895,150	28	3,054,687,670	31	6	DINAS					
	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya Alat Berat (5 Unit	17		43,937,801,000	2			1,777,239,900		1,546,600,000				-			1,546,600,000	2	1,778,786,500	12	4	DINAS						
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat berat	Tertaskannya Rehabilitasi/pemeliharaan alat berat	155		5,508,919,000	28			986,650,000		82,820,050,000		120,528,500,000		-			203,348,150	28	1,276,081,170	17	23	DINAS						
			Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		DINAS						
			Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		Predikat kinerja		DINAS						
14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN	Presentase Jaringan Irigasi rawa dan Irigasi	84.04	%	133,071,679,444	68	23,471,367,903	68.81	28,129,005,429	0	858,161,194	5	1,295,478,000	-	0	#	0	140	23,471,367,903	140	23,471,367,903	167	18	DINAS					
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tertaskannya Penyusunan Perencanaan pembangunan	69		23,430,885,937	29			2,842,668,650		2,229,045,500		50,000,000,000		-			91,200,300	29	2,933,868,950	42	13	DINAS						
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersedianya Dokumen	14		2,981,477,040				396,850,000		29,809,150,000		37,000,000,000		-			68,809,150	8	438,054,150	43	15	DINAS						
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Meningkatnya kemapatan infrastruktur sarana dan prasarana	277		58,260,398,024	53			9,443,155,944		242,580,544,000		94,000,000,000		-			336,580,544	53	8,069,090,325	19	14	DINAS						
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Meningkatnya kemapatan infrastruktur sarana dan prasarana	62		20,907,311,380				5,272,102,985		58,009,450,000		74,000,000,000		-			132,009,450	19	2,869,176,585	31	14	DINAS						
	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Tertaskannya Perbaikan Dam, Bendung, Air Pada Jaringan air	25		24,990,485,303	11			3,205,510,977		4,671,046,750,000		1,016,478,000,000		-			1,483,524,750	11	4,689,035,727	44	19	DINAS						
	Pembayaran petani	Tertaskannya Pembayaran petani pemakai air (1	16		2,501,121,760	6			326,400,000		19,515,000,000		24,000,000,000		-			43,515,000	16	369,915,000	100	15	DINAS						
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Tertaskannya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (6	6			0			5,267,586,362		0,000				-				6	5,267,586,362	100		DINAS						
	Perencanaan Pemetaan Jaringan Irigasi Kabupaten	Tersedianya Dokumen Pemetaan Jaringan Irigasi Kabupaten	1		0	1			991,280,000						-			1	991,280,000	100			DINAS						
			Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		Rata-rata capaian kinerja (%)		DINAS						

NO	Ururan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I (Jan/Mar)		II (Apr/Jun)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500		KANTOR KESATUAN						
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500		1,942		729,358,500								
1	4	5	332,128		23,459,566,840		59,865		1,600,030,000		1,303		284,850,000		639		444,508,500												

1	BADAN	PROGRAM PELAYANAN	Persentase Kebutuhan	100	%	94,466,738,730	351		9,571,905,182	579		11,286,216,567	98		481,252,080	100		1,765,714,646	-	0	#	0	399	2,246,966,726	399		11,818,871,908	3,72	13,70	BADAN
			Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Tersedia	100	%	6,734,083,730	100		1,195,546,171	579		716,918,548	31		116,504,080	18		64,916,080	-	0	#	0	85	181,420,160	85		1,376,968,331	10	18	BADAN
			Pelayanan jasa komunikasi	12	bulan	120,000,000	12	bulan	22,359,460	12	bulan	24,000,000	3		6,173,580	3		6,176,080	-	0	#	0	39	12,349,680	39		34,709,120	10	150	Badan
			Pelayanan Jasa Administrasi	12	bulan	3,223,870,000	12	bulan	638,524,000	12	bulan	116,348,000	3		25,500,000	3		34,000,000	-	0	#	0	18	696,024,000	18		59,500,000	22	190	Badan
			Persediaan alat tulis kantor	26	Jenis	167,048,000	20	Jenis	27,483,850	20	Jenis	27,518,000	6		5,000,000	6		5,000,000	-	0	#	0	12	10,000,000	32		37,483,850	123	22	Badan
			Persediaan barang cetakan	7	Jenis	101,715,730	7	Jenis	16,444,650	7	Jenis	24,400,000	2		2,500,000	1		1,500,000	-	0	#	0	3	4,000,000	10		20,444,650	143	20	Badan
			Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20	Jenis	235,830,000	4	Jenis	52,954,548	4	Jenis	52,954,548	1		-	1		-	-	0	#	0	3	-	10		20,444,650	143	20	Badan
			Persediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung	60	bulan	130,200,000	12	bulan	26,040,000	12	bulan	26,760,000	3		4,460,000	3		6,690,000	-	0	#	0	6	11,150,000	18		37,190,000	30	29	Badan
			Persediaan makanan dan minuman	60	bulan	222,320,000	12	bulan	36,120,000	12	bulan	40,320,000	3		6,120,000	3		360,000	-	0	#	0	6	6,480,000	18		42,600,000	30	19	Badan
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bulan	2,142,950,000	12	bulan	352,853,711	12	bulan	330,850,000	3		48,060,500	3		48,060,500	-	0	#	0	3	48,060,500	15		400,914,211	25	19	Badan
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	60	bulan	182,250,000	-	-	35,500,000	12	bulan	40,200,000	3		7,500,000	3		7,500,000	-	0	#	0	3	7,500,000	3		43,000,000	5	24	Badan
			Pelayanan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PHS	185		207,000,000	12	bulan	40,222,500	12	bulan	33,570,000	3		11,190,000	3		11,190,000	-	0	#	0	6	22,380,000	18		62,602,500	10	30	Badan
			Pelayanan Kesehatan Non PHS	185		207,000,000	12	bulan	40,222,500	12	bulan	33,570,000	3		11,190,000	3		11,190,000	-	0	#	0	6	22,380,000	18		62,602,500	10	30	Badan
			Pelayanan Kesehatan Non PHS	185		207,000,000	12	bulan	40,222,500	12	bulan	33,570,000	3		11,190,000	3		11,190,000	-	0	#	0	6	22,380,000	18		62,602,500	10	30	Badan
			Pelayanan Kesehatan Non PHS	185		207,000,000	12	bulan	40,222,500	12	bulan	33,570,000	3		11,190,000	3		11,190,000	-	0	#	0	6	22,380,000	18		62,602,500	10	30	Badan
			Pelayanan Kesehatan Non PHS	185		207,000,000	12	bulan	40,222,500	12	bulan	33,570,000	3		11,190,000	3		11,190,000	-	0	#	0	6	22,380,000	18		62,602,500	10	30	Badan
			Pelayanan Kesehatan Non PHS																											

[illegible]

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I (Jan&Mar)		II (Apr&Jun)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	Penyelesaian Prosedur Pemberian Perfindun	terlaksananya 1 kegiatan pemberian prosedur perfindun	15 kegiatan	2.020.788.100	1 kegiatan	Rp. 292.500.000	1 kegiatan	Rp. 62.545.000	K	1	Rp. 16.050.000,00	K	1	Rp. 16.050.000	K	1	Rp. 16.050.000	K	2	Rp. 308.550.000	K	13	Rp. 15	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Sosialisai Berbagi Peraturan Pelaksanaan tertat	terlaksananya 6 kegiatan sosialisai berbagi peraturan	10 kegiatan	2.292.587.152	2 kegiatan	368.637.000	2 kegiatan	83.705.000	K	1	16.355.000,00	K	2	16.355.000	K	2	16.355.000	K	4	384.992.000	K	40	17	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Penyuluhan Ketenagakerjaan	terlaksananya kegiatan penyuluhan ketenaga kerjaan	5 kegiatan	3.681.375.300	1 kegiatan	600.612.250	1 kegiatan	351.000.000	K	1	54.000.000,00	K	1	108.000.000,00	K	2	162.000.000	K	3	762.612.250	K	60	21	DINAS TENAGA KERJA DAN
								</																

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III	IV	K	Rp.	K	Rp.	14 = 7 + 13	15 = 14/8*100%							
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.					
			Rata-rata capaian kinerja (%)																	22		20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Predikat kinerja																	SR		SR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK				
10	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi 73 untuk Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (ummet real)	5,614	%	4,796,187,440	80		844,208,640	1,180		134,298,000	161		51,948,000	470		30,450,000	-	0	0	1,180	82,398,000	1,180	926,606,640	21.02	21.21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			11,50	%																						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Meningkatkan Jangkauan Pelayanan	5,470	akseptor	2,834,505,440	880	akseptor	777,166,640			0			-			-		-		-	880		777,166,640	16	27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pengadaan alat kontrasepsi	16 orang 144 orang petugas RR atau 23% dari perencanaan	144	orang	1,145,642,000	300	orang	67,042,000	16	orang	106,978,000	-		24,628,000	16		30,450,000		16		55,078,000	316		122,120,000	219	11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB metode kontrasepsi vasektomi dan tubektomi	845	akseptor	816,040,000				180	orang	27,320,000	50		27,320,000	-		-		50		27,320,000	50		27,320,000	6	3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Rata-rata capaian kinerja (%)																			80		14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Predikat kinerja																			1		SR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
11	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM	Cakupan Kampung KB di setiap Desa	330	Kampung KB	23,256,347,730	99		4,446,087,991	224		1,192,177,000	17		311,537,000	10		631,636,500	-	0	0	224	943,173,500	224	5,389,261,491	4.68	19.12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
		Jumlah Kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, non Formal dan Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	50	Sekolah																						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) 1 (satu) petugas di setiap Anggota Kelompok UPPKS PUS ber KB	100	%																						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
			100	%																						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
			92,75	%																						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	59 Kelompok dari 330 kelompok atau 18% dari perencanaan	584	kelompok	4,537,230,000	16	kelompok	3,259,955,991	30	Kampung KB	563,727,000	-		139,502,000	30		404,391,500		30		543,893,500	46		3,803,849,491	8	84	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB	3 kegiatan atau 20% dari perencanaan	15	kegiatan	8,379,415,354	3	kegiatan	183,570,000	-	-	0	-		-			-		-		-	3		183,570,000	20	2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Koordinasi Pengelolaan Program KB	1 Keg dari 5 keg atau 20 % dari perencanaan	1,500	orang	1,945,905,050	1	orang	251,150,000	254	orang	309,930,000	254		142,760,000	-		63,750,000		254		206,510,000	255		457,660,000	17	24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	228 Orang atau 1140 org atau 20% dari perencanaan	2,400	orang	3,961,827,326	200	orang	366,332,000	250	orang	108,275,000	-		5,775,000	250		47,250,000		250		53,025,000	450		419,357,000	19	11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	1 dokumen atau 20% dari perencanaan	65	dokumen	3,080,470,000	13	dokumen	189,080,000	13	dokumen	167,995,000	3		17,000,000	3		99,995,000		6		116,995,000	19		306,075,000	29	10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pengelolaan Parameter Kependudukan	55 orang atau 20% dari perencanaan	240	dokumen	1,351,500,000	3	dokumen	196,000,000	16	Pesantren siaga Kependudukan	42,250,000	-		6,500,000	-		16,250,000		-		22,750,000	3		218,750,000	1	16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Rata-rata capaian kinerja (%)																			16		24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Predikat kinerja																			SR		SR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	100	%	2,919,522,600	200		179,050,000	240		106,994,992	41		39,225,000	20		26,250,000	-	0	0	240	65,475,000	240	244,525,000	16.39	12.48	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Jumlah Kelompok PIKR	224	Kelompok	1,484,880,000	0	0	0	16	kelompok	106,994,992	8		39,225,000	8		26,250,000		16		65,475,000	16		65,475,000	7	4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Forum KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	240 Orang dari 1200 orang atau 20% dari perencanaan	1,464		1,434,642,600	240		179,050,000			0			-			-		-		-	240		179,050,000	16	12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Rata-rata capaian kinerja (%)																			12		8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Predikat kinerja																			SR		SR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
12	PROGRAM PENINGKATAN PEMANGGULANGAN NARKOBA, PMS	Masyarakat memahami cara pencegahan dan penanganan Narkoba, PMS	7,082	orang	903,828,900	200		36,426,000	200		0	0		0	0		0	-	0	0	200	0	200	36,426,000	5	4.03	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pelayanan promosi kesehatan reproduksi dalam penanganan narkoba	200 sekolah dari 4000 atau 5% dari perencanaan	4,000	orang	903,828,900	200		36,426,000			0			-			-		-		-	200		36,426,000	5	4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Rata-rata capaian kinerja (%)																			5		4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Predikat kinerja																			SR		SR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
15	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA	Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang terlatih	165	Desa	1,903,572,550	100		271,862,379	360		144,415,000	271		48,165,000	0		43,750,000	-	0	0	360	91,915,000	360	363,777,379	20.51	17.37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	360 Orang dari 1800 org atau 20% dari perencanaan	1,755	orang	1,903,572,550	100	orang	271,862,379	55	orang	144,415,000	55		48,165,000	-		43,750,000		55		91,915,000	155		363,777,379	9	19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Rata-rata capaian kinerja (%)																			9		10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Predikat kinerja																			SR		SR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		
16	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB	Jumlah Kelompok BKB Holistic Integratif	98	Kelompok	1,626,401,535	245		425,740,800	32		0	2		0	0		0	-	0	0	32	0	32	425,740,800	10.00	26.18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Preseden/PATRI	32 Kelompok BKB-HI dari 160 kelompok atau 20% dari perencanaan	320		1,626,401,535	32		425,740,800			0			-			-		-		-	32		425,740,800	10	26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
			Rata-rata capaian kinerja (%)																			10		26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK		

Faktor Pendorong Keberhasilan	
Faktor Penghambat Keberhasilan	
Tindakan yang diperlukan	
Tindakan yang diperlukan	

Faktor Pendorong Keberhasilan
Faktor Penghambat Keberhasilan
Tindakan Lanjut yang diperlukan
Tindak lanjut yang diperlukan

[illegible]

Faktor Pendorong Keberhasilan	
Faktor Penghambat Keberhasilan	
Tindak Lanjut yang diperlukan	
Tindak Lanjut yang diperlukan	

PENANAMAN MODAL				824			64,491,198,957	2,873			5,561,544,991	3,879			2,178,490,826	1,095		275,076,738	2,112		618,917,700	-	-	#	-	3,207		893,094,430	6,880		6,142,668,047	738	10	DINAS PENANAMAN		
MODAL DAN PELAYANAN				824			64,491,198,957	2,873			5,561,544,991	3,879			2,178,490,826	774		275,076,738	1,198		618,917,700	0	0	0	0	1,972		893,094,430	4,845		6,142,668,047	588	10	DINAS PENANAMAN		
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI				100	%		13,890,702,575	2,753	%		1,681,858,443	3,519	%		683,811,640	17		81,094,530	15		242,344,000	0	0	0	0	32		323,438,530	2,785		2,005,296,973	2,785	15	DINAS PENANAMAN		
Penyediaan jasa surat menyurat				12	bulan		303,777,040	1,840	bulan		37,337,500	12	bulan		106,500,000			18,967,000			26,470,000.00					-			45,437,000	1,840		62,774,500	15,333	27	DINAS PENANAMAN	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	bulan		267,707,039	12	bulan		51,966,970	12	bulan		73,955,472	3		6,267,050	3		4,213,000					6			10,480,050	18		62,447,020	150	23	DINAS PENANAMAN	
Penyediaan alat tulis kantor				12	bulan		1,280,281,750	63	bulan		194,083,750	1	paket		196,791,000	-		1			195,020,800					1			195,020,800	64		389,104,550	533	30	DINAS PENANAMAN	
Pengadaan barang cetakan dan pengaspalan				5	paket		1,710,554,720	30	paket		233,839,350	1	paket		128,379,900	-		199,200	-		629,400					-			828,600	30		234,667,950	600	34	DINAS PENANAMAN	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan				12	bulan		141,778,693	18	bulan		22,351,500	6	item		9,592,213	-			-		-				-	-	-	-	18		22,351,500	150	16	DINAS PENANAMAN		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				15	paket		2,907,209,942	2	paket		192,883,248	-	paket		0	-			-		2					2			192,883,248	13		26,948,900	175	4	DINAS PENANAMAN	
Penyediaan peralatan rumah tangga				12	bulan		650,444,173	17	bulan		23,579,000	12	item		6,912,055	2		1,718,100	2		1,651,800					2			3,369,900	21		102,848,900	175	4	DINAS PENANAMAN	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-				12	bulan		314,354,682	12	bulan		35,640,000	12	bulan		2,880,000	3		1,920,000	3		960,000					6			2,880,000	18		38,520,000	150	12	DINAS PENANAMAN	
Penyediaan makanan dan minuman				12	bulan		657,721,839	32	bulan		65,598,000	12	bulan		45,055,000	3		11,722,000	3		6,599,000					6			18,321,000	38		103,919,000	317	16	DINAS PENANAMAN	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12	bulan		5,218,611,202	592	bulan		773,868,717	12	bulan		86,068,000	3		33,381,180			-					3			33,381,180	595		807,249,897	4,958	15	DINAS PENANAMAN	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				12	bulan		149,601,515		bulan		0	12	bulan		0				-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN	
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non				12	bulan		198,659,980	21	bulan		30,710,408	12	bulan		27,680,000	3		6,920,000	3		6,800,000					6			13,720,000	27		44,430,408	225	22	DINAS PENANAMAN	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)								1,884				16		DINAS PENANAMAN	
																					Predikat kinerja								SR				SR		DINAS PENANAMAN	
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				100	%		7,535,382,167	27	%		355,378,245	16	%		61,922,535	3		14,338,200	3		14,848,700	-	0	#	0	16		29,166,900	16		191,623,724	17	2	DINAS PENANAMAN		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				2	unit mobil		460,000,000	-	unit mobil		-	-	unit mobil		0				-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN		
Pengadaan Mebeubar				5	paket		979,161,553	-	paket		-	-	paket		0				-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				5	paket		1,212,962,936	-	paket		-	-	paket		0				-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				12	bulan		4,372,336,177	21	bulan		146,260,324	12	bulan		60,522,535	3		12,938,200	3		14,848,700					6			27,786,900	27		174,047,224	225	4	DINAS PENANAMAN	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12	bulan		510,921,501	8	bulan		16,176,500	12	bulan		1,400,000	3		1,400,000	-		-					3			1,400,000	11		17,576,500	92	3	DINAS PENANAMAN	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)								79				2		DINAS PENANAMAN	
																					Predikat kinerja								SR				SR		DINAS PENANAMAN	
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				100	%		1,425,886,449	55	%		104,777,600	120	%		0	0		0	0		0	0	-	0	#	0	116		0	116		214,731,600	19	15	DINAS PENANAMAN	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				300	strel		842,972,905	118	strel		127,212,000	-	strel		0			-			127,212,000					-			118		127,212,000	39		15	DINAS PENANAMAN	
Pengadaan pakaian khusus haji-haji tertentu				300	strel		582,913,544	118	strel		87,519,600	60	strel		0			-			87,519,600					-			118		87,519,600	39		15	DINAS PENANAMAN	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)								39				15		DINAS PENANAMAN	
																					Predikat kinerja								SR				SR		DINAS PENANAMAN	
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM				100	%		1,738,493,659	6	%		294,492,500	7	%		227,341,800	1		32,700,000	1		64,900,000	-	0	#	0	7		97,600,000	7		369,784,500	20	13	DINAS PENANAMAN		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi				20	dokum en		1,111,657,040	7	dokumen		174,659,750	3	dokumen		136,012,500	2		19,700,000	1		40,900,000					3			60,600,000	10		235,259,750	50	21	DINAS PENANAMAN	
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				10	dokumen		563,407,508	4	dokumen		88,024,750	2	dokumen		84,614,300	1		13,000,000	1		24,000,000					1			37,000,000	5		125,024,750	50	22	DINAS PENANAMAN	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				5	dokumen		63,429,113	2	dokumen		9,500,000	1	dokumen		6,715,000			-			-				-	-	-	-	2		9,500,000	40	15	DINAS PENANAMAN		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)								47				19		DINAS PENANAMAN	
																					Predikat kinerja								SR				SR		DINAS PENANAMAN	
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM				100	%		644,620,556	5	%		133,104,200	5	%		54,705,500	3		10,944,000	0		16,625,000	-	0	#	0	5		27,569,000	5		128,497,500	20	13	DINAS PENANAMAN		
Penyusunan Perencanaan dan Penguasaan SKPD Dinas				25	dokumen		644,620,556	5	dokumen		100,928,500	7	dokumen		54,705,500	2		10,944,000	1		16,625,000					3			27,569,000	8		128,497,500	32	20	DINAS PENANAMAN	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)								32				20		DINAS PENANAMAN	
																					Predikat kinerja								SR				SR		DINAS PENANAMAN	
6 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN				24	%		20,569,483,086	9	%		1,331,484,718	105	%		241,634,351	0		21,950,000	16		32,000,000	-	0	#	0	54		53,950,000	54		1,542,811,750	9	7	DINAS PENANAMAN		

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian RPMD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana	
1	4	5	6		7		8		I (Jan/Mar)		II (Apr/Jun)		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Tertersedianya Pengadaan Obat Hewan: Sosialisasi WVD/ 10000	4,455	3,500,000,000	10,001	1,404,874,200	183	994,986,000	200	300,850,800	201	219,455,400					401	520,306,200	10,402	1,925,180,400	233	55	DINAS PERIKANAN	
		- Tertersedianya pengawasan kesehatan dan lalu lintas hewan qurban - Tertersedianya pengawasan kesehatan dan lalu lintas hewan di pasar hewan - Tertersedianya Sosialisasi Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	10,015	4,000,000,000	4	1,289,515,500	26	1,095,062,500	2	35,980,000	2	252,172,200					4	288,152,200	8	1,577,667,700	0	39	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	- Sosialisasi Pencegahan Foodborne Disease (Penyakit berasal dari Pangan Asal Hewan) - Bimbingan Teknis Kesehatan Daging dan Jeroan Hewan Qurban - Bimbingan Teknis Bimbingan	43	3,000,000,000	4	577,025,000	80	456,595,000	2	135,113,000	2	25,000,000					4	160,113,000	8	737,138,000	19	25	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium	Tersedianya pengadaan obat-obatan UPT Puskesmas dan laboratorium	61	11,150,000,000	5	1,033,663,954	2	1,193,168,500	1	137,327,605		273,822,550				1	411,150,155	6	1,444,814,109	10	13	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
	Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan	- Tertersedianya koordinasi dan konsultasi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan - Tertersedianya pengawasan dan pembinaan kios obat hewan - Tersedianya alat perbekalan kesehatan hewan - Tertersedianya uji lab dalam	15	3,350,000,000	4,018	497,365,000	3,661	571,272,000	500	115,258,000	500	76,547,000				1,000	191,805,000	5,018	689,170,000	33,453	21	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			6,743		31		DINAS	
Predikat kinerja																			SR		DINAS		DINAS	
10	PROGRAM PENINGKATAN	Produk Daging	26,618	Ton	74,639,652,000	246,468	8,731,666,237	932,485	9,172,206,000	10,521	739,454,975	500,523	1,089,684,700	-	0	0	932,485	1,820,139,675	932,485	10,551,805,912	14	12	DINAS	
		Produk Telur	1,489	Ton																				
		Produk Susu	95,494	Ton																				
	Pembangunan sarana dan prasarana pembiutan ternak	Tersedianya sarana dan prasarana UPT Pembiutan	20,018	6,870,000,000	3	839,995,637	5	774,404,000									-	-	3	839,995,637	0	12	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
	Pembibitan dan perawatan ternak	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pemeliharaan 20 jenis; Tersedianya bahan/bibit tanaman	5,436,065	8,670,000,000	921,500	1,682,942,000	300,001	1,072,696,000	200,000	148,640,975	200,000	428,545,000				####	577,185,975	1,321,500	2,260,127,975	24	26	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	- Tertersedianya sosialisasi calon penerima bantuan ternak - Tertersedianya bimbingan teknis pengembangan peternakan	35	3,855,527,000	8	836,405,000	415	756,177,000	2	239,550,000	2	37,000,000				4	276,550,000	12	1,112,955,000	34	29	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Tertersedianya vaksinasi rabies; Tertersedianya vaksinasi indigofera - Tertersedianya vaksinasi rumput gajah - Tertersedianya vaksinasi rumput odot - Tertersedianya vaksinasi pencacah rumput - Tertersedianya bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan pakan berkualitas - Tertersedianya bimbingan teknis hijauan pakan ternak	22,000	2,750,000,000	3,000	404,219,200	3,200	477,488,000	2,000	181,214,000	1,000	79,673,700				3,000	260,887,700	6,000	665,106,900	27	24	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	- Tertersedianya uji pakan - Tertersedianya tanaman indigofera - Tertersedianya rumput gajah - Tertersedianya rumput odot - Tertersedianya pakan pencacah rumput - Tertersedianya bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan pakan berkualitas - Tertersedianya bimbingan teknis hijauan pakan ternak	1,339,225	3,965,775,000	45	528,194,000	38,392	902,837,000	2	139,600,000	2	49,400,000				4	189,000,000	49	717,194,000	0	18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
1	Pengembangan agribisnis peternakan	Tertersedianya pendistribusian ternak kambing peternakan etawah betina Tertersedianya pendistribusian ternak ketinci Tertersedianya pendistribusian ternak domba betina; Tertersedianya pendistribusian ternak kerbau betina; Tertersedianya pendistribusian ternak sapi potong jantan; Tertersedianya pendistribusian ternak sapi potong betina;	84,479	48,528,350,000	7,929	4,439,910,400	3,918	5,188,604,000	30,450,000	486,066,000						-	516,516,000	7,929	4,956,426,400	9	10	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			16		20		DINAS	
Predikat kinerja																			SR		DINAS		DINAS	
11	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Penjualan Hasil	80	Kelompok	35,281,104,000	250	1,397,836,000	15	1,930,391,000	2	369,259,600	2	583,542,800	-	0	0	18	952,601,600	18	2,350,637,600	6	7	DINAS PERIKANAN	
		Persentase Pencemaran Bahan	6	%																				
	Pembangunan pusat-pusat etalase/ekselebi/promosi atas hasil produksi peternakan	RPU; Pengadaan Peralatan RPU; Pembangunan Instalasi IPAL / 1	6,005	22,000,000,000	3	635,638,000	4	340,790,000		56,500,000	1	265,170,000				1	321,670,000	4	957,308,000	0	4	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana	Tersedianya penunjang operasional rumah potong hewan	10	6,750,000,000			4	986,336,000	1	245,878,600	1	267,620,000				2	513,498,600	2	513,498,600	20	8	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/ekselebi/promosi atas hasil produksi peternakan	Tertersedianya Pameran Hasil Daging Peternakan dan Perikanan Tk. Kabupaten Tertersedianya Sosialisasi Gerimis Bagus Tertersedianya Lomba Kelompok	545	3,542,104,000	5	361,879,000	9	321,025,000	31,325,000	26,950,000						-	58,275,000	5	420,154,000	1	12	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hewan	Tertersedianya Pengujian Produk Pangan Asal Hewan ; Tertersedianya Pembinaan dan Pengujian Produk Pangan Asal Hewan ; Tertersedianya Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Asal Hewan Tertersedianya Bimbingan Teknis	4131	2,989,000,000	5	400,319,000	400	282,240,000	50	35,556,000	50	23,802,000				100	59,358,000	105	459,677,000	3	15	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			6		10		DINAS	
Predikat kinerja																			SR		DINAS		DINAS	
12	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase kelahiran Ternak	80	%	25,526,484,000	85	2,372,929,410	15	1,902,471,000	1	65,918,000	3	186,231,500	-	0	0	15	252,149,500	15	2,625,078,910	2	9	DINAS	
		Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi	25	Kelompok																				
		Jumlah Peningkatan Kelas	10	Kelompok																				
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	- Tertersedianya stimulan kandang - Tertersedianya sarana dan prasarana teknologi - Tertersedianya ternak ruminansia kecil - Tertersedianya ternak unggas	212	13,192,147,000	7	750,709,425	10	554,202,000	6,630,000	103,389,000						-	110,019,000	7	860,728,425	3	7	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN		

Faktor Pendorong Keberhasilan	
Faktor Penghambat Keberhasilan	
Tindak Lanjut yang diperlukan	
Tindak Lanjut yang diperlukan	

[illegible]

Faktor Pendorong Keberha	
Faktor Penghambat Keber	
Tindak Lanjut yang diperlu	
Tindak Lanjut yang diperlu	

ADMINISTRASI	99,840.74	792,330,196,080.87	120,121.00	0.00	45,708,847,925.00	16,500.94	0.00	33,568,965,200.00	3,371.00	5,340,159,212.00	5,236.00	6,768,581,443.00	0.00	0.00	0.00	12,098,740,655.00	24,634,478.07	67,807,888,580.00	16.07	12.92	ADMINISTRASI		
SEKRETARIAT DAERAH	99,840.74	356,731,541,160.00	10,979.00	0.00	45,708,847,925.00	16,500.94	0.00	33,568,965,200.00	3,371.00	5,340,159,212.00	5,236.00	6,768,581,443.00	0.00	0.00	0.00	12,098,740,655.00	24,634,478.07	67,807,888,580.00	16.21	12.91	SEKRETARIAT DAERAH		
PROGRAM KERJASAMA	Penersentase Press Release	100	%	15,892,583,300.00	53			1,890,473,000.00	120							535,734,630.00	144	2,116,207,630.00	24.00	8.79	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Penyediaan informasi	Penersentase Kelembutan	80	%												535,734,630.00	90	1,857,202,130.00	18	17	SEKRETARIAT DAERAH		
	Penyediaan informasi	Penyediaan informasi	500	kali	10,964,401,800.00	56	kali	1,321,467,500.00	100	kali	1,428,967,950.00	12	197,840,630.00	22	337,894,000.00						9	SEKRETARIAT DAERAH	
	Penyediaan informasi	Penyediaan informasi	100	kali	2,749,591,700.00	54	kali	259,005,500.00		-							54	259,005,500.00	54		SEKRETARIAT DAERAH		
	Penyediaan informasi	Penyediaan informasi	4	dok	1,868,589,800.00	0		0.00													SEKRETARIAT DAERAH		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	-	24.00	8.79	SEKRETARIAT DAERAH	
Predikat kinerja																				ST	ST	SEKRETARIAT DAERAH	
2	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PEMASARAN	Prestasi Penerimaan	III	Peringkat	266,727,250.00	13		266,727,250.00	15		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	266,727,250.00	750.00	100.00	SEKRETARIAT DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0	15	266,727,250.00	750.00	100.00	SEKRETARIAT DAERAH
Predikat kinerja																				ST	ST	SEKRETARIAT DAERAH	
3	PROGRAM PELAYANAN	Penersentase Kelembutan	100	%	75,321,292,290.00	18,166		8,896,849,365.00	3,308	2,596,721,702.00	5,108	2,226,360,336.00	0	0.00	0.00	0.00	8,414	4,823,082,038.00	23,546.54	15,410,690,003.00	26.39	30.01	SEKRETARIAT DAERAH
3	Pelayanan jasa surat	Pelayanan jasa surat	91,320	SM/SK	1,434,643,800.00	14,800	SM/SK	389,581,200.00	19,080	SMSM	352,456,000.00	3,196	79,772,000.00	4,993	96,260,000.00		8,189	178,032,000.00	22,969	567,613,200.00	25	40	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelayanan jasa surat	Pelayanan jasa surat	60	bulan	1,868,749,400.00	11	bulan	240,878,937.00	12	Bulan	657,000,000.00	2	33,587,594.00	2	57,113,798.00		4	90,711,390.00	15	331,590,327.00	25	18	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelayanan jasa surat	Pelayanan jasa surat	60	bulan	15,463,017,100.00	12	bulan	1,863,185,500.00	12	Bulan	1,736,950,000.00	4	341,785,000.00	4	461,080,000.00		7	892,865,000.00	19	2,756,050,500.00	32	18	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelayanan jasa surat	Pelayanan jasa surat	60	bulan	11,347,666,800.00	8	bulan	804,090,714.00	12	Bulan	925,751,350.00	0	0	0			8	804,090,714.00			13	7	SEKRETARIAT DAERAH
3	Pelayanan alat tulis kantor	Pelayanan alat tulis kantor	310	jenis	1,117,675,300.00	60	jenis	209,602,375.00	6														

47

48

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dari Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I (Jan/Mar)		II (Apr/Jun)		III	IV	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100%						
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					26	21	KECAMATAN SR
Predikat kinerja																					SR	KECAMATAN SR	
1	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Pelaksanaan musyawarah	100	161.174,000	100	23.730,000	100	25.000,000	-	-	100	25.000,000	-	0	100	25.000,000	40	48.730,000	40	30	KECAMATAN CIPONGKOR		
			Persentase usulan DSP yang	5	161.174,000	1	23.730,000	1	25.000,000				25.000,000		1	48.730,000	20	30	KECAMATAN SR				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
2	PROGRAM PENINGKATAN	Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100	134.312,000	100	18.701,000	100	19.000,000	-	-	28	5.000,000	-	0	28	5.000,000	26	23.761,000	26	18	KECAMATAN CIPONGKOR		
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK	20	134.312,000	4	18.701,000	4	18.000,000				5.000,000		4	23.701,000	20	18	KECAMATAN SR				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Penyenggaraan Hari - Hari	100	221.618,000	100	26.870,000	100	25.000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	20	25.870,000	20	12	KECAMATAN CIPONGKOR		
			Persentase fasilitasi kegiatan	5	221.618,000	1	25.870,000	1	25.000,000				0	0	0	1	25.870,000	20	12	KECAMATAN SR			
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
11	PROGRAM PENINGKATAN	Pelayanan Administrasi	100	1.061.067,000	100	173.800,000	100	201.180,000	0	0	30	61.000,000	0	0	0	30	61.000,000	26	234.800,000	26	22	KECAMATAN SR	
			Persentase jenis pelayanan sesuai	60	1.061.067,000	12	173.800,000	12	201.180,000				61.000,000		12	234.800,000	20	22	KECAMATAN SR				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
12	PROGRAM PENINGKATAN	Pembinaan, dan Monitoring	100	6.066.816,000	100	917.014,800	100	1.072.000,000	0	0	22	232.000,000	0	0	0	22	232.000,000	24	1.149.014,800	24	18	KECAMATAN SR	
			Persentase koordinasi dan	5	6.066.816,000	3	917.014,800	3	1.072.000,000				232.000,000		3	1.149.014,800	20	18	KECAMATAN SR				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
10	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAUASAN	Perencanaan manajemen	100	0	100	-	100	0	0	0	0	-	0	0	0	0	20	0	20	0	0	KECAMATAN CIPONGKOR	
			Persentase kegiatan KDH yang	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN SR
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM								1.688.800.000	0	24	399.260.000	0	0	399.260.000		-	1.787.540.000	SR	157	KECAMATAN			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM																					22	16	KECAMATAN
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM																					SR	SR	KECAMATAN
1	KECAMATAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	1.212	12.013.895.966	1.212	1.793.537.700	1.212	1.771.522,000	0	0	659	794.473.100	0	0	0	659	794.473.100	1.871	2.588.010,800	184,35	21,54	KECAMATAN SINDANGKERTA	
			Tenwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Terlaksananya	100	122.102,000	100	20.000,000	100	20.000,000				20.000,000		0	100	20.000,000	40	40.000,000	40	33		KECAMATAN SINDANGKERTA
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
2	PROGRAM PENINGKATAN	Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100	122.102,000	100	19.987,500	100	20.000,000	0	0	25	5.070,000	0	0	0	25	5.070,000	25	25.057,500	25	21	KECAMATAN SINDANGKERTA	
			Tenwujudnya peningkatan peran perempuan di pedesaan Terlaksananya Pemberdayaan	20	122.102,000	4	19.987,500	4	20.000,000				5.070,000		-	5.070,000	4	25.057,500	20	21	KECAMATAN SINDANGKERTA		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
3	PROGRAM PELAYANAN	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	430.719,786	100	70.369,000	100	160.873,500	0	0	46	73.504,800	0	0	0	46	73.504,800	29	143.873,800	29	33	KECAMATAN SINDANGKERTA	
			Tenwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tenwujudnya	60	430.719,786	3	70.369,000	3	160.873,500				73.504,800		-	73.504,800	3	143.873,800	5	4	KECAMATAN SINDANGKERTA		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
4	PROGRAM PENINGKATAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	285.175,524	100	21.530,000	100	15.000,000	0	0	42	6.250,000	0	0	0	42	6.250,000	20	27.780,000	20	10	KECAMATAN SINDANGKERTA	
			Tenwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terlaksananya pemeliharaan	30	285.175,524	6	21.530,000	6	15.000,000				6.250,000		-	6.250,000	6	27.780,000	20	4	KECAMATAN SINDANGKERTA		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
5	PROGRAM PENINGKATAN	Pengadaan peralatan rumah tangga	100	55.111,500	100	15.000,000	100	15.500,000	0	0	100	15.500,000	0	0	0	100	15.500,000	20	15.000,000	20	27	KECAMATAN SINDANGKERTA	
			Tenwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur, Terlaksananya	125	55.111,500	25	15.000,000	25	15.500,000				15.500,000		-	15.500,000	25	15.000,000	20	27	KECAMATAN SINDANGKERTA		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
6	PROGRAM PENINGKATAN	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	30.525,000	100	5.000,000	100	5.000,000	0	0	100	5.000,000	0	0	0	100	5.000,000	40	10.000,000	40	34	KECAMATAN SINDANGKERTA	
			Tenwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Terlaksananya Sosialisasi	5	30.525,000	1	5.000,000	1	5.000,000				5.000,000		-	5.000,000	1	10.000,000	20	34	KECAMATAN SINDANGKERTA		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
7	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	12.155,000	100	8.220,000	100	66.049,000	0	0	49	32.422,600	0	0	0	49	32.422,600	30	40.642,600	30	334	KECAMATAN SINDANGKERTA	
			Tenwujudnya Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya	15	12.155,000	3	8.220,000	3	66.049,000				32.422,600		-	32.422,600	3	40.642,600	20	334	KECAMATAN SINDANGKERTA		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				

51

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.							
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100%	16														
Rata-rata capaian kinerja (%)																28	27	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	21	KECAMATAN									
12	PROGRAM PENINGKATAN		100	5.876.445.500	100	974.551.600	100	1.175.288.100	0	0	22	262.237.000	0	0	0	262.237.000	29	1.236.788.600	29	21	KECAMATAN						
	Pembinaan, dan Monitoring, Evaluasi Bidan	Tertaksananya pembinaan dan monitoring bidan pemerintahan /	10	405.713.000	1	15.749.600	2	81.142.600				23.137.000	0	0	0	23.137.000	1	38.886.600	10	10	KECAMATAN						
	Pembinaan, dan Monitoring, Evaluasi Bidan PMD	Tertaksananya pembinaan dan monitoring bidan PMD (2 kea)	10	5.241.065.000	9	916.980.500	2	1.048.213.000				239.100.000				239.100.000	9	1.156.080.500	90	22	KECAMATAN						
	Pembinaan, dan Monitoring, Evaluasi Bidan Transdi	Tertaksananya pembinaan dan monitoring bidan transdi (2 kea)	10	87.612.500	2	15.940.500	2	17.522.500				-				-	2	15.940.500	20	18	KECAMATAN						
	Pembinaan, dan Monitoring, Evaluasi Bidan PSU	Tertaksananya pembinaan dan monitoring bidan PPSU (2 kea)	10	71.027.500	2	12.940.500	2	14.205.500				-				-	2	12.940.500	20	18	KECAMATAN						
	Pembinaan, dan Monitoring, Evaluasi Bidan EPD	Tertaksananya pembinaan dan monitoring bidan EPD (2 kea)	10	71.027.500	-	12.940.500	2	14.205.500				-				-	-	12.940.500	-	18	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																29	17	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	20	KECAMATAN									
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN	Tertaksananya penyusunan LAKIP		100	20.041.500	100	4.008.300	100	20.276.200	0	0	-	4.044.000	0	0	0	4.044.000	0	4.008.300	20	20	KECAMATAN						
	Pemutihan Laboran		5	20.041.500	1	4.008.300	1	4.008.300				-				-	1	4.008.300	20	20	KECAMATAN						
	Penyenggaraan Pembinaan, sosialisasi, koordinasi							16.287.900													KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																29	21	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	20	KECAMATAN									
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program																1.644.387.200	0	24	389.770.000	0	0	411.580.000	-				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM																20	25	KECAMATAN									
Predikat Kinerja Seluruh Program																SR	KECAMATAN										
KECAMATAN CILILIN			1.100	12.015.416.773	1.100	1.823.115.100	1.100	1.911.752.700	0	0	345	576.900.300	0	0	0	576.900.300	345	2.400.015.400	31,40	19,97	KECAMATAN						
1	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT		100	112.181.213	100	18.375.000	100	17.340.000	0	0	100	17.340.000	0	0	0	17.340.000	40	35.715.000.000	40	32	KECAMATAN						
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tertaksananya pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa	5	112.181.213	1	18.375.000	1.00	17.340.000				17.340.000				17.340.000	1	35.715.000	20	32	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																40	32	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
2	PROGRAM PENINGKATAN		100	85.923.177	100	14.074.600	100	14.459.500	0	0	28	4.044.000	0	0	0	4.044.000	28	18.118.000.000	28	21	KECAMATAN						
	Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Tertaksananya pembinaan terhadap kelompok PKK	15	85.923.177	3	14.074.000	3,00	14.450.500				4.044.000				-	3	18.118.000	20	21	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																25,60	21,09	KECAMATAN									
Predikat Kinerja																SR	KECAMATAN										
3	PROGRAM PELAYANAN		100	1.404.741.995	100	183.862.100	100	207.514.700	0	0	43	89.734.800	0	0	0	89.734.800	29	273.696.900.000	29	19	KECAMATAN						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Kouta internet, Telepon dan PDAM Selama 12	60	27.106.644	12	3.329.800	12,00	3.900.000				1.293.800			43	1.293.800	12	4.623.600	20	17	KECAMATAN						
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang lengkap	35	17.699.295	2	578.200	7,00	2.802.700				-			-	-	2	578.200	6	3	KECAMATAN						
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tertaksananya pembayaran Jasa Kebersihan 3 orang PTT dan Peralatan Kebersihan 12 Bulan	60	732.593.685	12	119.997.000	12,00	121.556.000				56.206.000			-	56.206.000	12	176.203.000	20	24	KECAMATAN						
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja sebanyak 4 jenis (	5	21.367.850	1	800.000	1,00	3.000.000				-			-	-	1	800.000	20	4	KECAMATAN						
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya belanja ATK sebanyak 29 jenis (491 Buah)	4.455	87.008.409	891	14.266.500	891,00	11.916.000				5.625.000			-	5.625.000	891	19.891.500	20	23	KECAMATAN						
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Tersedianya barang cetakan sebanyak 4 jenis (874 buah) dan pengandaian	60.870	25.339.828	12.174	4.150.800	12.174,00	4.800.000				2.300.000			-	2.300.000	12.174	6.450.600	20	25	KECAMATAN						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/energaran	Tersedianya komponen instalasi/penengkapan kantor sebanyak	455	13.278.593	91	1.327.593	91,00	1.750.000				-			-	-	91	2.175.000	20	16	KECAMATAN						
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 6	5	267.708.635	1	3.850.000	1,00	23.950.000				5.500.000			-	5.500.000	1	9.350.000	20	3	KECAMATAN						
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan rumah tangga	175	20.787.866	35	3.405.000	35,00	1.450.000				-			-	-	35	3.405.000	20	16	KECAMATAN						
	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung	Tersedianya bahan bacaan surat kabar sebanyak 2 jenis selama 12	60	11.721.792	12	1.800.000	12,00	1.800.000				900.000			-	900.000	12	2.820.000	20	24	KECAMATAN						
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	91.576.500	12	15.000.000	12,00	16.500.000				8.250.000			-	8.250.000	12	23.250.000	20	25	KECAMATAN						
	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non	Tertaksananya keikutsertaan Non PNS dalam asuransi kesehatan	60	88.462.899	12	14.490.000	12,00	14.490.000				9.660.000			-	9.660.000	12	24.150.000	20	27	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																28,65	19,48	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
4	PROGRAM PENINGKATAN		100	517.230.177	100	44.681.600	100	34.496.000	0	0	18	6.316.000	0	0	0	6.316.000	24	50.397.000.000	24	10	KECAMATAN						
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tertaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5	39.900.999	1	11.941.000	1,00	6.316.000				6.316.000			-	6.316.000	1	18.237.000	20	25	KECAMATAN						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tertaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	35	315.267.364	7	11.000.000	7,00	16.180.000				-			-	-	7	11.000.000	20	3	KECAMATAN						
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tertaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	129.061.814	1	21.140.000	1,00	12.000.000				-			-	-	1	21.140.000	20	16	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																23,66	9,74	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
5	PROGRAM PENINGKATAN		100	99.513.130	100	16.300.000	100	20.400.000	0	0	-	0	0	0	0	0	20	16.300.000.000	20	16	KECAMATAN						
	Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	80	39.072.460	16	6.400.000	16,00	10.200.000				-			-	-	16	6.400.000	20	16	KECAMATAN						
	Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu	Tercapainya pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu sebanyak	165	60.440.490	33	9.900.000	33,00	10.200.000				-			-	-	33	9.900.000	20	16	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																20,00	16,38	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
7	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM		100	284.947.189	100	48.150.000	100	49.615.000	0	0	43	21.124.000	0	0	0	43	21.124.000	29	69.274.000.000	29	24	KECAMATAN					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhir realisasi	Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan akhir realisasi	60	284.947.189	21	48.150.000	12,00	45.736.000				21.124.000			-	21.124.000	21	69.274.000.000	35	24	KECAMATAN						
	Penyusunan Kuantangan							3.879.000				-			-	-					KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																28,52	24,31	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
8	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM		100	271.799.052	100	44.520.000	100	46.166.000	0	0	44	20.424.000	0	0	0	44	20.424.000	29	64.944.000.000	29	24	KECAMATAN					
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tercapainya penyusunan perencanaan dan penganggaran	60	271.799.052	21	44.520.000	12,00	46.166.000				20.424.000			-	20.424.000	21	64.944.000.000	35	24	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																28,52	23,89	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
10	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN		100	2.556.000	100	2.556.000	100	2.556.000	0	0	-	0	0	0	0	0	20	2.556.000.000	20	100	KECAMATAN						
	Penyusunan Laporan	Tertaksananya penyusunan LAKIP	1	2.556.000	1	2.556.000	1,00				-				-	-	1	2.556.000	100	100	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																20,00	100,00	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
10	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN		100	167.646.046	100	27.460.000	100	27.630.000	0	0	-	0	0	0	0	0	20	27.460.000.000	20	16	KECAMATAN						
	Developtoran Har-Hari	Tertaksananya penyusunan LAKIP	5	167.646.046	1	27.460.000	1,00	27.630.000				-			-	-	1	27.460.000	20	16	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																20,00	16,38	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
11	PROGRAM PENINGKATAN		100	2.001.398.302	100	327.824.000	100	327.789.500	0	0	46	151.500.000	0	0	0	46	151.500.000	29	479.324.000.000	29	24	KECAMATAN					
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATN)	Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat	60	2.001.398.302	10	327.824.000	12,00	327.709.500				-			-	-	10	479.324.000.000	17	24	KECAMATAN						
Rata-rata capaian kinerja (%)																29,25	23,95	KECAMATAN									
Predikat kinerja																SR	KECAMATAN										
12	PROGRAM PENINGKATAN		100	7.067.480.491	100	1.095.813.000	100	1.166.431.000	0	0	23	266.417.500	0	0	0	23	266.417.500	25	1.362.230.500.000	25	19	KECAMATAN					
	Pembinaan, dan Monitoring, Evaluasi Bidan	Tertaksananya pembinaan dan monitoring bidan pemerintahan 2 kali	5	235.055.508	1	12.146.500	1,00	25.142.650				-			-	-	1	12.146.500	20	5	KECAMATAN						

58

	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN BADAN PERENCANAAN, BANGUNAN			16,462	56,377,823,497	763	15,199,788,922	1,661	21,313,779,446	7	2,642,778,393	48	3,223,042,131	-	-	#	-	1,571	5,865,820,524	1,571	21,065,609,446	10	28	BADAN PERENCANAAN,
				16,462	56,377,823,497	763	15,199,788,922	1,661	21,313,779,446	7	2,642,778,393	49	3,223,042,131	0	0	0	0	1,571	5,865,820,524	1,571	21,065,609,446	9.51	28.30	BADAN PERENCANAAN,
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase kebutuhan perkantoran yang terpenuhi	100	%	11,958,567,449	476	2,934,307,692	1,278	3,377,124,446		367,446,856		1,729,223,881	-	0	#	0	1,275	2,166,670,737	1,275	5,100,977,829	8	25	BADAN PERENCANAAN,
	Penyediaan jasa surat memuat	Terselenggaranya Kegiatan Jasa Surat Memuat	5,430		30,513,290	1,086	4,998,000		5,496,000		1,599,000		1,299,000					2,898,000	1,086	7,896,000		20	26	BADAN PERENCANAAN,
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pengadaan jasa telepon dan internet	5		294,544,066	1			20,404,347		54,000,000		6,960,356					8,999,375	15,959,731	1	36,364,078	20	12	BADAN PERENCANAAN,

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana		
			5		7		8		I (Jan/Mar)		II (Apr/Jun)		III	IV	13		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	Penyusunan rancangan RKPD	Meningkatnya Kualitas Dokumen Rancangan RKPD, RKPD Perubahan KBB, Standar Analisa Belanja dan	10	3,995,315,580	4	951,326,000		1,517,430,000		464,387,450		157,447,450				621,834,900	4	1,573,160,900	40		39	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	5	3,765,181,620	1	616,180,007		650,000,000		548,820,100		-			-	548,820,100	1	1,165,000,107	20		31	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penyusunan Review RPJMD							1,993,338,700		0					-				-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran	Terselenggaranya Penyusunan KUA	10	2,470,992,000				678,500,000		140,500,000		71,860,200			-	212,360,200		212,360,200	-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
								125,000,000		0					-				-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
																					12	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
																					SR	SR	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
11	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dihasilkan	100	%	6,799,250,000		1,861,215,000		2,192,282,800	0	139,466,687	0	107,044,500	-	0	0	12	246,511,187	12	2,107,726,187	50	27	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi							177,120,000		17,500,000		3,670,500			-	21,170,500		21,170,500	-		-	4	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Tertaksananya Penyusunan Kajian Pembentukan Bank Rami	5	1,350,000,000	1	239,706,000		300,000,000		26,676,000		10,412,000			-	37,088,000	1	276,794,000	20		21	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi							293,996,000		81,470,500		58,946,000			-	140,416,500		140,416,500	-		-	4	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
	Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Budidaya Ikan dan Pengembangan Peternakan	Tertaksananya penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Budidaya Perikanan di Gununghalu di dan	1	300,000,000	1	315,251,000									-		1	315,251,000	100		105	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pengolahan hasil Perikanan dan Pembangunan Sentra UKM	Tertaksananya Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sentra IKM Pengolahan hasil Perikanan (Pindang) di Kecamatan Chamroesixe dan Bembahutan	2	275,000,000	2	223,073,000									-		2	223,073,000	100		81	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan ESDM	Tertaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian	5	1,325,000,000	3	119,780,000		506,350,000		10,123,687		13,309,500			-	23,433,187	3	143,213,187	60		11	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan pembangunan pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Modal	Tertaksananya Penyusunan Kajian Tentang Kampung Wisata Budaya Selo Balong (Rutawaja, Nampun, Liri, Kac	5	1,475,000,000	1	706,891,000		399,031,800		1,096,500		9,680,000			-	10,776,500	1	717,667,500	20		49	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan pembangunan industri, perdagangan, Koperasi dan UKM	Tertaksana Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penyusunan Kajian Identifikasi UMKM KBB dan	5	1,949,250,000	3	132,915,000		515,785,000		2,600,000		11,026,500			-	13,626,500	3	146,541,500	60		8	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penyusunan Kajian Pasar Tradisional dan Pasar Desa	Tertaksananya penyusunan dokumen perencanaan penataan PKL dan Pedagang Asongan di Desa	1	125,000,000	1	123,599,000									-		1	123,599,000	100		99	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
																					51	41	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
																					ST	ST	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
12	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase dokumen perencanaan pembangunan	100	%	1,160,000,000	1	1,212,921,500		2,029,858,000	5	127,350,000	0	125,200,000	-	0	0	108	252,550,000	108	1,465,471,500	100	108	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
	Penyusunan Masterplan Pendidikan	Tersusunnya dokumen masterplan pendidikan	1	150,000,000	1	141,369,000									-		1	141,369,000	100		94	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi perencanaan bidang perencanaan sosial dan	16	300,000,000	16	255,933,000									-		16	255,933,000	100		85	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terkordinasikannya Program-program Penanggulangan Kemiskinan	1	260,000,000	1	344,872,000									-		1	344,872,000	100		133	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial	Terkordinasikannya Program Perlindungan Sosial Pusat	80	150,000,000	80	71,400,000									-		80	71,400,000	100		46	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Pembangunan Responal Gender	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Responal Gender	1	150,000,000		263,303,500									-			263,303,500	-		176	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial	Terselenggaranya rapat koordinasi untuk mewujudkan	9	150,000,000		136,044,000									-			136,044,000	-		91	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Pemerintah Pusat	menyelenggarakan													-				-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial							784,848,000		108,225,000		56,750,000			-	164,975,000		164,975,000	-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penguatan Lembaga TKPK							100,000,000				33,000,000			-	33,000,000		33,000,000	-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda							200,000,000				24,200,000			-	24,200,000		24,200,000	-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan							200,000,000		19,125,000		11,250,000			-	30,375,000		30,375,000	-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penyusunan Bahan Pengkajian Perencanaan							179,417,000							-				-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penyusunan Bahan Penilaian Perencanaan							350,000,000							-				-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Penyusunan Bahan Penilaian Perencanaan							215,593,000							-				-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
																					31	48	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
																					ST	ST	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
13	PROGRAM PERANCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN	Persentase dokumen perencanaan pembangunan	100	%	558,875,000	27	487,907,332		0	0	0	0	0	0	0	0	23	487,907,332	100	487,907,332	100	87	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Tertaksananya Peningkatan Kelembagaan Pengkajian	21	200,000,000	21	136,274,985									-		21	136,274,985	100		68	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang	terlaksananya koordinasi rencana program SKPD bidang fisik dan tata ruang (d. SKPD)	2	358,875,000	2	351,632,347									-		2	351,632,347	100		98	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
																					100	83	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
																					ST	1	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
14	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang	100	%	2,004,250,000	3	1,559,584,333	0	1,735,000,000	0	283,473,800	1	185,606,500	-	0	0	7	469,080,300	7	2,028,664,633	18	78	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN
	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Tertaksananya Aparatur di Kab. Bandung Barat dalam Penyusunan Perencanaan	35	1,429,250,000	5	1,193,219,833		250,000,000		87,040,000		19,395,500			-	106,435,500	5	1,299,655,333	14		91	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Kajian Penyusunan Pagu Indikat	Tersedianya Pedoman PIKw	1	225,000,000		168,100,000									-			168,100,000	-		75	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Konsep	1	150,000,000	-										-				-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Kajian Kerjasama antar Daerah	Perencanaan Hukum ASN	1	200,000,000		198,264,500									-			198,264,500	-		99	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	
	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan							250,000,000		23,514,050		31,142,000			-	54,656,050		54,656,050	-		-	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PERENCANAAN	

Faktor Pendorong Keberhasilan	
Faktor Penghambat Keberhasilan	
Tindak Lanjut yang diperlukan	
Tindak Lanjut yang diperlukan	

[illegible]

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN KEPEGAWAIAN			0	26,332	83,786,091,700			5,860	14,180,974,678			5,907	8,787,145,800			1,007	1,270,335,268			1,857	1,949,715,611			0	0	0	2,864	3,220,050,876			8,724	17,259,310,554			33,13	20,60			BADAN KEPEGAWAIAN			
DAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN			26,332		83,786,091,700			5,860	14,180,974,678			5,907	8,787,145,800			1,007	1,270,335,268			1,857	1,949,715,611			0	0	0	2,864	3,220,050,876			8,724	17,259,310,554			33,13	20,60			BADAN KEPEGAWAIAN			
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI		100,00	%	9,088,263,000			100,00	%	1,831,090,479			100,00	%	932,198,700			34,88	438,626,415			11,30	154,223,448			-	0	#	0	46,18	592,850,063			29,24	24,230,940,530			29,24	28,60			BADAN KEPEGAWAIAN
		Persentase Kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	51,350,000			12	Bulan	956,625			12	Bulan	7,200,000			3	827,455			3	539,400							18	2,323,680			30,00	4,53			BADAN KEPEGAWAIAN				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	1,433,248,700			12	Bulan	259,363,470			12	Bulan	223,000,700			3	57,993,900			3	60,000,000							18	377,357,370			30,00	26,33			BADAN KEPEGAWAIAN				
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	30	Jenis	411,106,000			4	Jenis	116,000,000			4	Jenis	60,000,000			2	15,450,000			-	25,200,000						6	141,200,000			20,00	34,38			BADAN KEPEGAWAIAN					
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	310	Jenis	1,030,997,500			61	Jenis	192,692,250			59	Jenis	163,790,500			59	161,085,870			-	1,630,000						59	162,715,870			120	355,408,120			38,71	34,47			BADAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan alat tulis kantor	150	Jenis	777,959,800			30	Jenis	126,564,950			14	Jenis	115,473,000			-	113,693,140			-	1,630,000						14	115,323,140			44	241,888,900			29,33	31,09			BADAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan barang cetakan dan pengoperasian	60	Jenis	134,100,000			12	Jenis	19,620,000			12	Jenis	7,055,000			-	4,316,000			-	6						4	4,316,000			18	23,936,000			30,00	17,85			BADAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	30	Jenis	1,349,551,000			10	Jenis	505,025,000			7	Jenis	0			-	-			-	0						10	505,025,000			33,33	37,42			BADAN KEPEGAWAIAN					
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125	Buah	33,125,000			25	Buah	4,625,000			32	Buah	5,000,000			3	1,250,000			-	781,250						28	6,656,250			22,40	20,09			BADAN KEPEGAWAIAN					
		Penyediaan peralatan rumah tangga	15	Jenis	344,031,000			3	Jenis	64,800,000			3	Jenis	58,590,000			1	13,950,000			-	19,530,000						1	33,480,000			26,67	28,57			BADAN KEPEGAWAIAN					
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	110	Keg	688,216,500			22	Keg	124,550,000			22	Keg	86,550,000			3	22,180,000			2	24,280,000						5	46,460,000			27	171,010,000			24,55	24,85			BADAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan makanan dan minuman	285	Keg	2,512,896,500			50	Keg	394,152,972			55	Keg	163,910,500			6	49,896,050			7	63,883,050						7	63,883,050			57	457,836,022			20,00	18,22			BADAN KEPEGAWAIAN	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	160	Keg	137,767,000			5	Keg	2,775,000			25	Keg	13,000,000,000			1	2,600,000			12	7,325,000						18	12,700,000			11,25	9,49			BADAN KEPEGAWAIAN					
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	135	orang	187,914,000			27	orang	19,965,000			27	orang	28,620,000			7	4,500,000			7	5,854,998						14	10,354,998			41	30,319,998			30,37	16,14			BADAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PHS																																				BADAN KEPEGAWAIAN				

NO	Ururan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I (Jan&Mar)		II (Apr&Jun)		III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6*100%	16													
Rata-rata capaian kinerja (%)																26.66	23.34	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	100.00	%	3,627,393,500	100.00	%	411,727,085	100.00	%	273,933,100	30.43	16,262,850	30.43	11,293,551	-	0	0	60.86	27,556,401	32.17	439,283,486	32.17	12.11	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	5	Kegiatan	1,161,746,500	1	Kegiatan	225,015,373	2	Kegiatan	76,900,000	-	-	-	-	-	-	-	1	225,015,373	20.00	19,37	20.00	19.37	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, bahan bakar	110	Kali	2,465,647,000	22	Unit	186,711,712	22	unit	197,033,100	7	16,262,850	7	11,293,551	14	27,556,401	36	214,268,113	32.73	214,268,113	32.73	8.69	8.69	BADAN KEPEGAWAIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																26.36	14.03	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur	100.00	%	1,426,424,500	100.00	%	249,668,250	100.00	%	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20.00	249,668,250	20.00	249,668,250	20.00	17.50	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	325	Orang	741,000,000	65	Orang	129,665,250	65	Orang	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	65	129,665,250	20.00	129,665,250	20.00	17.50	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Terkaitnya Pengadaan Pakaian khusus hari - hari	325	Orang	685,424,500	65	Orang	120,003,000	65	Orang	0	-	-	-	-	-	-	-	65	120,003,000	20.00	120,003,000	20.00	17.51	BADAN KEPEGAWAIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																20.00	17.50	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Persentase peningkatan kinerja aparatur	100.00	%	3,406,680,500	100.00	%	435,877,000	100.00	%	274,800,000	51.81	274,800,000	0	0	0	0	51.81	274,800,000	30.36	710,677,000	30.36	20.86	20.86	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4,080	orang	1,783,213,500	1,030	orang	322,717,000	1,500	orang	274,800,000	800	274,800,000	-	-	-	-	800	274,800,000	1,830	597,517,000	44.85	33.51	33.51	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan	250	orang	1,623,467,000	44	orang	113,160,000	44	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	44	113,160,000	17.60	113,160,000	17.60	6.97	6.97	BADAN KEPEGAWAIAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																31.23	20.24	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi	100.00	%	1,335,107,500	100.00	%	236,184,000	100.00	%	280,910,500	22.22	48,940,000	22.22	88,390,000	-	0	0	44.44	137,330,000	28.89	373,514,000	28.89	27.98	27.98	BADAN KEPEGAWAIAN
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi	20	Laporan	419,930,000	4	Laporan	71,000,000	4	Laporan	91,310,000	2	21,890,000	-	32,740,000	-	2	54,630,000	6	125,630,000	30.00	125,630,000	30.00	29.92	29.92	BADAN KEPEGAWAIAN
		Penyusunan laporan keuangan	10	Laporan	261,000,000	2	Laporan	42,200,000	2	Laporan	50,050,000	-	-	-	16,100,000	-	-	16,100,000	2	58,300,000	20.00	58,300,000	20.00	22.34	22.34	BADAN KEPEGAWAIAN
		Penatausahaan Keuangan	60	Laporan	654,177,500	12	Laporan	122,984,000	12	Laporan	139,550,500	3	27,050,000	3	39,550,000	6	66,600,000	18	189,584,000	30.00	189,584,000	30.00	26.98	26.98	BADAN KEPEGAWAIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																26.67	27.08	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase Dokumen Perencanaan dan	100.00	%	401,480,000	100.00	%	94,936,000	100.00	%	106,120,000	16.67	12,020,000	16.67	9,020,000	-	0	0	33.34	21,040,000	26.67	115,976,000	26.67	23.65	23.65	BADAN KEPEGAWAIAN
		Penyusunan Perencanaan dan Pencapaian RKPD	30	Dokumen	401,480,000	6	Dokumen	94,936,000	6	Dokumen	106,120,000	1	12,020,000	1	9,020,000	2	21,040,000	8	115,976,000	26.67	115,976,000	26.67	28.89	28.89	BADAN KEPEGAWAIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																26.67	28.89	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Aparatur yang Seleksi Penerimaan Calon PNS	80.00	%	22,518,122,500	51.70	%	4,020,865,326	65	%	3,033,337,500	5.42	234,840,000	1.40	1,418,958,412	-	0	0	6.82	1,653,798,412	11.70	5,674,663,738	14.63	21.70	21.70	BADAN KEPEGAWAIAN
		Seleksi Penerimaan Calon PNS	5	Kegiatan	2,111,863,200	1	Kegiatan	262,409,200	1	Kegiatan	1,429,475,000	1	-	-	1,038,843,412	1	1,038,843,412	2	1,301,252,612	40.00	1,301,252,612	40.00	61.62	61.62	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Penempatan PNS dalam jabatan Struktural dan	15	Kegiatan	668,400,000	6	Kegiatan	107,075,000	3	Kegiatan	53,950,000	-	20,750,000	1	-	1	20,750,000	7	127,825,000	46.67	127,825,000	46.67	19.12	19.12	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi	100	Persen	1,996,927,000	70	Persen	332,288,300	70	Persen	135,737,500	15	13,000,000	15	59,625,000	30	72,625,000	90	404,913,300	90.00	404,913,300	90.00	20.28	20.28	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	825	Orang	2,179,582,000	110	Orang	335,472,000	165	Orang	173,700,000	-	12,700,000	-	13,000,000	-	25,700,000	110	361,172,000	13.33	361,172,000	13.33	16.57	16.57	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Istirahat Dinas	35	Orang	588,550,000	4	Orang	51,460,200	7	Orang	-	-	-	-	-	-	4	51,460,200	11.43	51,460,200	11.43	8.74	8.74	BADAN KEPEGAWAIAN		
		Penyenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan	2,499	Orang	6,218,913,200	357	Orang	777,260,500	460	Orang	656,440,000	50	166,300,000	50	45,890,000	50	212,190,000	407	989,450,500	16.29	989,450,500	16.29	15.91	15.91	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Pengembangan Diklat Analisis Kebutuhan Diklat	5	Dokumen	2,138,717,200	1	Dokumen	187,359,000	1	Dokumen	210,725,000	-	15,590,000	-	33,005,000	-	48,595,000	1	235,954,000	20.00	235,954,000	20.00	11.03	11.03	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Seleksi Perpindahan Pegawai Mousik dan Jalur Kebutuhan	400	Orang	1,063,209,800	91	Orang	175,109,500	80	Orang	46,650,000	-	6,500,000	-	17,400,000	-	23,900,000	91	199,009,500	22.75	199,009,500	22.75	18.72	18.72	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dendau	5	Kegiatan	1,575,009,500	0	Kegiatan	80,703,626	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	0	80,703,626	0.00	80,703,626	0.00	5.12	5.12	BADAN KEPEGAWAIAN		
		Penilaian Kompetensi/Assesment	15	Kegiatan	3,976,950,000	3	Kegiatan	1,711,728,000	3	Kegiatan	326,660,000	-	-	1	211,195,000	1	211,195,000	4	1,922,923,000	26.67	1,922,923,000	26.67	48.35	48.35	BADAN KEPEGAWAIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																28.71	22.55	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Aparatur yang Seleksi Penerimaan Calon PNS		80.00	%	2,190,636,000	71.43	%	487,524,000	65.00	%	149,628,000	25.00	41,245,000	25.00	39,965,000	-	59.89	81,210,000	24.29	568,734,000	30.36	568,734,000	30.36	25.97	25.97	BADAN KEPEGAWAIAN
		Proses Penanganan Kasus	30	Kasus	1,007,114,000	4	Kasus	204,540,000	7	Kasus	100,210,000	0	27,545,000	0	28,285,000	0	55,810,000	4	260,350,000	13.33	260,350,000	13.33	25.85	25.85	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Monitoring, evaluasi dan	60	Bulan	1,182,922,000	12	Bulan	282,984,000	12	Bulan	48,810,000	3	13,700,000	3	11,700,000	6	25,400,000	18	308,384,000	30.00	308,384,000	30.00	26.07	26.07	BADAN KEPEGAWAIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																21.67	25.96	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Penyelesaian		90.00	%	9,230,132,350	101.14	%	1,724,839,860	82.50	%	761,140,000	0	162,035,000	58.36	191,685,000	-	58.36	202,005,000	31.90	1,926,944,800	35.44	1,926,944,800	35.44	20.88	20.88	BADAN KEPEGAWAIAN
		Penataan Sistem Administrasi Kewilayah Pangkat	10,000	Surat Keputusan	3,067,838,000	2,355	Surat Keputusan	608,326,500	2,000	Surat Keputusan	326,030,000	0	88,355,000	1,624	89,560,000	1,624	177,915,000	3,979	786,241,500	39.79	786,241,500	39.79	25.63	25.63	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Kegiatan Proses Penunns PNS	2,500	Orang	934,116,500	808	Orang	171,744,500	500	Orang	60,295,000	0	13,580,000	165	10,510,000	165	24,090,000	973	195,834,500	38.92	195,834,500	38.92	20.96	20.96	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	1	Dokumen	1,322,365,000	1	Dokumen	443,388,700	1	Dokumen	240,550,000	-	37,600,000	-	63,350,000	-	100,950,000	1	544,338,700	20.00	544,338,700	20.00	41.16	41.16	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Tata Laksana Administrasi Kewilayah	10	Kegiatan	1,510,338,500	2	Kegiatan	144,954,500	2	Kegiatan	40,450,000	-	6,000,000	-	13,450,000	-	19,450,000	2	164,404,500	20.00	164,404,500	20.00	10.89	10.89	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Penyusunan Instrumen Analisis Kebutuhan Pegawai	5	Instrumen	1,029,374,350	1	Instrumen	146,827,350	1	Instrumen	51,565,000	-	1,815,000	-	1,815,000	-	1,815,000	1	148,642,350	20.00	148,642,350	20.00	14.44	14.44	BADAN KEPEGAWAIAN	
		Pengelolaan, Pemeliharaan Dokumen dan Arsip	100	Persen	1,366,100,000	5	Persen	209,698,250	25	Persen	42,250,000	-	6,500,000	-	13,000,000	-	19,500,000	5	229,198,250	5.00	229,198,250	5.00	16.78	16.78	BADAN KEPEGAWAIAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																23.95	21.64	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								
8	PROGRAM FASILITASI PINDAH-PURNA TUGAS	Persentase ASN terfasilitasi pindah/purna tugas	100	%	2,781,960,250	100	%	310,059,250	100	%	0	0	-	-	-	-	-	-	20.00	310,059,250	20.00	310,059,250	20.00	11.15	11.15	BADAN KEPEGAWAIAN
		Pembekalan Masa Persiapan Pensiun	800	Orang	2,781,960,250	120	Orang	310,059,250	120	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	120	310,059,250	15.00	310,059,250	15.00	11.15	11.15	BADAN KEPEGAWAIAN
Rata-rata capaian kinerja (%)																15.00	11.15	BADAN KEPEGAWAIAN								
Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2023 (sd akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dari Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2020 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD SD Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana															
1	4	5	6		7		8		I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III		IV		13	14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16																
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																	
9	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase ASN yang mengikuti diklat	80	%	27.780.491,600	62,04	%	4.378.103,500	65	%	2.845.686,000	3,38		51.566,000	0,44		36.180,000	-	0	0	3,82		87.746,000	13,17	4.465.849,500	16,47	16,08	BADAN KEPEGAWAIAN										
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	1.543	Orang	16.090.027,000	262	Orang	2.155.878,000	320	Orang	2.713.556,000	23		51.566,000	-		4.565,000			23		56.131,000	285	2.212.009,000	18,47	13,75	BADAN KEPEGAWAIAN											
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS	350	Orang	9.347.353,000	67	Orang	1.850.211,500	68	Orang	62.565,000	-		-	-		-			67		1.850.211,500	19,14	1.850.211,500	19,14	19,79	BADAN KEPEGAWAIAN											
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi	Tertindakannya pengiriman peserta diklat teknis tugas dan fungsi bagi	280	Orang	2.343.111,600	66	Orang	372.014,000	54	Orang	69.565,000	-		-	3		31.615,000			3		31.615,000	69	403.629,000	24,64	17,23	BADAN KEPEGAWAIAN											
																				Rata-rata capaian kinerja (%)																20,75	16,92	BADAN KEPEGAWAIAN
																				Predikat kinerja																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN
																																						BADAN KEPEGAWAIAN
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM																22,31	19,11	BADAN KEPEGAWAIAN
																																						BADAN KEPEGAWAIAN
																				PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM																SR	SR	BADAN KEPEGAWAIAN

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan

Pada tahun 2019, urusan pendidikan mendapat alokasi anggaran Rp 327.251.916.871.00 terealisasi sebesar Rp 302.321.455.957.00 atau 92.38 %. Program dan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun permasalahan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak satuan pendidikan baru yang belum terdaftar di Dapodik;
2. Proses perijinan untuk satuan pendidikan swasta dianggap terlalu mahal;
3. Banyaknya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah naungan Sekolah Negeri belum mendapatkan NUPTK;
4. Alat peraga/media APE untuk PAUD belum memadai terutama terkait dengan kuantitasnya;
5. Ketercapaian mutu hasil belajar siswa kurang memuaskan, hal ini disebabkan oleh kurangnya guru yang memiliki standar kualifikasi dan kompetensi yang handal;
6. Standarisasi pengelolaan dana BOS di tingkat SD dan SMP masih sangat rumit yaitu pada sisi penggunaan dan pengelolaan yang sudah diikat oleh sebuah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan BOS;
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga nilai SPM bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bandung Barat tergolong rendah;
8. Kurang memadainya fasilitas dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang SMP, sehingga masih banyak sekolah meminjam fasilitas dari sekolah jenjang SMA/K untuk menyelenggarakan UNBK;
9. Masih kurangnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, khususnya sebagai solusi bagi anak putus sekolah yang akan

berdampak pada angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah Kabupaten Bandung Barat;

10. Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru PNS belum merata sehingga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah guru dengan siswa di sebagian sekolah.

Kesehatan

Urusan bidang kesehatan pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 279.996.099.358.00 dengan reasliasi Rp 222.037.029.587.00 atau 79.30 %. Program uruasan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun permasalahan urusan kesehatan sebagai berikut:

1. Koordinasi lintas sektor dan program belum optimal, dampaknya kegiatan tidak dihadiri oleh decision maker / pengambil kebijakan.
2. Pemegang BPJS Mandiri banyak yang DO dan sebagian kecil pindah Faskes lain karena tidak mau antri dengan alasan ruangan sempit.
3. Masih terbatasnya kemampuan petugas Puskesmas dalam bidang IT.
4. Kesalahan kode belanja sehingga ada kegiatan yang tidak dapat di realisasikan.
5. Masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan kepesertaan BPJS.
6. Penyerapan dana kapitasi belum 100% (Silpa anggaran 2018 mencapai 09,08 dari total anggaran)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2019 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 264.697.040.097.00 dengan realisasi 170.155.283.367.00 atau 64.28 %. Program dan kegiatan pekerjaan umum di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Perhubungan. Adapun permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Terjadinya efisiensi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyebabkan realisasi anggaran dan kinerja tidak tercapai dari target yang telah ditentukan.
2. Terlambatnya proses pencairan keuangan yang berdampak kepada realisasi anggaran dinas yang mengakibatkan realisasi keuangan dan kinerja tidak terealisasi.
3. Untuk Permasalahan pembangunan infrastruktur yang berkenaan dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang seperti Jalan, Pelayanan Air minum serta fasilitas publik antara lain : Pada Jalan di tahun 2019 permasalahan utama adalah beberapa ruas jalan kabupaten drainase dan gorong-gorong pada badan jalan belum optimal yang mengakibatkan kerusakan pada badan jalan dan terjadinya bencana alam pada beberapa ruas jalan kabupaten yang berakibat pada kerusakan badan jalan. Pada pelayanan air minum permasalahan yaitu izin pemberian lahan untuk sumber air (mata air) yang mengakibatkan sumber air (mata air) tidak bisa digunakan dan izin jalur untuk pipa SPAM dipermasalahkan oleh warga sekitar dan kurang tersedianya lahan untuk dijadikan reservoir (bak penampung air). Pembangunan fasilitas publik yaitu kurang tersedianya lahan untuk proses pembangunan fasilitas publik.

Perumahan dan Pemukiman.

Pada tahun 2019 urusan perumahan dan permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 86.557.995.901.00 dengan realisasi Rp. 80.544.469.956.00 atau 93.05 %. Adapun permasalahan urusan Perumahan dan Pemukiman sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan permukiman di wilayah kabupaten Bandung Barat yang tersebar di 165 Desa yang belum tertangani antara lain Pembangunan Jalan Setapak (jalan Gang), Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase, Pembangunan TPT, dan Pembangunan Penerangan Jalan;

2. Belum terciptanya Rekapitulasi dan administrasi pencatatan lahan pemakaman atau TPU yang baik serta pengelolaan TPU yang belum maksimal.

Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pada tahun 2019 urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 33.647.264.700.00 dengan realisasi Rp 25.542.113.882.00 atau 75.91 %. Program dan kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di laksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun permasalahan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

1. Kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga kurangnya koordinasi dan komunikasi antara daerah.
2. Permasalahan terkait pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di tingkat Kabupaten Bandung Barat.
3. Pemberdayaan Ormas, Pembentukan Forum pembauran Kebangsaan dan Pembentukan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPPWK) di Kabupaten Bandung Barat.
4. Netralitas ASN dalam PILEG dan PILPRES Tahun 2019 dan partisipasi pemilih pada PILEG dan PILPRES Tahun 2019.
5. Permasalahan berkenaan dengan pemahaman Undang-undang Pemilu bagi Caleg DPRD KBB.
6. Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang bantuan Keuangan Parpol.
7. Pemantauan PILEG dan PILPRES Tahun 2019.

Urusan Sosial

Pada tahun 2019 urusan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13.122.083.547.00 dengan realisasi Rp 12.852.754.970.00 atau 97.95 %. Program dan kegiatan urusan Sosial di laksanakan oleh Dinas Sosial. Adapun permasalahan urusan sosial sebagai berikut :

1. Penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya kurang memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka;
2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya Fakir Miskin pada umumnya selain kurang memiliki motivasi untuk berusaha mereka juga tidak memiliki aksesibilitas untuk menjangkau sistem sumber daya yang ada;
3. Masih banyak Penyandang Disabilitas yang menggantungkan hidupnya kepada pihak lain baik secara ekonomi maupun sosial;
4. Penyandang masalah kesejahteraan sosial eks Penyandang Penyakit Sosial pada umumnya mereka sulit kembali ke masyarakat dan hidup sebagaimana warga masyarakat pada umumnya.

5.3.2 Permasalahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Pada tahun 2019 urusan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.672.024.138.00 dengan realisasi Rp. 9.546.952.650.00 atau 98.71 %. Program dan kegiatan urusan Tenaga Kerja di laksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Adapun permasalahan urusan tenaga kerja sebagai berikut :

1. Permasalahan berkenaan dengan ketenagakerjaan di Kab. Bandung Barat adalah kurangnya keterampilan bagi pencari kerja, sehingga tidak mampu bekerja di bidang Formal maupun Informal;
2. Permasalahan berkenaan dengan SDM tenaga kerja dan kesempatan kerja diantaranya adalah masih kurang mampu bersaing tenaga kerja

lokal dengan tenaga kerja dari luar daerah, sehingga para pencari kerja membutuhkan pelatihan yang dapat menambah keterampilannya.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2019 urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.150.747.800.00 dengan realisasi Rp. 3.112.553.922.00 atau 98.79 %. Program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung Barat tercatat tahun 2019 s.d bulan Desember 2019 sebanyak 22 Kasus.
2. Belum ada data terpilah gender dan anak.
3. Kompetensi SDM yang menangani tentang penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak masih kurang.
4. Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak hanya ditangani oleh satu bidang.

Pangan

Pada tahun 2019 urusan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.191.225.100.00 dengan realisasi Rp. 1.041.628.150.00 atau 47.54 %. Program dan kegiatan urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Masih adanya Rawan pangan di desa, yang menyebabkan masih adanya penderita kekurangan gizi.
2. Tingkat Konsumsi energi yang tinggi.

Pertanahan

Pada tahun 2019 urusan Pertanahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 574.927.000.00 dengan realisasi Rp. 534.401.500.00 atau 92.95 %. Program dan kegiatan urusan Pertanahan di laksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum tercapai dengan maksimal dikarenakan anggaran dan sarana serta prasarana yang kurang memadai sehingga mengakibatkan keterbatasan SDM dalam melakukan kegiatan, terutama kegiatan di luar kantor pemda, seperti pengelolaan dan pengendalian RT di batas kota dan kecamatan – kecamatan.

Lingkungan Hidup

Pada tahun 2019 urusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.950.522.850.00 dengan realisasi Rp 22.472.605.782.00 atau 86.60 %. Program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup di laksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji pemantauan IPAL industri, dari 19 yang dipantau ternyata hanya 5 IPAL industri yang memenuhi baku mutu.
2. Pada tahun 2019 dikarenakan banyak *event* serta untuk menunjang agenda Citarum Harum yang memerlukan pengangkutan sampah maka skema pengangkutan sampah rutin menjadi terganggu.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tahun 2019 urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.729.309.000.00 dengan realisasi Rp. 10.592.238.042.00 atau 83.21%. Program dan kegiatan urusan Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai terutama Pegawai Negeri Sipil dan Masih perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan di dinas kurang memadai dikarenakan banyak nya peralatan dan perlengkapan yang sudah lama dan sering rusak.
3. Kelembagaan
 - a. Elemen data masih banyak yang tidak sesuai dengan pengakuan pemegang (pemilik) ketika diminta data pendukung berupa Ijazah, surat nikah, data tersebut tidak sama (nama singkat, gol darah, tanggal lahir, pekerjaan) pada proses pendaftaran, yang bersangkutan tidak memberikan data yang akurat;
 - b. Pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran masih rendah;
 - c. Banyak penduduk yang melakukan Nikah Agama (SIRI).
 - d. Masih banyak nya target pencetakan data PRR (print ready record) yang belum selesai.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2019 urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 12.070.034.000.00 dengan realisasi Rp 11.711.311.036.00 atau 97.03%. Program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di laksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Pergantian pengurus BUMDes diganti apabila terpilihnya Kepala Desa baru.

2. Usaha yang dilakukan oleh BUMDes tidak melalui proses perencanaan dan kajian sehingga resiko kegagalan usaha sangat besar.
3. Sering terjadi perubahan informasi secara mendadak, baik dari pihak intern terkait waktu pencairan anggaran dan perubahan informasi dari ekstern terkait tempat, narasumber dan peserta sehingga menghambat dari tahapan yang telah direncanakan.
4. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam pembangunan sarana prasarana desa.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana desa,
6. Ketimpangan taraf hidup antara gender karena adanya diprioritaskan upah yang menyebabkan perbedaan daya beli masyarakat.
7. Perlunya kesetaraan taraf hidup antar gender untuk dicapai melalui pendidikan.
8. Terjadinya keterlambatan penyampaian laporan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.
9. Terjadinya keterlambatan penetapan Perdes APBDes oleh Pemerintah Desa yang disebabkan adanya keterlambatan pagu indikator yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada desa-desa.
10. Belum seluruhnya pemerintah desa sadar akan pendataan / inventarisasi mengenai aset desa sehingga tidak tercatat di dalam buku inventaris desa ataupun aplikasi SIPADes.
11. Terjadinya konflik internal antar para calon kepala desa dan ada calon kepala desa yang tidak merasa puas atas hasil Pilkades yang telah ditetapkan oleh panitia Pilkades.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2019 urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.472.073.000.00 dengan realisasi Rp.

12.425.489.471.00 atau 99.63 %. Program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Pelayanan era Jaminan Kesehatan Nasional / BPJS yang belum optimal, dikarenakan banyak yg belum mengerti mengenai regulasinya dan banyaknya warga miskin yang belum terjamin JKN atau belum ikut anggota BPJS.
2. Kurangnya materi tentang Kesehatan Reproduksi sebagai bahan untuk melakukan promosi dan konseling tentang Kesehatan Reproduksi yang bisa dilakukan di Fasilitas Kesehatan (Faskes), Kelompok Kegiatan (Poktan), Masyarakat dan Sekolah atau di Lembaga Pendidikan.
3. Belum adanya sistem (aplikasi) pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi (R/R Klinik Online).
4. Kurangnya pemahaman tentang 1000 Hari Paska Kelahiran (HPK) dan pemahaman masyarakat tentang kondisi rentan yang dialami oleh lansia.

Urusan Perhubungan

Pada tahun 2019 urusan Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 15.994.080.000.00 dengan realisasi Rp 15.994.080.000.00 atau 100 %. Program dan kegiatan urusan Perhubungan di laksanakan oleh Dinas Perhubungan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Kabupaten Bandung Barat di tahun 2019 melakukan efisiensi Anggaran, sehingga banyak program dan kegiatan di Dinas Perhubungan yang tidak optimal dalam pelaksanaannya.
2. Berdasarkan data penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa trayek yang sudah tidak beroperasi, sehingga terdapat ketidakcocokan antara data eksisting dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 550/Kep.5-Dishub/2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

3. Pendapatan Asli Daerah seperti Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target disebabkan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan memiliki Alat Uji Kendaraan bermotor sebanyak 2 line, tetapi hanya terealisasi 1 line karena keterbatasan Anggaran. Sedangkan target PAD masih 2 line.

Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2019 urusan Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.127.905.272.00 dengan realisasi Rp. 5.111.281.322.00 atau 99.68 %. Program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika di laksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam rangka penerapanan dan pengembangan e-Government di Lingkungan Pemkab Bandung Barat, masih terdapat kendala diantaranya:
 - a. Belum seluruhnya Perangkat Daerah memahami proses bisnis dari aplikasi yang telah dibuat atau sedang dikembangkan.
 - b. Dalam rangka implementasi layanan aplikasi terutama layanan perijinan online, aplikasi e-presisi dan e-kinerja diperlukan spesifikasi server yang mencukupi, dalam hal ini server yang dimiliki oleh Diskominfo belum mendukung untuk implementasi aplikasi dengan baik.
 - c. Keterbatasan tenaga ahli IT di Diskominfo (Hanya 3 orang Programmer) dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan aplikasi belum mencukupi untuk rencana pengembangan aplikasi selanjutnya.
2. Belum adanya layanan internet di ruang publik dan Fasilitasi internet kecamatan dengan layanan akses point masih terdapat adanya kendala dalam pengoperasiannya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan layanan pengaduan dari masyarakat melalui WA 08118071112 dan melalui aplikasi quickresponse.bandungbaratkab.go.id karena masih sebatas menerima

pengaduan tanpa adanya tindak lanjut dari perangkat daerah yang bersangkutan sesuai dengan pengaduan yang ada.

4. Belum terkoreksinya seluruh media yang bekerjasama dengan organisasi KBB dan Belum terkoordinasinya pemberitaan dengan perangkat daerah.
5. Masih belum melaksanakan urusan persandian yang menjadi kewenangan Diskominfo dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi karena belum adanya nomenklatur untuk melaksanakan urusan persandian dan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan urusan persandian, keterbatasan SDM pengelola keamanan informasi, belum memiliki alat pendukung persandian serta tidak adanya tenaga fungsional Sandiman.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2019 urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.182.583.823.00 dengan realisasi Rp. 5.954.433.098.00 atau 96.31 %. Program dan kegiatan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di laksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Sarana, prasarana dan akses permodalan yang masih terbatas dalam memfasilitasi para pelaku usaha umkm dan pengawasan koperasi.
2. Masih perlunya fasilitasi pemasaran produk-produk umkm bandung barat.
3. Masih rendahnya sumber daya manusia para pelaku usaha.

Penanaman Modal

Pada tahun 2019 urusan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.789.673.000.00 dengan realisasi Rp 5.249.573.617.00 atau 90.67 %. Program dan kegiatan urusan Penanaman Modal di laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan penanaman modal di kabupaten menjadi berkurang.
2. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang merupakan paradigma baru dalam pelayanan perizinan sehingga diperlukan penyesuaian baik dari sisi kebijakan, sumberdaya manusia, dan infrastruktur.
3. Sinergitas antar lembaga dalam proses pelayanan perizinan belum optimal.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi perizinan, masih ada pola pikir bahwa melengkapi/tertib izin itu adalah kebutuhan belum merupakan suatu kewajiban.
5. Rendahnya pelaporan perusahaan dalam menyampaikan LKPM.
6. Belum tersedianya tempat yang representatif untuk mewujudkan seluruh pelayanan pemerintah daerah dalam satu tempat.
7. Belum meratanya penyebaran infrastuktur yang mendukung pengembangan investasi.
8. Kurangnya tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dalam pelayanan penanaman modal karena rendahnya minat PNS untuk berkarir di DPMPTSP.

Kepemudaan dan Olah Raga

Pada tahun 2019 urusan Kepemudaan dan Olah Raga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 33.534.239.450.00 dengan realisasi Rp 19.881.904.148.00 atau 59.29 %. Program dan kegiatan urusan Kepemudaan dan Olah Raga di laksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Sekretariat daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Anggaran belum mendukung untuk kegiatan pemuda khususnya untuk pelatihan kewirausahaan dan belum tercapainya pemberian alat keterampilan;
2. Pemerintah daerah belum memiliki gelanggang/balai remaja;
3. Belum adanya Pusat Pengembangan Latihan Pelajar Daerah ;
4. Anggaran DAK tidak dapat terealisasi untuk pembangunan Sarana Olahraga tipe B karena lokasi untuk pembangunan Sarana Olahraga tidak memenuhi persyaratan.

Urusan Statistik

Pada tahun 2019 urusan Statistikmendapat alokasi anggaran sebesar Rp 991.735.000.00 dengan realisasi Rp 982.359.259.00 atau 99.05 %. Program dan kegiatan urusan Statistik di laksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Dengan telah ditetapkannya Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terdapat beberapa kendala terkait tata kelola data di Kab. Bandung Barat :
 - a. Bahwa Data statistik yang dikumpulkan harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia terkait data harus memenuhi standar data, harus memiliki metadata, harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan harus menggunakan Kode Referensi;
 - b. Belum adanya penentuan Data Prioritas yaitu Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data;
 - c. Bahwa sesuai Perpres 39 tahun 2019 bahwa Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
2. Belum adanya regulasi yang mengatur secara teknis terkait penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Kabupaten Bandung Barat.

3. Dalam rangka integrasi dan publikasi data masih secara manual belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi.

Kebudayaan

Pada tahun 2019 urusan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.981.147.850.00 dengan realisasi Rp 2.918.685.162.00 atau 97.90 %. Program dan kegiatan urusan Kebudayaan di laksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi.
2. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah semakin terancam keberadaannya
3. Belum tersedianya gedung kesenian representatif untuk pementasan
4. Memudarnya semangat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal.

Kearsipan

Pada tahun 2019 urusan Kearsipanmendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.367.775.500.00 dengan realisasi Rp. 1.561.600.085.00 atau 65.95 %. Program dan kegiatan urusan Kearsipan di laksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan.
2. Masih kurangnya sumber daya manusia seperti tenaga arsiparis, tenaga teknis dan tenaga ahli, baik itu di lingkungan SKPD, kecamatan, desa dan sekolah.

Permasalahan Urusan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2019 urusan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.619.576.300.00 dengan realisasi Rp 6.460.765.361.00 atau 97.60 %. Program dan kegiatan urusan Kelautan dan Perikanan di laksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Program Nasional Citarum Harum berdampak pada penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di wilayah Cirata dan Saguling sehingga banyak kelompok tani ikan yang akan kehilangan mata pencaharian dan menurunnya produksi ikan.
2. Tingginya harga pakan masih menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi biaya produksi baik di sektor perikanan maupun peternakan, sehingga pendapatan pembudidaya ikan dan peternak masih rendah.

Urusan Pariwisata

Pada tahun 2019 urusan Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.725.574.450.00 dengan realisasi Rp. 8.341.126.269.00 atau 95.59 %. Program dan kegiatan urusan Pariwisata di laksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Kecenderungan Trend Perubahan Minat Kunjungan Wisata Ke Arah (Berorientasi) Pada Minat Khusus (Wisata Pedesaan, Ekowisata Dan Agrowisata).
2. Bertambahnya Inovasi Dan Kreatifitas Atraksi Destinasi Wisata Di Luar Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Tingkat persaingan antar daerah dalam menawarkan produk wisata yang tinggi.

Urusan Pertanian

Pada tahun 2019 urusan Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 54.245.578.649.00 dengan realisasi Rp. 47.962.675.638.93 atau 88.42 %. Program dan kegiatan urusan Pertanian di dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan hewan, dan melakukan respon cepat terhadap kejadian kasus penyakit.
2. Penambahan petugas Penyuluh/Petugas Lapang minimal satu kecamatan satu Penyuluh/Petugas. Peningkatan Pengetahuan Sikap dan keterampilan peternak dengan cara meningkatkan kualitas ternak dan membuat kelompok percontohan dibidang peternakan selain sapi perah. Melaksanakan bimtek peternakan, demplot dan SL.

Perdagangan

Pada tahun 2019 urusan Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.932.839.549.00 dengan realisasi Rp. 5.970.714.653.00 atau 86.12 %. Program dan kegiatan urusan Perdagangan di dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua toko modern memiliki IUTM tetapi sudah beroperasi.

Urusan Perindustrian

Pada tahun 2019 urusan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.161.744.826.00 dengan realisasi Rp. 6.984.074.565.00 atau 97.52 %. Program dan kegiatan urusan Perindustrian di dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sentra Industri memerlukan lahan yang cukup luas (minimum 5000 m²) serta pendanaan dan komitmen yang kuat dari pelaku industri.

Transmigrasi

Pada tahun 2019 urusan Transmigrasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 250.755.000.00 dengan realisasi Rp. 250.755.000.00 atau 100 %. Program dan kegiatan urusan Transmigrasi di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Kurang siapnya daerah penempatan untuk penempatan transmigrasi;
2. Masih tumpang tindih hak tanah yang akan di tempati daerah trasmigrasi;
3. Sudah Semakin berkurangnya tanah yang akan dibuka untuk penempatan transmigrasi.

5.3.6 Permasalahan Urusan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan

Pada tahun 2019 urusan Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 123.916.584.260.00 dengan realisasi Rp. 120.439.368.409.00 atau 97.19 %. Program dan kegiatan urusan Administrasi Pemerintahan di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Masih sulitnya Bagian-bagian dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana dan Laporan.
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pengawasan

Pada tahun 2019 urusan Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.074.100.800.00 dengan realisasi Rp. 7.022.271.353.00 atau 99.27 %. Program dan kegiatan urusan Pengawasan di laksanakan oleh Inspektorat Daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum sesuai dengan Kompetensi dan kebutuhan.
2. Ketidaktepatan waktu pengumpulan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah dan Penginputan di Aplikasi ESR.

Perencanaan

Pada tahun 2019 urusan Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.756.118.500.00 dengan realisasi Rp. 14.637.121.772.00 atau 92.90 %. Program dan kegiatan urusan Perencanaan di laksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurang optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia yaitu fungsional perencana sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan perencanaan;
2. Belum terwujudnya sinergitas secara optimal antar bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsi bappeda diantaranya fasilitasi dan koordinasi perencanaan perangkat daerah mitra masing-masing bidang perencanaan terhadap usulan kegiatan pada renja perangkat daerah dan usulan hasil Musrenbang Kecamatan.

Urusan Keuangan

Pada tahun 2019 urusan Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 47.022.683.349.00 dengan realisasi Rp. 41.201.759.526.00 atau 87.62 %. Program dan kegiatan urusan Keuangan di laksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM untuk melakukan pendataan wajib pajak dan analisis pajak.
2. Masing kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
3. Belum terintegrasinya Simpad dengan sistem pelaporan keuangan.

4. Menu tampilan dan rumusan perhitungan nilai perhitungan air (NPA) belum sempurna.
5. Penatausahaan pendapatan dan piutang pajak daerah (non PBB) dan penatausahaan PBB-2 belum memadai.
6. Penatausahaan dan pengelolaan asset tetap dan aset lainnya belum memadai.

Urusan Kepegawaian

Pada tahun 2019 urusan Kepegawaian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 12.659.391.250.00 dengan realisasi Rp 11.598.096.385.00 atau 91.62 %. Program dan kegiatan urusan Kepegawaian di laksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia . Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan SKPD di Lingkungan KBB mengenai peraturan-peraturan daerah dan penerangan hukum yang disosialisasikan.
2. Pemahaman dan komitmen tentang Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata.
3. Kurangnya kesadaran perangkat daerah terhadap pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat yang diamanatkan sesuai dengan PERMENPAN RB.
4. Kurangnya personil Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2019 urusan Pendidikan dan Pelatihan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.503.322.500.00 dengan realisasi Rp 4.480.134.500.00 atau 99.49 %. Program dan kegiatan urusan Pendidikan dan Pelatihan di laksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia . Adapun permasalahan sebagai berikut :



-
1. Belum ditetapkannya regulasi pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat, sehingga berdampak pada belum optimalnya Anggaran di Kecamatan.

Penelitian dan Pengembangan

Pada tahun 2019 urusan penelitian dan pengembangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.421.191.500.00 dengan realisasi Rp 1.319.600.850.00 atau 92.85 %.

1. Belum maksimalnya sosialisasi hasil rencana induk kelitbangan Bandung Barat.

Belum adanya fungsional peneliti sehingga penyusunan kajian-kajian masih bekerja sama dengan pihak luar dari Bappelitbangda



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,05 persen. Selama periode 2017-2019, perekonomian Kabupaten Bandung Barat terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya di atas 5 persen. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian di Kabupaten Bandung Barat sudah mempunyai pondasi ekonomi yang cukup kuat dan tentunya merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Secara sektoral sektor industri masih merupakan *leading* perekonomian di Kabupaten Bandung Barat yang mampu memberikan kontribusi sebesar 39,96 persen. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,58 persen selanjutnya sektor pertanian, perhutanan, perikanan sebesar 13,41 persen. Pada dasarnya Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Sehubungan dengan hal tersebut tepat kiranya jika telah ditetapkan salah satu misi untuk memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agrowisata.

Sebagai Kabupaten yang masih belia Kabupaten Bandung Barat harus terus berupaya agar pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai tidak hanya dari sisi pertumbuhannya saja, namun satu hal yang tak kalah pentingnya adalah dari sisi pemerataan. Diakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Diantaranya adalah faktor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana, faktor infrastruktur, faktor iklim kerja dan investasi dan sebagainya.

Pencapaian pembangunan perekonomian Kabupaten Bandung Barat hingga tahun 2019 harus terus berkelanjutan. Berbagai permasalahan yang masih

banyak tersisa harus segera diatasi. Perekonomian Bandung Barat pada tahun 2020 sedang menghadapi tekanan besar dalam sisi ekonomi karena dampak pandemi Covid-19. Tidak hanya dalam lingkup Kabupaten Bandung Barat saja melainkan dampak pandemi Covid-19 ini menyebabkan tekanan terhadap ekonomi global dan sosial. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional. Sehingga dibutuhkan segera percepatan pemulihan ekonomi dalam berbagai sektor. Fokus pembangunan tidak hanya Ringkasan Eksekutif.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bandung Barat

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha peningkatan produktifitas melalui proses produksi dengan cara pemanfaatan sumber daya potensial yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya ekonominya secara optimal guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan disamping indikator makro lainnya, seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kestabilan harga (*price stability*).

Pembangunan bidang ekonomi menjadi salah satu prioritas negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian adalah terciptanya kondisi makroekonomi yang kuat dengan terkendalinya

stabilitas ekonomi, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp. 47.180,08 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,7 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 43.807,71 milyar. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, PDRB mengalami peningkatan sebesar 5.05 persen, yaitu dari Rp 29.888,89 milyar di tahun 2018 menjadi Rp. 31.398,35 milyar pada tahun 2019. Besaran pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2017 – 2019 terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 – 2019 (milyar Rp)

Tahun	PDRB Adh. Berlaku	PDRB Adh. Konstan
(1)	(2)	(3)
2017	40.204,4	28.330,02
2018*	43.807,71	29.888,89
2019**	47.180,08	31.398,35

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat 2019

Secara umum pembentukan nilai tambah bruto tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Kelompok sektor primer terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Kelompok sektor sekunder terdiri dari sektor industri, sektor listrik/gas/air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor pengangkutan/telekomunikasi, sektor keuangan/persewaan/jasa perusahaan.

Pada tahun 2019 kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bandung Barat. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang tercipta dari kelompok sektor ini mencapai

Rp.22.875,39 miliar atau meningkat 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh kelompok sektor tersier dan primer yang masing-masing menghasilkan nilai tambah Rp 17.502,28 miliar dan Rp 6.802,42 miliar atau masing-masing mengalami peningkatan 7.66 dan 6.81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kinerja seluruh kelompok sektor menunjukkan peningkatan kinerja. Hal ini terlihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan sektor sekunder tahun 2019 yaitu sebesar 5.99 persen, dari sebesar Rp.14.500,13 miliar menjadi Rp.15.368,03 miliar. Pada kelompok sektor tersier mengalami percepatan kinerja sebesar 4.78 persen, yaitu dari Rp.11.366,34 miliar ditahun 2018 menjadi Rp.11.910,05 miliar pada tahun 2019 (tabel 4.3). Sedangkan pada kelompok sektor primer terjadi peningkatan relatif lebih kecil yaitu sebesar 2.43 persen, dari Rp.4.022,41 miliar menjadi Rp.4.120,27 miliar.

Pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha atau sektoral terlihat pada tabel 3.2. Sektor industri yang merupakan *leading* perekonomian di Kabupaten Bandung Barat mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar Rp.18.853,42 miliar rupiah. Keberadaan perusahaan industri besar dan sedang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dimana Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar merupakan wilayah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah sektor industri di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3.2.

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017–2019 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
[1]	[2]	[3]	[4]
<i>I. Primer</i>	5,902.69	6,368.55	6,802.42
1. Pertanian	5,442.76	5,895.31	6,325.51
2. Pertambangan dan Penggalian	459.94	473.24	476.90



II. Sekunder	19,333.51	21,181.55	22,875.39
3. Industri	15,954.91	17,505.32	18,853.42
4. Listrik, Gas dan Air	333.85	370.84	408.27
5. Bangunan	3,044.75	3,305.39	3,613.70
III. Tersier	14,968.19	16,257.60	17,502.28
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	7,600.84	8,228.24	8,841.38
7. Pengangkutan/telekomunikasi	2,874.02	3,072.01	3,290.46
8. Keuangan/Real Estate/Jasa Perusahaan	1,213.26	1,350.03	1,479.92
9. Jasa-jasa	3,280.07	3,607.32	3,890.51
PDRB	40,204.40	43,807.71	47,180.08

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara

Sumber: Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Pada posisi kedua, sektor perdagangan/hotel/restoran mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar 8.841,38 miliar rupiah. Keberadaan pusat perbelanjaan dan beberapa supermarket menjadi determinasi kinerja sektor ini. Namun pasar tradisional permanen diharapkan tetap mampu menjadi basis perdagangan tradisional, dengan penataan dan pengelolaan yang rapi. Kontribusi sektor ini walaupun masih di bawah sektor industri, namun terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan kontribusi sektor industri justru mengalami tren penurunan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan salah satu sektor yang sangat potensial dalam mendukung perekonomian Kabupaten Bandung Barat berada pada urutan ketiga dengan pembentukan nilai tambah sebesar 6.325,51 miliar rupiah. Pendukung utama pada sektor ini adalah sub sektor tanaman bahan makanan yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman sayuran dan buah-buahan. Selain itu sub sektor peternakan juga memiliki andil yang cukup signifikan dan mempunyai prospek ekonomi yang cukup tinggi untuk terus dikembangkan.

Atas dasar harga konstan (2000), sektor industri mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar 12.770,36 milyar rupiah dan sektor PHR sebesar

6.027,88 miliar rupiah. Sedangkan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3.790,60 miliar rupiah.

3.1.2 Kontribusi Sektor - sektor dalam PDRB

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat relatif tidak mengalami perubahan. Kelompok sektor sekunder masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Sektor industri masih menjadi *leading* perekonomian di Kabupaten Bandung Barat yang mampu memberikan kontribusi terbesar, diikuti oleh sektor perdagangan/hotel/ restoran (PHR) dan sektor pertanian.

Pada dasarnya Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Adapun keterkaitan ke depan, bahwa sumber daya alam yang sangat potensial dapat memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agrowisata dapat berdampak besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat.

Pada tahun 2019 sektor sekunder masih mendominasi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada periode 2017-2019 tampak mengalami fluktuasi, meskipun relatif sangat kecil. Pada periode 2017 – 2019 sektor sekunder mengalami kenaikan kontribusi dari 48,09 persen (2017) menjadi 48,27 persen (2018), dan kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 menjadi 48,49 persen.

Tabel 3.3
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2019 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018**	2019**
[1]	[2]	[3]	[4]
<i>I. Primer</i>	14.68	14.62	14.42
1. Pertanian	13.54	13.5	13.41
2. Pertambangan dan Penggalian	1.14	1.11	1.01
<i>II. Sekunder</i>	48.09	48.27	48.49
3. Industri	39.45	39.48	39.96



4. Listrik, Gas dan Air	0.83	0.85	0.87
5. Bangunan	7.81	7.94	7.66
III. Tersier	37.23	37.11	37.09
6. Perdagangan/Hotel/ Restoran	18.91	18.78	18.74
7. Pengangkutan/ Telekomunikasi	7.15	7.01	6.98
8. Keuangan/Real Estate/ Jasa Perusahaan	3.02	3.08	3.13
9. Jasa-jasa	8.15	8.23	8.24
PDRB	100,00	100,00	100,00

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara

Sumber BPS Kabupaten Bandung Barat

Penurunan kontribusi juga terjadi pada kelompok sektor primer. Pada tahun 2017, kontribusi kelompok sektor ini sebesar 14,68 persen, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 14.62 persen. Pada tahun 2019, kontribusi kelompok primer juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 14.42 persen. Penurunan kontribusi ini khususnya terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

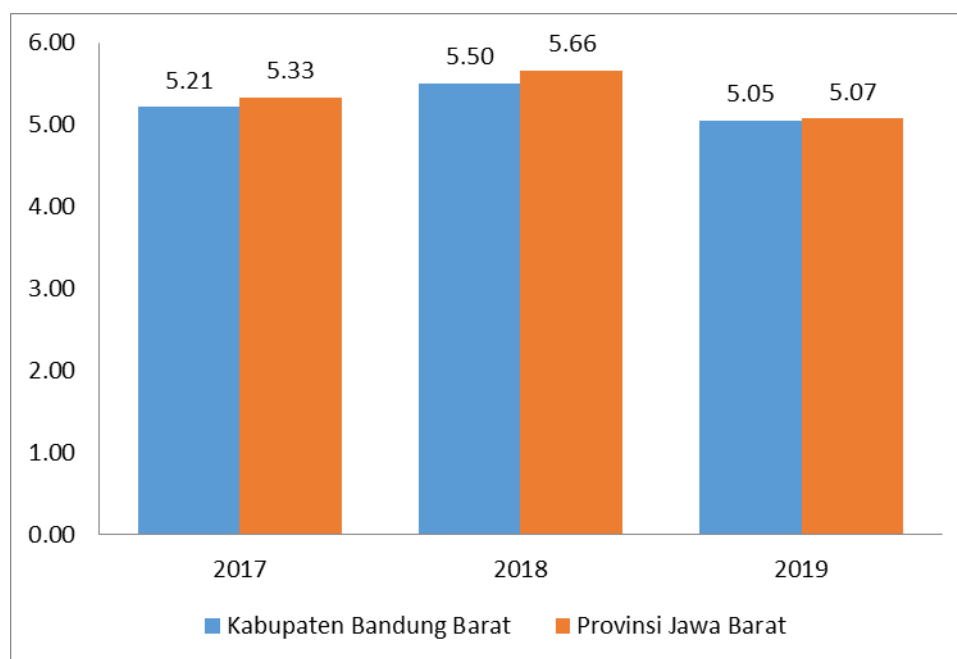
Penurunan kontribusi kelompok sektor primer dan sekunder selama periode 2017 – 2019 berdampak pada peningkatan kontribusi sektor tersier terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2017, kontribusi kelompok ini sebesar 37,23 persen mengalami penurunan menjadi 37.11 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 37.09 persen. Peningkatan kontribusi pada kelompok sektor ini terutama disumbang oleh sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR) yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 18.74 persen. Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan tempat wisata alam yang representatif. Potensi tersebut mendorong kinerja sektor ini bergerak secara simultan untuk mendukung pengembangan obyek wisata yang ada.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara

keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Selain PDRB, Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara riil ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE), yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2018 mencapai 5,50 persen.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2019* (Persen)



*) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 sebesar 5,05 relatif sama nilai pertumbuhan dengan perekonomian Provinsi Jawa Barat yang mencapai 5,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan yang positif pada semua kelompok sektor. Kelompok sektor primer mengalami pertumbuhan sebesar 2.43 persen, sekunder sebesar 5.99 persen dan tersier 4.78 persen. Kelompok sektor primer merupakan kelompok sektor yang memiliki pertumbuhan terkecil pada tahun ini. Namun demikian kelompok ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. penurunan terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 – 2019 (persen)

Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
[1]	[2]	[3]	[4]
<i>I. Primer</i>	1.42	2.64	2.43
1. Pertanian	1.39	2.66	2.77
2. Pertambangan dan Penggalian	1.74	2.40	-1.29
<i>II. Sekunder</i>	5.75	6.53	5.99
3. Industri	5.99	6.62	5.79
4. Listrik, Gas dan Air	2.90	3.61	3.16
5. Bangunan	4.76	6.35	7.38
<i>III. Tersier</i>	5.98	5.25	4.78
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	5.60	4.72	4.51
7. Pengangkutan/Telekomunikasi	6.97	6.26	5.71
8. Keuangan/Real estate/jasa Perusahaan	6.38	8.25	7.09
9. Jasa-jasa	5.82	4.39	3.63
PDRB		5.5	5.52

*) Angka Perbaikan ***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS KabSumber BPS Kabupaten Bandung Barat, 2020

Catatan *)=Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

***)= Angka Sangat Sementara

Tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor cukup bervariasi (Tabel 3.5) dan dengan variasi tersebut dapat kita bagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Kelompok pertama: LPE dibawah 3 persen ditunjukkan oleh pertanian,

pertambangan/penggalan. Kelompok kedua : LPE berkisar 3 sampai 6 persen ditunjukkan oleh sektor industry, Listrik gas dan air, Perdagangan/Hotel/Restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, dan jasa jasa. Kelompok Ketiga LPE diatas 6 persen ditunjukkan oleh sektor Konstruksi dan keuangan/real estate/Jasa Perusahaan. Pada kelompok ini sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 7.38 persen. Kenaikan sektor konstruksi didorong oleh meningkatnya jumlah bangunan baik untuk tempat tinggal atau untuk bukan tempat tinggal / komersil. Faktor peningkatan infrastuktur baik di pedesaan maupun di perkotaan sebagaimana prioritas pembangunan nasional merupakan determinasi kinerja sektor ini.

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

Selain itu laju inflasi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 inflasi mencapai 2,38 persen, lebih rendah bila dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 2,97 persen.

Tabel 3.6
Laju Inflasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017- 2019

URAIAN	2017	2018*	2019**
[1]	[2]	[3]	[4]
a. PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	40,204,396.94	43,807,707.40	47,180,080.50
b. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (juta Rp)	28,330,024.82	29,888,888.08	31,398,351.99
c. Indeks Harga Implisit	141.91	146.57	150.26
d. Laju Inflasi (persen)	3,15	3.28	2,52

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2020

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

3.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Tahun 2020 - 2024

3.1.2.1 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 2.5 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

Berdasarkan World Bank Group dalam laporannya Global Economic Prospect 2020, pertumbuhan PDB global diperkirakan akan meningkat sebesar 2,5 persen pada Tahun 2020 dan akan cenderung terus meningkat pada kisaran 2,6 persen di Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 3.7 :

Tabel 3.7
Outlook Perekonomian Global

	Negara	Estimasi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
	Dunia	2,4	2,5	2,6
	Amerika	2,3	1,8	1,7
	Eropa	2,0	2,6	2,9
	Jepang	1,1	0,7	0,6
	Tiongkok	6,1	5,9	5,8
	India	5,0	5,8	6,1
	Indonesia	5,0	5,1	5,2

Sumber : World Bank Group, Januari 2020

Pertumbuhan global yang diperkirakan meningkat dari 2,5 persen pada tahun 2020 menjadi 2,6 persen pada tahun 2021 disebabkan oleh pasar-pasar negara berkembang melambat, perekonomian China melambat dan kondisi

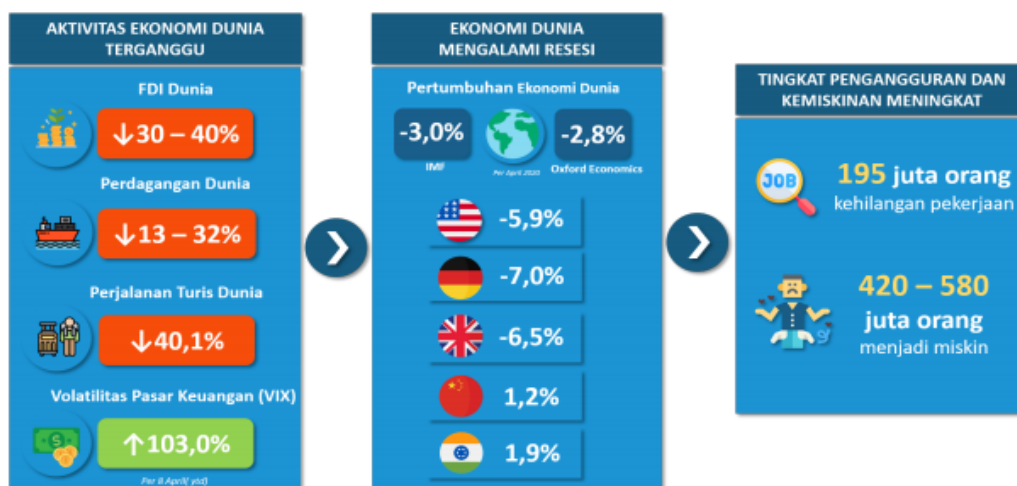
keuangan dan kebijakan ekonomi yang lebih ketat membebani Turki dan negara-negara Eropa.

Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi global adalah perubahan secara tiba-tiba pada kondisi pasar keuangan, ketidakpastian kebijakan, permasalahan geopolitik, meningkatnya pembatasan perdagangan, terjadinya perlambatan pertumbuhan potensial yang cukup signifikan. Perubahan pada pasar keuangan termasuk di dalamnya adalah koreksi secara mendadak pada valuasi aset, kebijakan penilaian ulang pasar oleh Bank Sentral beberapa negara atau financial stress.

Valuasi aset mengalami peningkatan dan kompensasi terhadap risiko kredit berada pada titik yang rendah, juga financial stress yang terjadi di negara berkembang yang besar serta China akan menyebabkan gejolak pada pasar keuangan dan juga meningkatkan biaya pinjaman di negara ekonomi berkembang. Pada jangka waktu yang singkat, hal tersebut akan menaikkan risiko ketidakstabilan. Selain itu, kejadian cuaca buruk yang lebih sering akan meningkatkan kemungkinan perubahan besar dalam harga pangan dunia, yang bisa meningkatkan angka kemiskinan.

Pada awal Tahun 2020 dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 3.1). Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen.

Gambar 3.1
Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia



Sumber: Kementrian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*).

3.1.2.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Di sisi domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan LNPRT) diharapkan akan tumbuh rata-rata 5,16 – 5,29 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,13 – 4,23 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 6,88 – 8,11 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi

dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2018 menjadi menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 50,0 persen PDB dan belanja modal menjadi 2,3 – 2,8 persen pada tahun 2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Prospek ekonomi global akan segera pulih dan perbaikan harga komoditas dan pasar keuangan akan menjadi tantangan bagi perekonomian Nasional. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan² sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun, sepanjang 2020-2024. Sementara itu, tantangan domestik terkait dengan sisi pengeluaran adalah investasi yang tumbuh menguat Tahun 2018 namun konsumsi rumah tangga tertahan dibawah 5 persen selama Tahun 2018.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 6,0 persen pertahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD6.010 per kapita pada 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, sebesar $3,0 \pm 1$ persen pada tahun 2020-2022, dan $2,5 \pm 1$ persen pada tahun 2023-2024. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal

pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun.

Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah Covid-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

1.1.2.3 Tantangan dan Prospek Regional Jawa Barat

Tantangan dan prospek regional Jawa Barat yaitu mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat

resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional yaitu :

1. kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makro ekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi.
2. teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech* (*financial technology*) dan *e-commerce*.
3. terkait belanja infrastruktur Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan laut, (5) Rel kereta api, dan (6) Terminal bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat juga terus dipacu sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional. PSN yang berlokasi di Jawa Barat berjumlah 32 PSN dan lebih dari separuhnya berkaitan dengan konektivitas. PSN yang berlokasi di Jawa Barat terdiri atas jalan tol (11 proyek), perkeretaapian (4 proyek), bandara (1 proyek), bendungan (8 proyek), pelabuhan (2 proyek), dan proyek lainnya (6 proyek).

Pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan mengingat keberadaannya telah terbukti mampu menopang perekonomian Jawa Barat. Secara rinci proyek strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu Tahun 2018-2023

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di Tahun 2021, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8

Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2020-2021

No	Indikator Makro dan Pembangunan	2020	2021
1	IPM (poin)	71,91 -72,52	72,52-73,13
2	LPE (%)	5,5 – 5,9	4,9 – 5,4
3	TPT (%)	7,9-7,70	7,5-7,7
4	Inflasi (%)	2,50–3,50	2,75–3,75
5	Kemiskinan (%)	6,5–6,9	6,0– 6,6
6	Gini Rasio (poin)	0,37–0,38	0,37–0,38
7	LPP (%)	1,48	1,45

Sumber: Rancangan RKPD 2021 Provinsi Jawa Barat

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.9 di atas, strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi perlu disiapkan sedemikian rupa menuju pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD Tahun 2018-2023 Misi ke-4, serta memperhatikan arahan nasional di bidang

ekonomi yang tertuang dalam RKP Tahun 2020. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di Tahun 2019 dan 2020 Seiring kondisi perekonomian, tantangan dan prospek yang telah dijelaskan dan disajikan pada bagian sebelumnya, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat untuk Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Strategi mempercepat pencapaian sasaran Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang mandiri. Strategi ini ditempuh dengan menyediakan pangan yang berkualitas bagi masyarakat dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam. Hal tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang saat ini masih memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Jawa Barat
2. Strategi mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan perlu diwujudkan melalui peningkatan kontribusi agroindustri terhadap PDRB dan kesempatan kerja lokal. Pembangunan aktivitas-aktivitas kegiatan usaha yang memiliki keterkaitan erat baik kedepan maupun kebelakang dengan sektor ini, sehingga diharapkan mampu membentuk klaster-klaster aktivitas usaha yang kompetitif. Pembangunan aktivitas ini seyogyanya ditunjang oleh penyediaan faktor produksi yang mencukupi dan terampil, serta infrastruktur yang memadai. Arah kebijakan ini sejalan dengan arahan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, dan transformasi sektor jasa.
3. Strategi menuju tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif, ditempuh dengan meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata dan dua kebijakan yakni 1) Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif, dan 2) Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital.

4. Strategi peningkatan peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat melalui daya saing industri, dengan arah kebijakan mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi. Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menciptakan Global Value Chain (GVC) yang kuat berfokus pada pelayanan yang mendukung ekonomi inklusif dan berdaya saing. Secara lebih spesifik arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah mendorong standarisasi produk industri agar dapat diterima pada GVC, mendorong penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri sepanjang rantai pasok agar dapat berperan dalam GVC (bahan baku, fasilitas industri, infrastruktur, kawasan industri, logistik, perijinan, dan lain-lain).
5. Strategi meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri ditempuh dengan dua kebijakan yakni 1) Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dan 2) Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing. Terkait ekspor, di tengah-tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, negara-negara ‘emerging market’ cenderung naik sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekspor ke mereka.
6. Strategi meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah melakukan transformasi struktural dari konsumsi ke produktif yakni mengubah struktur pengeluaran dari yang sebelumnya bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga dan LNPRT menjadi pengeluaran yang lebih produktif seperti investasi. Dalam konteks ini dibutuhkan pengembangan model layanan Investasi yang bagi KUKM, BUMD, PMDN dan PMA.
7. Strategi meningkatkan peringkat daya saing Jawa Barat. Dari sisi stabilitas ekonomi makro, Jawa Barat cenderung stabil pada peringkat 3 (tiga) sejak Tahun 2015. Faktor utama yang membuat daya saing Jawa Barat meningkat adalah daya tarik terhadap investasi Jawa Barat yang tinggi.

Melihat kondisi perekonomian Global, Nasional dan Jawa Barat perekonomian Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor eksternal, sebagai berikut

1. Ketergantungan pangan terhadap produk impor; permasalahan ini akan mengakibatkan ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidakstabilan harga di pasaran.
2. Makin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pengelolaan pembangunan daerahnya.
3. Makin beratnya persaingan antar wilayah dalam upayanya menarik investasi. Ketimpangan daya tarik menyebabkan investasi tidak merata penyebarannya.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bandung Barat untuk Tahun 2021 diperkirakan adalah:

1. Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik, akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi para investor.
2. Potensi bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat
3. Penurunan kontribusi sektor primer yang mengakibatkan terjadinya pengangguran.
4. Keamanan yang kondusif, kondisi ini sangat mempengaruhi kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi.
5. Tertatanya dengan baik peraturan daerah tentang perizinan, investasi dan pajak/retribusi daerah

Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas dan

kebersamaan dari semua *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2021, untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah;

1. Peningkatan pelayanan publik melalui perizinan terpadu satu pintu melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Peningkatan pengelolaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan potensi pendapatan bagi daerah.
4. Peningkatan kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara optimal berdasarkan Undang-Undang No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan *profit* bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- a. Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan penggunaan Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Khusus.
- c. Meningkatkan penyerapan penggunaan DAK sesuai peruntukannya.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.



Adapun realisasi dan rencana proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat, bisa dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021

NO	Uraian	Jumlah (Rp)			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD tahun 2020	Proyeksi/ Target Tahun 2021
	1	3		5	5
1	PENDAPATAN	2.601.956.561.020,00	2.902.699.471.554,00	2.101.254.455.571,00	3.292.054.763.621,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	422.341.026.545,00	527.884.898.122,00	643.872.608.097,00	691.460.080.949,00
	Pendapatan Pajak Daerah	306.237.634.441,00	379.136.558.552,00	505.000.000.000,00	419.278.870.152,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	20.367.747.909,00	38.498.283.432,00	48.214.754.910,00	25.806.943.503,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	470.528.236,00	491.838.831,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.735.644.195,00	109.779.529.902,00	90.187.295.951,00	245.882.428.464,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.525.369.448.662,00	1.639.819.402.415,00	1.209.869.362.000	1.949.208.730.551,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57.356.613.272,00	85.160.692.004,00	83.161.998.000,00	80.722.135.580,00
	Dana Alokasi Umum	1.091.118.868.000,00	1.126.707.364.000,00	1.126.707.363.000,00	1.235.219.262.143,00
	Dana Alokasi Khusus	352.833.523.306,00	427.951.346.411,00	-	633.267.332.828
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162.089.458.165,00	734.995.171.017,00	247.512.485.474,00	651.385.952.120,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	243.264.633.170,00	240.948.965.174,00	310.650.521.543,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	241.510.582.000,00	-	142.074.653.590
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53.567.178.592,00	81.663.962.362,00	6.563.520.300,00	34.723.683.570,00
	JUMLAH	2.601.956.561.020,00	2.902.699.471.554,00	2.101.254.455.571,00	3.292.054.763.621,00

Sumber : APBD 2018-2019, Analisis

Rencana pendapatan daerah tahun 2019 pada pos Pendapatan Asli Daerah, disesuaikan dengan target RPJPD 2018-2023 ditambah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2017 dengan target Pendapatan Asli Daerah dalam RPJMD untuk tahun 2019, diproyeksikan penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengurangan dan penanggulangan resiko bencana yang sering terjadi setiap tahun dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan guna pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk dana perimbangan untuk sementara disesuaikan dengan anggaran tahun 2017. Khusus untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah belum dialokasikan karena berkaitan dengan penerimaan dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat antara lain Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dana Tambahan Penghasilan Guru dari Pemerintah Pusat dan Tunjangan Profesi Guru.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja.

Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
3. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
4. Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan belanja daerah diupayakan penggunaannya untuk:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Belanja daerah untuk infrastruktur jalan dan jembatan.
7. Penggunaan dana perimbangan digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.

Realisasi dan rencana belanja daerah Kabupaten Bandung Barat, bisa dilihat pada Tabel 3.10:

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2020

NO	Uraian	Jumlah (Rp)			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target 2020	Proyeksi/Target 2021
	1	2	3	4	5
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.750.668.006.878,00	1.700.864.579.549,00	2.746.017.292.880,00	1.876.012.751.109,00

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021*



NO	Uraian	Jumlah (Rp)			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target 2020	Proyeksi/Target 2021
	1	2	3	4	5
	Belanja Pegawai	1.137.466.466.446,00	1.135.974.290.946,00	986.277.655.922,00	1.159.429.934.622,00
	Belanja Hibah	204.132.164.612,00	7.485.260.4645,00	121.394.240.000,00	60.889.494.358,00
	Belanja Bantuan Sosial	12.925.928.600,00	12.322.500.000,00	13.500.000.000,00	15.665.625.800,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai politik	395.135.093.651,00	438.463.687.104,00	286.043.220.700,00	576.505.292.384,00
	Belanja Tidak Terduga	1.008.353.569,00	1.477.161.510,00	10.500.000.000,00	-
2	BELANJA LANGSUNG	856.375.598.419,82	1.240.813.894.917.18	1.151.579.002.441	1.967.525.279.982
	Belanja Pegawai		201.553.662.778,00		
	Belanja Barang dan Jasa	591.835.278.919,82	701.273.662.055,55		
	Belanja Modal	264.540.319.500,00	337.986.570.083,63		
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.607.043.605.297,82	1.240.813.894.917.18	2.746.017.292.880,00	3.843.538.031.091,00

Sumber : APBD 2018-2019, Analisis

**Tabel 3.11
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021**

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
		Proyeksi/Target 2021
	1	5
1	BELANJA OPERASI	2.399.531.361.941
	Belanja Pegawai	1.420.904.681.770
	Belanja Hibah	50.259.443.500
	Belanja Bantuan Sosial	2.921.009.970
	Belanja Barang dan Jasa	913.223.204.714
	Belanja Bunga	12.223.021.987
2	BELANJA MODAL	1.967.525.279.982
	Belanja Modal Tanah	46.567.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.476.725.315
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.179.901.182



NO	Uraian	Jumlah (Rp)
		Proyeksi/Target 2021
1		5
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	328.233.023.769
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.964.852.950
	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
	BELANJA TRANSFER	269.232.716.768
	Belanja Bagi Hasil	50.173.226.668
	Belanja Bantuan Keuangan	219.059.490.100
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.189.185.581.925

Rencana belanja daerah tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada bagian belanja daerah belum termasuk belanja-belanja yang bersumber dari: Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan dari Provinsi Jawa Barat, kemudian juga penambahan dari Dana Alokasi Umum sebagai dampak dari berkembangnya angka dalam APBN tiap tahunnya.

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan menurun setiap tahunnya baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung terutama dalam pengadaan barang/jasa yang melalui proses pelelangan.

Pada bagian pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah Penyertaan modal pada BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) yang dibentuk berdasarkan Perda No. 21 tahun 2009.

Berikut ini ditampilkan mengenai perkembangan daerah tahun 2017-2020 bisa dilihat realisasi dan proyeksi rencana pembiayaan daerah Kabupaten Bandung Barat (Tabel 3.11) :

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018- 2021

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBD 2020	Target/Proyeksi Tahun 2021
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	324.002.913.177,00	272.063.268.840,18	598.000.000.000,00	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	304.002.913.177,00	272.063.268.840,18	275.000.000.000,00	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	323.000.000.000,00	
3.2.2	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.999.998.300,00	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.999.998.300,00	-	-	-

Sumber : BPKD Kab. Bandung Barat (Diolah)



Selanjutnya mengenai rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 sesuai dengan target RPJMD Tahun 2018-2023, dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan yang akan digunakan pada penyertaan modal digunakan untuk Penyertaan modal pada BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) yang dibentuk berdasarkan Perda No. 21 tahun 2009, dalam rangka pengembangan usahanya.



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Perencanaan pembangunan Tahun 2021 merupakan Tahun perencanaan transisi, setelah masa perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018- 2023 berakhir. Oleh karena itu perencanaan pembangunan Tahun 2020 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung Barat tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2018- 2023. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun RKPD Tahun 2021 dengan tetap berusaha menyajikan strategi - strategi jitu untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2021. Strategi dan Kebijakan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran sasaran dari RPJPD Tahun 2007- 2025, dengan mempertimbangkan isu strategis yang berpeluang akan terjadi pada pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021. Selanjutnya dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait dengan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 dilakukan dalam rangka mencapai Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2007 – 2025, mewujudkan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2021.



4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat dari RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama, diantaranya sebagai berikut Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Empat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Tema pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

“ Peningkatan Daya Saing daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”

Tema tersebut dilengkapi dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2021 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; 2) Akselerasi



peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing

- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul,



berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
 - 5) Meningkatkan budaya literasi.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 - 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa

aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Luar negeri.



Gambar 4.1 Tema Pembangunan RKP Tahun 2021

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 adalah penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah, dengan visi :

***“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi”***



Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu : **Misi Pertama**, 1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban; **Misi Kedua**, Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif; **Misi Ketiga**, Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah; **Misi Keempat**, Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan **Misi Kelima**, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan dari Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 disusun menjadi memuat 7 (tujuh) Tujuan Pembangunan dan 21 (dua puluh satu) Sasaran Pembangunan Daerah. Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan Sasaran pembangunan Jawa Barat tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
- b. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya



- pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
- d. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
- e. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
- f. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
- g. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif. Rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

4.1.2.1 Keterkaitan Tujuan sasaran Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat



Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2021, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah: "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas". Penjabaran dari tema pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2021, telah ditetapkan 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut: 1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur, LombokMandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai 2. 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter 3. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi 4. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 5. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Nasional harus dijabarkan kesemua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat dengan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan Nasional sebagaimana tabel 4-1.

Tabel 4.1
Keterkaitan Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2018-2023

Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2021
	S1. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
	S3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
	S4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
	S5. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan



Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2021
	S6. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
	S7. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan local
	S2. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
	S11. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
	S21. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.
	S10. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
	S20. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel
	S15. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
	S2. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
	S16. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri
	S17. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
	S18. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
	S19. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	S16. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri
	S14. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik
	S9. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
	S13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat



Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2021	Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2021
	S15. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
	S8. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
	S12. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan

Sumber: Rancangan RKPD 2021 Provinsi Jawa Barat

4.1.3 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Strategi pembangunan ini merupakan strategi pencapaian dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Strategi dalam hal ini merupakan rujukan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bandung Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara konseptual strategi ini dirumuskan dengan memandang beberapa tujuan dan dan sasaran pembangunan sebagai sebuah satu kesatuan. Sehingga kemudian rumusan strategi yang dihasilkan juga merupakan satu rangkaian tindakan strategis dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah 2018 – 2023. Satu strategi dapat saja terhubung secara spesifik dengan satu tujuan atau sasaran. Namun dapat juga satu strategi terkait dengan beberapa tujuan atau sasaran sekaligus. Jika kemudian dikaitkan dengan sasaran pembangunan, maka masing -masing strategi pembangunan tersebut memiliki keterkaitan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bandung Barat

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bandung Barat			
VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan		Sasaran	Strategi
Misi 1	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas		



Tujuan 1.1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, dengan indikator : Indeks Pendidikan	1.1.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan, dengan indikator : a. Indeks pendidikan	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata
--	-------	--	---

VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran		Strategi
	1.1.2	Meningkatkan Minat Budaya Baca a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata
Tujuan 1.2 Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, dengan indikator: Indeks Kesehatan	1.2.1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator : a. Indeks kesehatan b. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata
Tujuan 1.3 Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Lainnya, dengan indikator: Indeks Kebahagiaan	1.3.1	Mewujudkan ketahanan pangan, dengan indikator : a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main
	1.3.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keragaman budaya dan kearifan lokal a. Persentase partisipasi masyarakat terhadap aktivitas kebudayaan daerah	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata



	1.3.3	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan indikator : a. Indeks Rasa Aman	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main
	1.3.4	Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana a. Indeks Resiko Bencana Indonesia	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main
VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran		Strategi
	1.3.5	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat a. Persentase Angka PMKS yang Tertangani b. Indeks Kerukunan Umat Beragama c. Indeks Demokrasi	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main
Tujuan 1.4 Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, dengan indikator: Indeks Pembangunan Gender	1.4.1	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat, dengan indikator : a. Persentase LKD Aktif b. Kontribusi BumDes terhadap PADes c. Persentase Pemuda yang memiliki kecakapan hidup	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main
	1.4.2	Terwujudnya pemberdayaan gender, dengan indikator : a. Indeks pemberdayaan gender	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main
	1.4.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator : a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main



Misi 2	Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing		
Tujuan 2.1 Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.1.1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, dengan indikator : a. Pertumbuhan sektor pertanian b. Pertumbuhan sektor industri pengolahan c. Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya
VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran		Strategi
		d. Pertumbuhan PAD sektor pariwisata e. Jumlah Kunjungan Wisatawan	
	2.1.2	Meningkatnya investasi PMDN, dengan indikator : a. Nilai Investasi PMDN	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya
	2.1.3	Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada, dengan indikator : a. Tingkat pengangguran terbuka	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya
	2.1.4	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif, UMKM dan wirausaha, dengan indikator : a. Persentase Koperasi Sehat b. Peningkatan Skala Usaha Mikro	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya



	2.1.5	Menurunnya tingkat kesenjangan, dengan indikator : a. Laju Inflasi	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya
Misi 3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi		
Tujuan 3.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, dengan indikator:	3.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan, dengan indikator : a. Indeks Kesulitan Geografis	Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi
VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran		Strategi
Indeks Kesulitan Geografis	3.1.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial, dengan indikator yaitu : a. Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi
Tujuan 3.2 Meningkatkan kualitas lingkungan, dengan indikator: Indeks kualitas lingkungan hidup	3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator : a. Indeks kualitas lingkungan hidup	Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi
Misi 3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi		



Tujuan 3.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, dengan indikator:	3.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan, dengan indikator : a. Indeks Kesulitan Geografis	Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi
--	-------	---	--

VISI	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia		
Tujuan	Sasaran		Strategi
Tujuan 4.2 Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat	4.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator : a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan pengendalian

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan visi “Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia” sebagai berikut



1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tatakerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan pengendalian;
2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan bertumpu pada sector unggulan agroindustry dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sector jasa perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya;
3. Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi;
4. Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata;
5. Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main;

4.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian pilihan tindakan yang membentuk skenario pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Strategi juga menjadi tema pembangunan tahunan untuk periode 5 (lima) tahun. Tema pembangunan ini adalah arah kebijakan pembangunan daerah.

Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tindakan yang harus dilakukan. Setiap tahun rencana pembangunan



memiliki penekanan atau prioritas tertentu yang mengarahkan untuk perumusan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Strategi Pembangunan	Sasaran Pembangunan
Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan pengendalian	1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintahan 2. Meningkatnya kinerja laporan keuangan dan kinerja birokrasi 3. Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya	1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan 2. Meningkatnya investasi PMDN 3. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada 4. Meningkatnya pertumbuhan UMKM dan wirausaha 5. Menurunnya tingkat kesenjangan
Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial 3. Meratanya kegiatan ekonomi di seluruh wilayah 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan	1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan



Strategi Pembangunan	Sasaran Pembangunan
merata	
Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara berkeadilan, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum dan aturan main	1. Mewujudkan ketahanan pangan 2. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 3. Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keragaman budaya 5. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat 6. Terwujudnya pemberdayaan gender 7. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2023

4.1.5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2021 dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan focus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan Investasi; Reformasi sistem Kesehatan Nasional; Reformasi Sistem jaringan pengaman sosial; Reformasi sistem ketahanan bencana. Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

Prioritas Nasional 1 adalah Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan:

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan



5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi
7. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi
8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Energi dan Pertambangan
 - a. Kegiatan padat karya
 - Pembangunan energi terbarukan
 - Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga
 - Percepatan pembangunan smelter
 - b. Optimalisasi infrastruktur energy
 - Subsidi listrik untuk rumah tangga dan IKM;
 - Pembagian konverter kit bagi nelayan dan petani
 - Konversi minyak tanah ke LPG
 - Pembangunan “strategic reserves” untuk minyak mentah
2. Penguatan Perhutanan Sosial
(agroforestry, silvopasture, dan silvofishery) untuk:
 - Penyediaan pangan masyarakat
 - Penanggulangan kemiskinan kelompok petani hutan
 - Perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan
3. Pertanian dan Perikanan
 - Rantai pasok online dan logistic pangan
 - Pemenuhan kebutuhan dalam negeri
 - Pemenuhan permintaan ekspor
 - Peningkatan kegiatan padat karya
4. Koperasi dan UMKM
 - Penyaluran modal kerja skema channeling lembaga keuangan (perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi, dsb)



- Pendampingan pemulihan dan pengembangan usaha
5. Peningkatan Investasi
 - Pelaksanaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
 - Percepatan realisasi investasi skala besar
 - Perluasan positive lists investasi
 - Percepatan integrasi sistem perizinan
 - Penyediaan layanan debottlenecking dan aftercare investasi
 6. Industri dan perdagangan
 - Re-hiring dan re-training tenaga kerja
 - Pemulihan produktivitas (bahan baku, energi, permesinan)
 - Akselerasi industri substitusi impor
 - Peningkatan penggunaan dalam negeri
 - Peningkatan ekspor
 - Peningkatan efisiensi logistik
 - Percepatan Kawasan Industri prioritas
 - Revitaliasi dan kemitraan untuk IKM
 - Transformasi industri 4.0
 7. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Insentif wisman dan wisnus
 - Penyelenggaraan event nasional dan internasional
 - Percepatan pembangunan infrastruktur
 - Standar kebersihan dan keselamatan
 - Diversifikasi destinasi dan atraksi wisata
 - Fasilitasi akses ke pembiayaan
 - Kerja sama rantai pasok pariwisata
 - Pelatihan-sertifikasi-penempatan SDM
 - Penumbuhan usaha kreatif/start-up

Prioritas Nasional 2 adalah Mengembangkan wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:

1. Pembangunan wilayah Sumatera
2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali



3. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan wilayah Maluku
7. Pembangunan Wilayah Papua

Prioritas Nasional 3 adalah Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing:

1. Pengendalian Penduduk dan Tata Kelola Kependudukan
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan berkualitas
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
6. Pengentasan kemiskinan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing

Arah Kebijakan PN 3, yaitu:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
2. Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan
4. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas
5. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan berwirausaha
6. Memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif
7. Meningkatnya produktivitas dan daya saing

Prioritas Nasional 4 adalah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila



2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
3. Memperkuat Moderasi Beragama
4. Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

Arah kebijakan PN 4, yaitu:

1. Memperluas pusat - pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta sistem sosial pada keluarga dan masyarakat, serta pembinaan ideologi Pancasila.
2. Membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengembangkan media baru berbasis IT sebagai wahana ekspresi budaya, dan mengembangkan dana perwalian kebudayaan.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran.
4. Mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Prioritas Nasional 5 adalah Dukungan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar:

1. Mendukung pemulihan sektor industry, pariwisata dan investasi
2. Mendukung penguatan kesehatan masyarakat

Arah kebijakan PN 5:

1. Infratraktur Pelayanan Dasar
2. Infrastrukltur Ekonomi
3. Infrastruktur Digital
4. Infrastruktur Perkotaan
5. Energi dan Ketenagalistrikan

Prioritas Nasional 6 Adalah Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim:



1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
3. Pembangunan Indonesia Rendah Karbon

Major Proyek :

1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
2. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Alam dan Nonalam)

Prioritas Nasional 7 adalah Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan:

1. Konsolidasi Demokrasi
 - a) Penguatan kapasitas lembaga demokrasi
 - b) Penguatan kesetaraan dan kebebasan
 - c) Peningkatan kualitas komunikasi public
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - a) Optiomalisasi kepemimpinan Indonesia dinForum Regional dan Global
 - b) Penguatan Kerjasama pembangunan internasional
 - c) Peningkatan citra positif di dunia internasional
 - d) Penguatan integritas NKRI danbperlindungan WNI di luar negeri
3. Penegakan Hukum
 - a) Penataan regulasi
 - b) Perbaikan sistem hokum pidana dan perdata
 - c) Penguatan sistem anti korupsi
 - d) Peningkatan akses terhadap keadilan
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - a) Penguatan implementasi manajemen ASN
 - b) Transformasi pelayanan publik
 - c) Penataan kelembagaan dan proses bisnis
 - d) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
 - a) Penguatan keamanan dalam negeri



- b) Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence Building Measure
- c) Penguatan keamanan laut
- d) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat
- e) Penguatan ketahanan dan keamanan siber

Kebijakan PN 7 yang mendukung penanganan pandemic covid-19, yaitu :

1. Sosialisasi dan diseminasi informasi perkembangan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 secara merata dan berkeadilan melalui berbagai media di pusat dan daerah;
2. Pengembangan teknologi pemilu (e-rekap & evoting);
3. Pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi Covid- 19;
4. Inisiasi kerja sama pembangunan menggunakan kerangka KSST di bidang kesehatan, antara lain pengembangan diagnostic kit dan vaksin;
5. Pelaksanaan knowledge sharing kebijakan atau praktik unggulan penanggulangan pandemi Covid19;
6. Optimalisasi proses penanganan perkara dalam sistem peradilan secara elektronik;
7. Optimalisasi upaya penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penangguhan penahanan;
8. Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas;
9. Percepatan pemulihan sektor usaha melalui optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU);
10. Penguatan pelayanan publik secara terpadu;
11. Penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service) terutama untuk layanan dasar dan perijinan.
12. Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan kemhan/TNI dan Polri serta peningkatan OMSP penanggulangan bencana serta kontigensi



4.1.6 Prioritas Provinsi Jawa Barat

Prioritas pembangunan daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di rumuskan berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Jawa Barat. Tema atau focus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”**. Sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19 maka pada Tahun 2021 terdapat penambahan satu prioritas pembangunan daerah yaitu “Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19” dengan tetap melaksanakan 9 (Sembilan) prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018– 2023. Adapun prioritas pembangunan dimaksud terdiri dari

1. Akses pendidikan untuk semua.
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan.
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi.
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara.
6. Infrastruktur konektivitas wilayah.
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa).
8. Subsidi gratis golek mah.
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 diwujudkan melalui 37 Program Jabar Juara meliputi pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.



4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat dirumuskan berdasarkan Visi **”Mewujudkan Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius) Berbasis Pengembangan Ekonomi, Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dan isu serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Maka Dalam rangka upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemik Covid-19 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 dengan tema pembangunan **Percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang bertumpu pada sektor agroindustri, wisata dan didukung oleh sektor-sektor ekonomi lainnya** dengan program prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya:

Tabel 4.4

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Poin 1

No	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DPKP
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DPKP
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DPKP
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DPKP
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DPKP, DISPERNAKAN
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DPKP



7	Program Penyuluhan Pertanian	DPKP, DISPERNAKAN
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DPKP
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISPERNAKAN
10	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	DISPERNAKAN
11	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISPERNAKAN
12	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISPERNAKAN
13	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DISPERNAKAN
14	Program Perizinan Usaha Pertanian	DISPERNAKAN
15	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DISPERINDAG
16	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DISPERINDAG
17	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DISPERINDAG
18	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPR
19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
20	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
21	Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
22	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
23	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD



24	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
25	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLH
26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	DISKOPUKM
27	Program Pengembangan Umkm	DISKOPUKM
28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISPARBUD
29	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DISPARBUD

2. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat:

Tabel 4.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Poin 2

No	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kebudayaan	DISPARBUD
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISPARBUD
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISPARBUD
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPARBUD
5	Program Pemasaran Pariwisata	DISPARBUD
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISPARBUD
7	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR



8	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOLPP DAN DAMKAR
9	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DPERKIM
11	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFOTIK
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	DISHUB
13	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	KECAMATAN

Penetapan prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2021 mengacu pada penjabaran tahunan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan sebagai berikut

Tabel 4.6

Penjelasan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
Misi 1 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas					
Tujuan 1.1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat					
IKT. Indeks Pendidikan		Indeks	71,28		
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas laya nan pendidikan					
IKS 1.1.1.a Indeks Pendidikan		Indeks	71,28		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	99,69%	2.894.095.000	Disdik
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	98,31%	26.572.970.000	Disdik
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	90,99%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90,05%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	90,99%	14.824.420.000	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	93,09%		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	%	79,97%		
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga Terakreditasi	%	10,43%	3.830.298.000	Disdik
Sasaran 1.1.2 Meningkatkan minat budaya baca					
1.1.2.a Jumlah pengunjung perpustakaan		Angka	25.200		
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan daerah	Persentase perpustakaan desa yang aktif	%	90%	3.105.066.664	Disarpus
	Persentase Pengelola Perpusdes dan Taman Baca masyarakat yang terbina	%	90%		
	Persentase Jenis Bahan Pustaka	%	27%		
Tujuan 1.2 Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat					
IKT. Indeks Kesehatan		Indeks	80.01		
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan					
IKS 1.2.1.a Indeks Kesehatan		Indeks	80.01		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	- % balita wasting (BB/TB)	%	0.65%	1.669.653.100	Dinkes
	- % balita stunting /pendek (TB/U)	%	7,75%		
	- % balita underweight (BB/U)	%	4,14%		
	- % ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	40,18%		
	- Penurunan % ibu hamil anemia	%	5,11%		
	- Peningkatan % rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium	%	98,86%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan persentase bayi yangmendapat imunisasi dasar lengkap	%	95%	2.724.579.850	Dinkes
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	%	≥ 90 %		
	Presentase orang berisiko di tes HIV Standar	%	≥ 90 %		
	Angka Kematian DBD (Case Fatality Rate DBD)	Persen (%)	≤ 5 %		
	Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan	Persen (%)	≥ 90 %		
	Target Penemuan Pneumonia Balita	Persen (%)	≥ 4,62 %		
	Target Penemuan Diare Semua Umur	Persen (%)	≥ 10 %		
	Proporsi Cacat Tingkat 2 Penderita Baru Kusta	Persen (%)	≤ 15 %		
	Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita baru Filariasis	Persen (%)	≥ 85 %		
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan sarana obat dan makanan yangsesuai standar	Persen (%)	58%	846.732.480	Dinkes
	Persentase apotek yang memenuhi standar	Persen (%)	58%		
	Persentase ook obat yang memenuhi standar	Persen (%)	70%		
	Persentase instalasi farmasi kinik & instalasi farmasi rumah sakit yang memenuhi standar	Persen (%)	30%		
	Persentase instalasi farmasi puskesmas yangmemenuhi standar	Persen (%)	100%		
	Persentase sarana yang menyediakan produk legal yangmemiliki izin edar	Persen (%)	30%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2021		PD
			Target	Rp	
	Cakupan produk pangan yangaman dan bersertifikat	Persen (%)	60%		
	Persentase konsumen/ masyarakat yang paham mengenai bidang obat dan makanan	Persen (%)	100%		
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tingkat CakupanPelayanan Kesehatan masyarakat miskin yangterlayani asuransi kesehatan (premi BPJS, Jamkesda)	Persen (%)	33%	25.720.200.000	Dinkes
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yg menerapkan PHBS rumah tangga	Persen (%)	58%	1.476.475.000	Dinkes
	Persentase kelompok masyarakat yang menerapkan PHBS/Germas	Persen (%)	71,4%		
	Persentase desa yangber-PHBS	Persen (%)	50%		
	Cakupan kecamatan yang melaksanakan program pengembangan kab/kota sehat	Persen (%)	77,7%		
Program obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dasar untuk 18 bulan kedepan di Puskesmas dan RSUD	Persen (%)	100%	3.366.998.233	Dinkes
	Persentase Puskesmas dan RSUD yang terdistribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai Kebutuhan	Persen (%)	100%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
	Persentase sediaan obat dasar dan perbekalan kesehatan dengan mutu yang terjaga baik	Persen (%)	100%		
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya	Persen (%)	90%	15.097.639.712	Dinkes
IKS 1.2.1.b Rata-rata jumlah anak dalam keluarga		Angka	2,34		
Program Keluarga Berencana	Cakupan KB Aktif	%	74,15%	9.931.439.768	DP2KBP3A
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,00%		
Tujuan 1.3 Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya					
IKT. Indeks Kebahagiaan		Skala	71-73,5		
Sasaran 1.3.1 Terwujudnya ketahanan pangan					
IKS 1.3.1.a Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		Skor	88,25		
Program peningkatan ketahanan pangan	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	92.3	5.947.002.654	DPKP
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ton	85		
	Penurunan jumlah desa rawan pangan	desa	7		
	Jumlah sertifikasi/ label produk pangan dan pangan aman	jumlah	61		
Sasaran 1.3.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keragaman budaya dan kearifan local					
IKS 1.3.2.a Persentase partisipasi masyarakat terhadap aktivitas kebudayaan daerah		%	30%		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Dokumen	1 dokumen	3.850.000.000	Disparbud
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	78 Cagar Budaya		
Sasaran 1.3.3 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat					
IKS 1.3.3.a Indeks Rasa Aman		Indeks	0,43		
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit	Persentase berkurangnya penyakit masyarakat	%			SatpolPP Damkar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
Masyarakat					
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase berkurangnya penyakit masyarakat	%	79%	506.891.748	SatpolPP Damkar
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase laporan gangguan masyarakat yang tertangani	%	80%	14.373.309.858	SatpolPP Damkar
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran tertangani sesuai SOP	%	70%	15.447.824.191	SatpolPP Damkar
Sasaran 1.3.4 Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana					
IKS 1.3.4.a Indeks Resiko Bencana Indonesia		Kategori Indeks	Sedang		
Program Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Kebencanaan yang disebarluaskan	%	95%	15.290.000.000	BPBD
	Persentase respon penanganan bencana	%	95%		
	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	95%		
Sasaran 1.3.5 Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat					
IKS 1.3.5.a Persentase Angka PMKS		%	52,15		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Korban bencana , eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya serta terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	%	100%	8.957.563.919	Dinsos
IKS 1.3.5.b Indeks Kerukunan Umat Beragama		Skala	69.6-70		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah forum dialog kebangsaan dan antarumat beragama	Kegiatan	12	1.261.440.000	Kesbangpol
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian kasus konflik sosial	%	100%	1.006.213.800	Kesbangpol
IKS 1.3.5.c Indeks Demokrasi		Skala	71,79 – 72,78		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
Program Pendidikan Politik di Masyarakat	Tingkat pemahaman politik di masyarakat	Kegiatan			Kesbangpol
	Tingkat Kualitas Kesadaran Hidup Berdemokrasi	Nilai	Baik	1.006.461.600	
Tujuan 1.4 Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak					
IKT. Indeks Pembangunan Gender		Ska la	80.24		
Sasaran 1.4.1 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat					
IKS 1.4.1.a Persentase LKD Aktif		%	70		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Posyandu Mandiri	%	40%	1.489.939.924	DPMD
	Persentase PKK Berprestasi	%	29%		
	Persentase LPM Berprestasi	%	29,1%		
IKS 1.4.1.b Kontribusi BumDes terhadap PADes		%	64		
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya Unit Usaha BUMDes	Unit BUMDES	115	1.019.553.337	DPMD
	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) Yang Terbentuk	Unit POSYANTEK	15		
	Jumlah Kemitraan Yang Terbentuk	UPK	14		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Desa Juara Tk. Kabupaten, 1 Desa Juara Tk. Provinsi Jawa Barat	6	1.714.295.000	DPMD
IKS 1.4.1.c Persentase Pemuda yang memiliki kecakapan hidup		%	64.5		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang memiliki kecakapan hidup	%	64.50%	3.584.189.884	Dispora
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan keca kapan hidup manusia	Persentase Kenaikan Pemuda yg berwirausaha	%	60%	2.014.644.071	Dispora
Program pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi	%	8.5%	14.983.975.226	Dispora

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
	Persentase Angka Partisipasi Olahraga di Masyarakat dan Menghasilkan Masyarakat Sehat dan Berprestasi	%	17.6%		
	Persentase Penyelenggaraan PORDA	%			
Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase Prasarana dan sarana kegiatan olahraga dalam kondisi baik	%	70%	1.973.081.055	Dispora
Sasaran 1.4.2 Terwujudnya pemberdayaan gender					
IKS. 1.4.2.a Indeks pemberdayaan gender		Indeks	54,21		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentase Lembaga Advokasi gender dan Anak yang Aktif	%	83%	505.758.500	DP2KBP3A
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan yang aktif di Organisasi Sosial dan Pemerintahan	%	9%	1.174.026.736	DP2KBP3A
Sasaran 1.4.3 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak					
IKS 1.4.3.a Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Skala	80.24		
Program Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Kasus tindak Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	%	100%	265.822.500	DP2KBP3A
	Cakupan kasus Kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100%		
	Cakupan kasus perdagangan manusia yang ditangani	%	100%		
	Jumlah Desa Layak Anak	Jumlah	140		
Misi 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing					
Tujuan 2.1 Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan					
IKT. Laju Pertumbuhan Ekonomi		%	6,16		
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan					
IKS 2.1.1.a Pertumbuhan sektor pertanian		%	7,5		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah, Ketersediaan Pangan Daerah,Kemandirian Pangan Daerah dan Memantapkan swasembada pangan daerah secara berkelanjutan	%			DPKP
Program peningkatan produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Ton	494.459	6.965.385.000	DPKP
	Jumlah Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kelompok	9		
Program peningkatan produksi tanaman Hortikultura	jumlah produksi Tanaman Hortikultura	ton	5.167	4.611.144.500	DPKP
	jumlah penangkar benih/ bibit tanaman hortikultura	Jumlah	14		
Program peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	6363.12	3.668.500.000	DPKP
	jumlah penangkar benih/ bibit perkebunan	jumlah	12		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging	Ton	25.335	14.037.318.000	Dispemakan
	Produksi Telur	Ton	1.427		
	Produksi Susu	Ton	86.816		
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Benih Ikan	Juta ekor	196.7	5.570.000.000	Dispemakan
	Jumlah Produksi Ikan Kolam Air terang	(Ton)	4.652		
	Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan)	RTP	2.425		
IKS 2.1.1.b Pertumbuhan sektor industri pengolahan		%	8,11		
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah Pertumbuhan IKM	jumlah	10.292	2.349.646.470	Disperindag
IKS 2.1.1.c Pertumbuhan sektor perdagangan		%	10,45		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pasar yang Dikelola	%	100%	12.294.818.563	Disperindag
IKS 2.1.1.d Pertumbuhan PAD sektor pariwisata		%	10%		
Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	%	60%	6.550.000.000	Disparbud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
IKS. 2.1.1.e Jumlah Kunjungan Wisata wan		Angka	8.000.000 orang		
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase kegiatan promosi pariwisata dan budaya yang efektif	%	100%	3.100.000.000	Disparbud
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya investasi PMDN					
IKS 2.1.2.a Nilai investasi PMDN		Trilyun Rupiah	3.350		
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	21%	4.196.340.000	DPMPSTP
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada					
IKS 2.1.3.a Tingkat pengangguran terbuka		%	8,26		
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase calon pencari kerja yang dilatih	%	60%	3.547.055.226	Disnakertrans
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Terserapnya Pencari Kerja Terlatih pada Pasar Kerja	%	100%	5.769.175.940	Disnakertrans
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, koperasi dan wira usaha					
IKS 2.1.4.a Peningkatan jumlah koperasi sehat		%	55,4		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	%	80,74%	1.906.664.631	DiskopUKM
	Jumlah Koperasi Baru	Koperasi	40		
IKS 2.1.4.b Peningkatan Skala Usaha Mikro		Pelaku Usaha	75		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wira usaha baru	Orang	300	869.139.324	DiskopUKM
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi					
Tujuan 3.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastrukturekonomi dan social					
IKT. Indeks Kesulitan Geografis		Skala	35,41		
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, mela lui berbagai alternatif skema pembiayaan					
IKS 3.1.1.a Indeks Kesulitan Geografis		Skala	35,41		
Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	96,72%	360.560.058.895	DPUPR
	Kondisi jembatan baik/seluruh jembatan	Jembatan	3		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Panjang Jalan yang terlayani PJU	TC (%)	8474 (64,49)	34.860.000.000	Dishub
Program pengendalian dan pengamanan la lu lintas	Penurunan presentase kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten	kejadian (%)	208 (15%)	11.539.931.000	Dishub
	Peningkatan Kecepatan Kendaraan Pada Ruas Jalan yang menjadi kemacetan	Km/jam	36,86		
	Pemasangan rambu di ruas jalan Kabupaten	unit (%)	6578 (64,3 %)		
Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	10%	10.126.708.800	Dishub
	Persentase Jangkauan Pelayanan Terminal Di setiap Kecamatan	%	56,25%		
	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,02%		
	Persentase Jangkauan Pelayanan Transportasi Umum di Setiap Desa	%	46,67%		
Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Luas lahan dalam perkantoran Pemda yang dikuasai	Ha	80	100.000.000.000	Disperkim
	Persentase Luas lahan Luar perkantoran Pemda yang dikuasai	Ha	50		
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur social					
IKS 3.1.2.a Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana social			61,92		
Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah taman yang terbangun	lokasi	35	9.000.000.000	Disperkim
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	12.939	88.302.186.864	Disperkim
	Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	Ha	0,02		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
	Jumlah Perumahan formal yang mela kukan proses serah terima PSU kepada Pemerintah daerah	Angka	14,17%		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Tersedianya Akses Air Minum Yang Memadai	%	64,75%	24.912.000.000	DPUPR
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi atau jumlah rumah tinggal	%	82,33%		
	Cakupan pelayanan air limbah	Cakupan unit	37		
Program Pembangunan Fasilitas Publik	Bangunan Publik Yang Memadai	Angka	10 Unit dan 5 DED	156.144.800.000	DPUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan sampah	%	18%	25.510.000.000	DLH
Tujuan 3.2 Meningkatkan kualitas lingkungan					
IKT. Indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks	50,86		
Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
IKS 3.2.1.a Indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks	50,86		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusa kan Lingkungan Hidup	Indeks kua litas Air	%	29,60%	5.250.000.000	DLH
	Indeks kua litas Udara	%	78,45%		
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi					
Tujuan 4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik					
IKT. Indeks Reformasi Birokrasi		Ska la	BB		
Sasaran 4.1.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akunta bel, efektif dan efisien					
IKS 4.1.1.a Indeks Merit		Indeks	Skor 3		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase Aparatur yang mendapatkan pengembangan	%	70%	6.794.828.000	BKPSDM
	Persentase Aparatur yang mendapatkan pembinaan	%	70%		
	Presentase Penyelesaian Dokumen Kepega waian	%	85%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	%	70%	5.593.651.000	BKPSDM
IKS 4.1.1.b Nilai SAKIP		Angka	BB		
Program Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu	%			Setda
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Perangkat Daera h yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik	PD			Setda
	Persentase Kerjasama dan Kemitraan KORPRI yang terbentuk	%			
	Prestasi Porpemda	Peringkat			
Program Pengendali an Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya Tertata	%	100%	3.611.924.000	Setda
	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik	PD	15 PD		
	Persentase Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu	%	100%		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menya mpaikan Dokumen Perencanaan dengan kualitas baik	%	90%	1.830.000.000	Bappelitbangda
Program Evaluasi dan Pengendali an Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menya mpaikan laporan dengan kualitas baik	%	90%	745.000.000	Bappelitbangda
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	Level 3	1.108.027.375	Itda
Program penataan dan penyempumaan kebij aka n sistem dan prosedur	Persentase penerapan sistem dan prosedur pengawasan	%	85%	1.292.850.000	Itda
IKS 4.1.1.c Opini BPK		Skor	WTP		
Program peningkatan	Persentase Rekomendasi	%	85%		Itda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Temuan APIP yangselesai ditindaklanjuti Perangkat Daerah			8.084.537.500	
	Persentase penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat	%	85%		
Program Peningkatan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar	%	94,5%	23.628.019.754	BPKD
	Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	%	7,94%		
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang terinventarisir	%	70%		
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Pengembangan Pengelolaan Anggaran Daerah	Dokumen			BPKD
Program Pengembangan Kapasitas Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan Kapasitas Pengelola an Keuangan Daerah	Dokumen			BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah I Non PBB dan BPHTB	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelola an Pajak Daerah I Non PBB dan BPHTB	%			BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola an Aset Daerah	Persentase Peningkatan Data Aset daerah yang terinventaris	%			BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola an Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah dokumen pengembangan pengelola an akuntansi dan pelaporan	Dokumen dan Aplikasi			BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola an PBB dan BPHTB	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelola an Pajak Daerah II PBB dan BPHTB	%			BPKD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2021		PD
			Target	Rp	
IKS 4.1.1.d Indeks SPBE		Skala	2,91		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Standar LKPP	%	100%	2.885.592.100	Setda
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Level 4 (Managed) UKPBJ		
Program Pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi teknologi informasi pemerintahan yang termanfaatkan	%	60%	16.142.990.000	Diskominfotik
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Presentase informasi pembangunan yang telah tersebarluaskan	%	55,68%	1.518.825.000	Diskominfotik
Tujuan 4.2 Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas					
IKT. Indeks Kepuasan Masyarakat		`	79,23		
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan public					
IKS 4.2.1.a Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	79,23		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Presentase Penduduk Memiliki KTP-EL	%	92%	4.118.060.000	Disdukcapil
	Presentase Penduduk Ber-Akta Kelahiran	%	35%		
	Presentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	%	81%		
	Persentase Anak yang Memiliki KIA	%	20%		
	Persentase penerbitan Akta Kematian	%	30%		
	Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	20%		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Dokumen yang ditindaklanjuti	%	100%	978.810.650	DPMPTSP
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	100%	23.175.247.300	Dinkes

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Porgram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
	Persentase cakupan pendataan pengembangan SDM Kesehatan sesuai standar kompetensi	Persen (%)	90%		
Program Peningkatan Standar dan Mutu Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen standar pelayanan publik	%	40%	563.398.000	Setda
	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas SKM yang baik	%	40%		
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	293.691.200	Kecamatan Lembang
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	243.585.100	Kecamatan Parongpong
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	355.232.405	Kecamatan Cisarua
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	246.685.120	Kecamatan Cikalong Wetan
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	104.714.610	Kecamatan Cipeundeuy
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	96.963.350	Kecamatan Ngamprah
Program peningkatan pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	150.838.600	Kecamatan Cipatat
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	199.957.340	Kecamatan Padalarang
Program peningkatan pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	147.150.520	Kecamatan Batujajar
Program peningkatan pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	198.760.650	Kecamatan Cihampelas
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	396.667.040	Kecamatan Cililin
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	210.298.000	Kecamatan Cipongkor
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	154.646.954	Kecamatan Rongga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Pogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan			PD
			2021		
			Target	Rp	
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	559.208.760	Kecamatan Sindangkerta
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	305.697.788	Kecamatan Gununghalu
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan sesuai SOP	%	100%	470.520.600	Kecamatan Saguling
Program Penataan Management Pemerintah an Desa	Persentase Administrasi Desa Yang Tertib	%	47%	2.240.000.000	DPMD
	Persentase Pemenuhan SPM Desa		65%		
Program Peningkatan Kap asitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kap asitas Aparatur Pemerintah Desa	%	49,10%	1.956.500.000	DPMD

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2023



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

TAHUN 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh SKPD.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.

5.1. PAGU INDIKATIF

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu dilakukan perubahan klasifikasi anggaran, dengan melihat transaksi pemerintah berdasarkan capaian kinerja. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, agar memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan

standar akuntabilitas publik, serta memudahkan dalam menentukan alokasi pagu indikatif didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

A. Prioritas I

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

C. Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja, diantaranya : Belanja Pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa dan belanja tidak terduga.



Secara umum prioritas pembangunan untuk kewilayahan pada tahun 2021 diarahkan secara rinci kerangka pendanaan untuk membiayai rencana prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	624.649.574.010
4.1.01	Pajak Daerah	463.900.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	31.603.500.221
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	128.651.231.768
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.518.269.811.397
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.209.774.041.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	308.495.770.397
	Jumlah Pendapatan	2.142.919.385.407
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	2.399.531.361.941
5.1.01	Belanja Pegawai	1.420.904.681.770
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	913.223.204.714
5.1.03	Belanja Bunga	12.223.021.987
5.1.05	Belanja Hibah	50.259.443.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.921.009.970
5.2	BELANJA MODAL	490.421.503.216
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.567.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.476.725.315
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.179.901.182
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	328.233.023.769
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.964.852.950
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000



5.4	BELANJA TRANSFER	269.232.716.768
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	50.173.226.668
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.059.490.100
	Jumlah Belanja	3.189.185.581.925
	Total Surplus/(Defisit)	(1.046.266.196.518)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	285.500.400.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	285.500.400.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	285.500.400.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	285.500.400.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(760.765.796.518)
	TOTAL APBD	2.428.419.785.407

Sumber : Bappedalitbangda dan BPKD KBB, 2020.

(i) **Bidang Fisik dan Tata Ruang**, dialokasikan sebesar Rp 641,730,875,813 dengan terdiri dari PD :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dengan program prioritasnya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda); Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan Gedung; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengembangan Jasa Konstruksi; Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan dan Pemukiman** dengan program prioritasnya adalah Rogram Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh; Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu); Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Program Pengelolaan Tanah Kosong; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).



-
3. **Dinas Lingkungan Hidup**, dengan program prioritasnya adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Rogram Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Rogram Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Pengelolaan Persampahan;
 4. **Dinas Perhubungan** dengan program prioritasnya adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Pengelolaan Pelayaran;
- (ii) **Bidang Ekonomi**, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp 148,365,369,972 ,- terdiri dari SKPD :
1. **Dinas Perikanan dan Peternakan**, program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan; Rogram Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan; Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Rogram Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Rogram Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian; Program Penyuluhan Pertanian;
 2. **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**, dengan program prioritasnya adalah Rogram Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penanganan



Kerawanan Pangan; Program Pengawasan Keamanan Pangan; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian; Program Penyuluhan Pertanian

3. **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Kebudayaan; Rogram Pengembangan Kesenian Tradisional; Rogram Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Rogram Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Rogram Pelayanan Penanaman Modal; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
5. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**, dengan program prioritasnya Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; Rogram Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; Program Pengendalian Izin Usaha Industri; Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
6. **Dinas Koperasi dan UMKM**, dengan program prioritasnya adalah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; Program Pengawasan

Dan Pemeriksaan Koperasi; Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi; Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian; Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk); Program Pengembangan Umkm;

(iii). **Bidang Sosial**, dialokasikan sebesar Rp 1,345,295,041,983 dengan terdiri dari SKPD :

1. **Dinas Pendidikan**, dengan program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum; Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
2. **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
3. **Dinas Kesehatan**, program prioritasnya adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
4. **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, program prioritasnya adalah Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (Pha); Program Perlindungan Khusus Anak; Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb); Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks);
5. **Dinas Sosial**, program prioritasnya adalah Program Pemberdayaan Sosial ; Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak

Kekerasan; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Program Penanganan Bencana; Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

6. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, dengan program prioritasnya adalah Program Perencanaan Tenaga Kerja; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Hubungan Industrial; Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
7. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, program prioritasnya adalah Program Penanggulangan Bencana.

(iv) **Bidang Pemerintahan**, dialokasikan sebesar Rp 754,561,577,389 dari SKPD :

1. **Sekretariat Daerah**, dengan program prioritasnya adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perekonomian Dan Pembangunan; Program Penataan Administrasi Umum
2. **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**, program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. **Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**, Program Prioritasnya adalah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia; Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam; Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

4. **Sekretariat Dewan**, program prioritasnya adalah Program Layanan Dan Administrasi Keuangan; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd;
5. **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**, program prioritasnya adalah Program Pembinaan Perpustakaan; Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
6. **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**, dengan program prioritasnya adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Program Penanggulangan Kebakaran;
7. **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**, dengan program prioritasnya adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Rogram Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; Rogram Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
8. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, program prioritasnya adalah Program Penataan Desa; Rogram Peningkatan Kerjasama Desa; Rogram Administrasi Pemerintahan Desa; Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
9. **Inspektorat**, dengan program prioritasnya adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;



10. **Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia**, program prioritasnya adalah Program Kepegawaian Daerah; Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan program prioritasnya adalah Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
12. **Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik**, dengan program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Statistik Sektor; Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
13. **Kecamatan (16 Kecamatan)**

5.2 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2021

Program dan kegiatan PD Tahun 2021 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja PD Tahun 2021 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan dan subkegiatan PD yang disesuaikan dengan hasil pemetaan (*mapping*) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah , sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

1. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
2. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan;
3. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan;
4. Lokasi Kegiatan;
5. Target Capaian Kinerja;
6. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif;
7. Sumber Dana;



8. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022.

Penjelasan lebih rinci terkait program, kegiatan dan subkegiatan PD Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 yang dibahas per bidang pembangunan dapat dilihat pada bagian lampiran dari dokumen RKPD ini. (Lampiran RKPD Tahun 2021).



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan melalui strategi meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita - cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator - indikator pembangunan yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan 2020. Tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2021 disusun mengacu RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan 9 (Sembilan) Tujuan yang telah dilengkapi dengan 34 ukuran keberhasilan (indikator) yang memprementasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan, disertai dengan target keberhasilan kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2023. Pada tabel 7.1 di lampiran RPJMD disajikan 9 tujuan pembangunan untuk misi RPJMD, beserta uraian indikator ukuran keberhasilan (indikator) serta target keberhasilan kinerja makro pembangunan tahun 2021 berdasarkan RPJMD Tahun 2018 – 2023.

**Tabel 7.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Bandung Barat**

No	Indikator	Satuan	Data Tahun Awal (Baseline)	Target Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skala	67,34	68,07	68,80	69,54	70,28	71,04
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Skor	1,01	0,96	0,89	0,82	0,75	0,68
3	Persentase Penduduk Miskin	%	11,15	10,81	10,49	10,17	9,87	9,57
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	5,92	6,04	6,16	6,28	6,41
5	Indeks Gini	Skala	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,05	8,78	8,52	8,26	8,01	7,77

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2023

6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Bandung Barat Tahun 2017 – 2018, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Bandung Barat pada Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bandung Barat

No	Indikator	Satuan	Data Tahun Awal (Baseline)	Target Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skala	67,34	68,07	68,80	69,54	70,28	71,04
2	Persentase Penduduk Miskin	%	11,15	10,81	10,49	10,17	9,87	9,57
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	5,92	6,04	6,16	6,28	6,41
4	PDRB Perkapita	Rp	6.924.835	7.710.279	7.157.509	7.398.002	7.646.574	7.903.499
5	Indeks Gini	Skala	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,05	8,78	8,52	8,26	8,01	7,77
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala	79,11	79,34	79,64	80,24	80,57	80,57
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	N/A	50,46	50,66	50,86	51,06	51,26



9	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	CC	CC	B	BB	BB	A
10	Indeks Kebahagiaan	Skala	N/A	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6 - 76
11	Indeks Rasa Aman	Skala	0,3	0,3	0,4	0,43	0,45	0,45
12	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	81,4	83,7	86	88,25	90,8	93,35
13	Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	7,05	7,2	7,34	7,5	7,65	7,81
14	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jiwa	7.000.000 Jiwa	7.000.000 Jiwa	7.500.000 Jiwa	8.000.000 Jiwa	8.500.000 Jiwa	8.500.000 Jiwa
15	Indeks Kesulitan Geografis	Skala	40,06	38,53	36,98	35,41	33,82	32,22

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2023

6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci

Selain itu, indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 juga memuat target capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Misi / Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD (2023)
Misi 1 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas							
Indeks Pendidikan	Skala	67,65	68,87	70,04	71,28	72,84	74,21
Jumlah pengunjung perpustakaan	Jiwa	17	18	21.6	25.2	28.8	32.4
Indeks Kesehatan	Indeks	79.92	79.95	79.98	80.01	80.04	80.07
Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,36	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32
Indeks Kebahagiaan	Skala	N/A	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6 - 76
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,4	83,7	86	88,25	90,8	93,35
Persentase partisipasi masyarakat terhadap aktivitas kebudayaan daerah	%	27%	27%	27%	30%	32%	32%
Indeks Rasa Aman	Skala	0,3	0,3	0,4	0,43	0,45	0,45
Indeks Resiko Bencana Indonesia	Kategori Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang



Misi / Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	
Persentase Angka PMKS yang Tertangani	%	47,31	49,73	50,94	52,15	53,36	54,57
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skala	N/A	68,6 - 69	69,1 – 69,5	69,6 - 70	70,1 – 70,5	70,6 - 71
Indeks Demokrasi	Skala	N/A	68,79 – 70,78	70,79 – 71,78	71,79 – 72,78	72,79 – 73,78	73,49 – 74,78
Persentase LKD Aktif	%	40	50	60	70	80	90
Kontribusi BumDes terhadap PADes	%	40	48	56	64	72	80
Persentase Pemuda yang memiliki kecakapan hidup	%	N/A	29	46,75	64,50	82,25	100
Indeks pemberdayaan gender	Indeks	53,98	54,03	54,13	54,21	54,32	54,49
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala	79,11	79,34	79,64	80,24	80,57	80,57
Misi 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing							
Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,80	5,92	6,04	6,16	6,28	6,41
Pertumbuhan sektor pertanian	%	7,05	7,2	7,34	7,5	7,65	7,81
Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	7,63	7,79	7,95	8,11	8,28	8,45
Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,83	10,03	10,24	10,45	10,67	10,89
Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jiwa	7.000.000 Jiwa	7.000.000 Jiwa	7.500.000 Jiwa	8.000.000 Jiwa	8.500.000 Jiwa	8.500.000 Jiwa
Nilai investasi PMDN	Trilyun Rupiah	Rp3.250	Rp3.250	Rp3.300	Rp3.350	Rp3.400	Rp3.450
Tingkat pengangguran terbuka	%	9,05	8,78	8,52	8,26	8,01	7,77
Persentase koperasi sehat	%	45	52,1	53,8	55,4	56,8	58,2
Peningkatan Skala Usaha Mikro	Pelaku Usaha	N/A	20	45	75	110	125
Laju Inflasi	Skor	3,06	3,65	3,46	3,29	3,14	3,01
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi							
Indeks Kesulitan Geografis	Skala	40,06	38,53	36,98	35,41	33,82	32,22
Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	52,58	58,42	60,17	61,92	63,67	65,42
Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	N/A	50,46	50,66	50,86	51,06	51,26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Misi / Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD (2023)
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi							
Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	CC	CC	B	BB	BB	A
Indeks Merit	Indeks	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
Nilai SAKIP	Angka	B	B	BB	BB	A	A
Opini BPK	Skor	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks SPBE	Skala	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,23	77,23	78,23	79,23	80,23	81,23

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2023

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2023, dan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 - 2029.

Bagian yang sangat penting dalam suatu penyusunan rencana kerja pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan. Prioritas Pembangunan Tahun 2021 merupakan hasil dari pengejawantahan dari sasaran Misi RPJMD Tahun 2021 yang selanjutnya dipengaruhi oleh Isu Strategi Tahun 2021 dan menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2021 sehingga perangkat daerah harus menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut disusunlah sasaran, indikator dan target pembangunan. Untuk mencapai target pembangunan maka disusunlah strategi dan kebijakan yang jitu. Selanjutnya dari kebijakan-kebijakan dalam operasionalnya dilaksanakan melalui program prioritas beserta kegiatan-kegiatan prioritas yang dalam implementasinya tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah maka disusunlah program pembangunan daerah beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program prioritas dan kegiatan prioritas Tahun 2021.